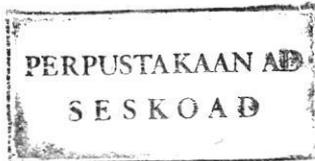
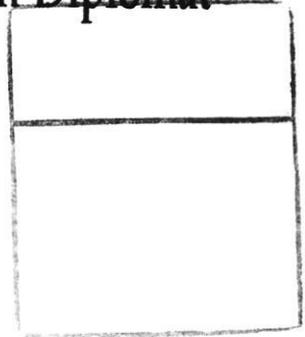


JENDERAL MAYOR BAMBANG SUGENG

Kiprahnya Sebagai Prajurit dan Diplomat



No. Inv: 05167 /SESKOAD

Diterbitkan oleh :

**DINAS PEMBINAAN MENTAL ANGKATAN DARAT
BANDUNG
2006**

922-000

JENDERAL MAYOR BAMBANG SUGENG

Kiprahnya Sebagai Prajurit dan Diplomat

Penanggung Jawab :

Brigjen TNI H. Imam Santoso

Pengarah :

Kolonel Inf. Drs. H.M. Samidin Nashir, MM

Tim Penyusun :

Kolonel Inf Widjdan Hamam
Letkol Inf R. Herkusdianto
Letkol Inf Sugiyanto Hadinoto
Letkol Inf Iwan Artono HS
Letkol Caj Taufik Iskandar
Letkol Caj Nurwasis
Mayor Caj Yusuf Ambari
Mayor Inf Wardus Tamba
Mayor Caj Rahman
Mayor Caj Irkham Santoso
Kapten Caj Abdul Wahid

Kontributor Data :

Edi Hartoto BC. AK

Desain Sampul :

Ruly

Percetakan :

CV. Grayuna

Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Pasal 44

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja mengajarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

“Jauhkanlah dirimu dari maksud-maksud dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari jalan hukum dan disiplin, karena jika tidak demikian, anasional maksud dan perbuatannya.

Jagalah nama gelarmu sebagai Tentara Nasional Indonesia yang membawa perlambang kepatuhan, ketentuan dan disiplin....”

(Bambang Soegeng, 18 Desember 1953)



**JENDERAL MAYOR BAMBANG SUGENG
KASAD (1952 – 1955)**



KEPALA DINAS PEMBINAAN MENTAL
ANGKATAN DARAT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T. karena atas ridhoNya penyusunan buku sejarah “**Biografi Kasad Jenderal Mayor Bambang Sugeng (1952 – 1955) Kiprahnya Sebagai Prajurit dan Diplomat**” akhirnya dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Sudah kesekian kali Disbintalad menerbitkan buku tentang sejarah biografi tokoh TNI Angkatan Darat, tetapi rasanya selalu ada motivasi tersendiri untuk selalu terus menggali sejarah biografi para tokoh TNI Angkatan Darat.

Buku sejarah biografi “Jenderal Mayor Bambang Sugeng Kiprahnya Sebagai Prajurit dan Diplomat” dapat hadir di tengah-tengah khasanah kepustakaan.

Penerbitan buku ini tidak dimaksudkan untuk mengkultusindividukan sosok seorang tokoh. Namun dikandung maksud agar dari buku sejarah ini dapat diperoleh pengalaman dan suri teladan bagi bangsa, khususnya generasi muda TNI Angkatan Darat dan generasi muda umumnya dalam melanjutkan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan

yang telah diraihnya agar unsur positif dapat terus dikembangkan dan yang negatif jangan sampai terulang lagi di kemudian hari.

Disadari penerbitan buku ini tidak luput dari berbagai kekurangan, walaupun upaya maksimal telah dilakukan. Kita sadar bahwa setiap kisah sejarah tidak akan mampu memvisualkan kembali secara utuh seperti keadaan sesungguhnya. Sekalipun demikian masih ada kemungkinan perbaikan di kemudian hari. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama generasi muda sekarang dan generasi yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2006

KEPALA DINAS PEMBINAAN MENTAL



IMAM SANTOSO

BRIGADIR JENDERAL TNI



JENDERAL TNI DJOKO SANTOSO
Kepala Staf Angkatan Darat



KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

SAMBUTAN

PADA PENERBITAN BUKU SEJARAH BIOGRAFI
“JENDERAL MAYOR BAMBANG SUGENG
KIPRAHNYA SEBAGAI PRAJURIT DAN DIPLOMAT”

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira atas penerbitan buku sejarah biografi Kasad “*Jenderal Mayor Bambang Sugeng, Kiprahnya Sebagai Prajurit dan Diplomat*” yang disusun oleh Disbintalad.

Gagasan menerbitkan buku sejarah yang mengangkat biografi sosok mantan Kasad ke 3 (1952-1955) seperti ini merupakan langkah yang positif, karena dapat dijadikan sebagai salah satu wahana pelestarian, pewarisan, penanaman nilai-nilai luhur kejuangan bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur kejuangan TNI/TNI AD kepada generasi muda TNI/TNI AD khususnya, dan generasi muda pada umumnya.

Dalam kepemimpinannya saat itu Jenderal Mayor Bambang Sugeng sebagai Kasad berupaya untuk meningkatkan mutu sumber daya prajurit melalui pembangunan Angkatan Darat. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mewujudkan kebijakan tersebut diawali dengan pengesahan berdirinya pendidikan

calon Perwira, Akademi Militer dan Bintara Arteleri. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Perwira dan Bintara yang dirasa kurang.

Kiprah Jenderal Mayor Bambang Sugeng di lingkungan TNI AD juga sangat berarti di kala terjadi disharmonisasi sebagai akibat peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam buku ini kita dapat mengetahui upaya Jenderal Mayor Bambang Sugeng selaku Kasad dalam mempererat persatuan dan kesatuan di lingkungan TNI AD. Kita menyadari bahwa persatuan dan kesatuan antara sesama prajurit sangat menentukan keberhasilan tugas pokok TNI AD dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu dalam diri setiap prajurit harus selalu tertanam jiwa korsia yang utuh agar terhindar dari upaya yang akan memecah belah kesatuan TNI AD.

Sikap, tutur kata dan tindakan Jenderal Mayor Bambang Sugeng yang tertulis dalam buku ini kiranya dapat dijadikan teladan, pedoman dan pelita bagi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semoga buku ini dapat memenuhi harapan tersebut dan bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2006



KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Santoso

JOKO SANTOSO
JENDERAL TNI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR KADISBINTALAD	vii
SAMBUTAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT	xi
DAFTAR ISI	xiii
PANCASILA	xv
UUD 1945	xvi
SAPTA MARGA	xvii
SUMPAH PRAJURIT	xviii
8 WAJIB TNI	xix
11 AZAS KEPEMIMPINAN TNI	xx
KODE ETIK PERWIRA	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : PUTRA TEGALREJO	9
1. Lahir Sebagai Anak Desa	9
2. Masa Kecil Hingga Remaja	13
a. Masa Sekolah	14
b. Bekerja Membantu Orang Tua	15
3. Membina Rumah Tangga Bahagia.....	17
BAB III : MEMENUHI PANGGILAN IBU PERTIWI	21
1. Mengabdikan Sebagai Perwira PETA.....	21
2. Pengabdian Pada Masa Perang Kemerdekaan	25
3. Meniti Puncak Karier.....	53
BAB IV : MENEGAKKAN SOLIDITAS PRAJURIT	70
1. Intervensi Parlemen Kedalam Angkatan Darat	70
2. Masa Rakyat Menuntut Parlemen Dibubarkan	72
<i>Kiprahnya Sebagai Prajurit dan Diplomat</i>	xiii

3. Rasa Tidak Puas Berakibat Peristiwa 17 Oktober 1952	74
4. Akibat Peristiwa 17 Oktober 1952 di Daerah.....	78
5. Menggalang Persatuan Perwira AD	79
6. Penyelesaian Model TNI	88
7. Piagam Keutuhan Angkatan Darat.....	97
 BAB V : MENGEMBAN TUGAS DUTA BANGSA	101
1. Meninggalkan Angkatan Darat	101
2. Duta Besar Manca Negara.....	104
3. Duta Besar Di Vatikan, 1956 – 1959	105
4. Duta Besar di Jepang, 1960 – 1964.....	106
5. Duta Besar di Brazil, 1964 – 1967	112
 BAB VI : AKHIR PENGABDIAN	115
1. Masa Purna Tugas.....	115
2. Pengabdian Terakhir Bambang Sugeng	117
3. Monumen Bambang Sugeng	123
 BAB VII : PENUTUP	131
 BIODATA JENDERAL MAYOR BAMBANG SUGENG	134
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	139

—o0o—



PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia, ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongnya keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SAPTA MARGA

1. KAMI WARGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSENDIKAN PANCASILA.
2. KAMI PATRIOT INDONESIA, PEDUKUNG SERTA PEMBELA IDEOLOGI NEGARA, YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN TIDAK MENGENAL MENYERAH.
3. KAMI KSATRIA INDONESIA YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SERTA MEMBELA KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KeadILAN.
4. KAMI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ADALAH BHAYANGKARI NEGARA DAN BANGSA INDONESIA.
5. KAMI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, MEMEGANG TEGUH DISIPLIN, PATUH DAN TAAT KEPADA PIMPINAN, SERTA MENJUNJUNG TINGGI SIKAP DAN KEHORMATAN PRAJURIT.
6. KAMI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, MENGUTAMAKAN KEPERWIRAAN DI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SERTA SENANTIASA SIAP SEDIA BERBHAKTI KEPADA NEGARA DAN BANGSA.
7. KAMI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, SETIA DAN MENEPATI JANJI SERTA SUMPAH PRAJURIT.

SUMPAH PRAJURIT

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

1. BAHWA SAYA AKAN SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.
2. BAHWA SAYA AKAN TUNDUK KEPADA HUKUM DAN MEMEGANG TEGUH DISIPLIN KEPRAJURITAN.
3. BAHWA SAYA AKAN TUNDUK KEPADA ATASAN DENGAN TIDAK MEMBANTAH PERINTAH ATAU PUTUSAN.
4. BAHWA SAYA AKAN MENJALANKAN SEGALA KEWAJIBAN DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB KEPADA TENTARA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
5. BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG SEGALA RAHASIA TENTARA SEKERAS-KERASNYA.

8 WAJIB TNI

1. BERSIKAP RAMAH TAMAH TERHADAP RAKYAT.
2. BERSIKAP SOPAN SANTUN TERHADAP RAKYAT.
3. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN WANITA.
4. MENJAGA KEHORMATAN DIRI DI MUKA UMUM.
5. SENANTIASA MENJADI CONTOH DALAM SIKAP DAN KESEDERHANAAN.
6. TIDAK SEKALI-KALI MERUGIKAN RAKYAT.
7. TIDAK SEKALI-KALI MENAKUTI DAN MENYAKITI HATI RAKYAT.
8. MENJADI CONTOH DAN MEMPELOPORI USAHA-USAHA UNTUK MENGATASI KESULITAN RAKYAT SEKITARNYA.

11 AZAS KEPEMIMPINAN TNI

1. **TAQWA**
Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepadanya.
2. **ING NGARSA SUNG TULADA**
Memberi suri teladan dihadapan anak buah.
3. **ING MADYA MANGUN KARSA**
Ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah.
4. **TUT WURI HANDAYANI**
Mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah.
5. **WASPADA PURBA WISESA**
Selalu waspada, mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada anak buah.
6. **AMBEG PARAMA ARTA**
Dapat memilih dengan tepat mana yang harus dilakukan.
7. **PRASAJA**
Tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan
8. **SATYA**
Sikap loyal yang timbal balik, dari atasan terhadap bawahan, dari bawahan terhadap atasan dan kesamping.
9. **GEMI NASTITI**
Kesabaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlakukan.
10. **BELAKA**
Kemampuan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan.
11. **LEGAWA**
Kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya.

KODE ETIK PERWIRA BUDHI~BAKTI~WIRA~UTAMA

- BUDHI** : PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA
BERBUAT LUHUR, BERSENDIKAN :
- KETUHANAN YANG MAHA ESA
 - MEMBELA KEBENARAN DAN KEADILAN
 - MEMILIKI SIFAT-SIFAT KESEDERHANAAN
- BAKTI** : PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA
BERBAKTI UNTUK :
- MENDUKUNG CITA-CITA NASIONAL
 - MENCINTAI KEMERDEKAAN DAN
KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA.
 - MENJUNJUNG TINGGI KEBUDAYAAN
INDONESIA.
 - SETIAP SAAT BERSEDIA MEMBELA
KEPENTINGAN NUSA DAN BANGSA
GUNA MENCAPAI KEBAHAGIAAN
RAKYAT INDONESIA.
- WIRA** : PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ADALAH KSATRIA :
- MEMEGANG TEGUH KESETIAAN DAN
KETAATAN.
 - PEMIMPIN (SOKO GURU) DARI
BAWAHANNYA.
 - BERANI BERTANGGUNG JAWAB ATAS
TINDAKANNYA.
- UTAMA** : PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ADALAH :
- PENEGAK PERSAUDARAAN DAN
PERIKEMANUSIAAN.
 - PENJUNJUNG TINGGI NAMA DAN
KEHORMATAN KORPS PERWIRA
TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Bab

1

PENDAHULUAN

Di Jakarta Ibukota Republik Indonesia, pada tanggal 17 Oktober 1952 telah terjadi suatu unjuk rasa yang diorganisir oleh segolongan rakyat. Para pengunjung rasa menuntut kepada Presiden Sukarno untuk membubarkan parlemen, melaksanakan Pemilihan Umum serta mengadakan pembersihan di dalam kementerian-kementerian. Presiden menjawab akan mempertimbangkan semua usul itu sesuai dengan kepentingan perjuangan bangsa Indonesia.

Demonstrasi tersebut tidak menimbulkan masalah yang berlarut, akan tetapi bersamaan dengan berlangsungnya demonstrasi, waktu itu pimpinan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H. Nasution bersama dengan para Panglima Daerah telah menghadap Presiden di Istana Merdeka.

KSAD Kolonel A.H. Nasution menghadap Presiden mengusulkan agar Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) karena telah campur tangan terlalu dalam tentang masalah-masalah intern Angkatan Darat, dan kemudian mengambil alih kekuasaan Negara dan pemerintahan sepenuhnya untuk menyelamatkan Negara (Kembali ke Undang-undang Dasar 1945).

Presiden menolak usulan itu dengan alasan bahwa : *"Presiden tidak mau menjadi diktator dan berjanji akan*

mempelajari situasi". Peristiwa 17 Oktober 1952 itu menjadi semakin panas karena disertai dengan demonstrasi senjata-senjata berat yang diarahkan ke gedung parlemen dan Istana Merdeka

Penolakan Presiden atas saran pimpinan Angkatan Darat tersebut berkembang menjadi kemelut di tubuh Angkatan Darat, walaupun tidak ada usaha untuk memperuncing situasi, apalagi usaha untuk merebut kekuasaan. Justru KSAD Kolonel A.H. Nasution secepatnya menyadari, bahwa cara yang ditempuhnya itu kurang tepat walaupun tujuan sebenarnya adalah menyatakan ketidakpuasan terhadap DPRS dan menghendaki kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Sebagai konsekuensinya, Kolonel A.H Nasution meminta pemerintah membebaskannya dari jabatan KSAD dan bersedia untuk diperiksa menurut saluran hukum yang berlaku atas tindakan yang telah dilakukannya, untuk menghindarkan keretakan dan perpecahan di dalam tubuh Angkatan Darat serta menghindari akibat negatif yang lebih luas.

Walaupun telah dilakukan pengusutan dan pemeriksaan terhadap Kolonel A.H Nasution, tetapi penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952 belum berhasil dan menjadi berlarut-larut. Untuk mengatasi perpecahan yang semakin mendalam timbul prakarsa penyelesaian sesuai kepribadian TNI, "*Bahwa segala sesuatu yang merupakan kesulitan dalam tubuh TNI yang mungkin membawa bibit pertentangan dan perpecahan, harus diselesaikan dan dipecahkan oleh TNI sendiri secara musyawarah kekeluargaan, dengan tujuan dan itikad : demi keutuhan TNI itu sendiri*".

Untuk itu diadakan pertemuan warga TNI AD di Yogyakarta, yang melahirkan "*Piagam Keutuhan Angkatan Darat*".

Pemrakarsa pertemuan tersebut adalah Jenderal Mayor Bambang Sugeng.

Bambang Sugeng dilahirkan tanggal 31 Oktober 1931 di Tegalrejo Magelang, sebagai anak sulung dari enam bersaudara. Ia menempuh pendidikan Hollands Inlandsche School (HIS) di Tegalrejo dan Middelbar Uitgebreid Lager Onderwijn (MULO) di Purwokerto, kemudian pindah ke Yogyakarta untuk pendidikan yang lebih tinggi di Algemene Middelbar School (AMS) Bagian A. Semula Bambang Sugeng bercita-cita menjadi ahli hukum, maka ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Hukum (*Reshts Hoge School*) Jakarta. Namun sebelum pendidikannya selesai datang bala tentara Jepang.

Dengan bekal pendidikan AMS (Sekolah Lanjutan Atas) Bagian A, sebelum memulai kariernya sebagai seorang prajurit, Bambang Sugeng bekerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dalam tahun 1940, dengan pangkat Klerk I (juru tulis). Karier militer Bambang Sugeng dirintis sejak selesai dari pendidikan Opsir (Perwira) Peta di *Gyugun Renseitai* Bogor, tahun 1943. Kemudian menjabat sebagai *Cudanco* (Komandan Kompi) di Magelang dan *Daidanco* (Komandan Batalyon) di Gombang.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang menuntut pengorbanan jiwa raga para pejuang bangsa untuk mempertahankannya, Bambang Sugeng sebagai bekas *Daidanco* Peta tidak tinggal diam. Bersama-sama bekas anggota Peta lainnya segera menyumbangkan tenaganya untuk menjaga tanah air yang baru merdeka itu. Bermodalkan pengalaman sebagai perwira Peta, Bambang Sugeng dengan mudah menghimpun para pemuda mantan Peta dan pemuda pejuang lain di daerahnya untuk dilatih kemiliteran dalam rangka memper-

tahankan proklamasi kemerdekaan. Sesuai kecakapan kemiliteran dan pengalaman kepemimpinannya, Bambang Sugeng diangkat sebagai Komandan Resimen TKR di Wonosobo dengan pangkat Letnan Kolonel.

Diawali sebagai Komandan Resimen TKR Bambang Sugeng memulai kariernya sebagai Perwira TNI. Sebagai Perwira TNI yang lahir di tengah-tengah perjuangan kemerdekaan dia aktif dalam hampir semua kegiatan operasi militer saat itu, khususnya menghadapi bala tentara Jepang di Magelang, tentara Sekutu di Jawa Tengah terutama saat mengusir dari Magelang dan Ambarawa, serta dalam menghadapi Agresi Belanda di daerah Kedu dan Banyumas.

Dalam perundingan penentuan garis demarkasi dengan Belanda sesudah Agresi Militer Belanda yang pertama, Bambang Sugeng mendapat kepercayaan untuk memimpin delegasi militer Indonesia di Front Banyumas-Kedu, yang diselenggarakan di Kemit, Wonosobo, Delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut beranggotakan tujuh orang, yaitu : Letkol Kun Kamdani, Mayor Rakhmat, Mayor Panuju, kapten Subiardono, Kapten Surono, Letnan Kusuma, dan Letnan Suyoto.

Atas dasar kecakapan dan pengalamannya di dalam memimpin pasukan, pada saat pemerintah melaksanakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) organisasi militer tahun 1948, Kolonel Bambang Sugeng diserahi tugas menjabat Komandan Divisi III, yang wilayah tugasnya meliputi daerah Banyumas, Pekalongan, Kedu dan Yogyakarta. Tugas ini tidaklah ringan, karena saat itu Ibukota RI berada di Yogyakarta, yang tentu saja akan senantiasa menjadi sasaran utama gerakan agresi militer Belanda.

Selang beberapa bulan Kolonel Bambang Sugeng mengemban tugas Komandan Divisi III, tanggal 19 Desember

1948 Belanda melancarkan aksinya Agresi Militer II dengan menyerang Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta. Sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh pimpinan Angkatan Perang, maka di daerah Divisi III juga dibentuk *Wehrkreise-wehrkreise* untuk melakukan perlawanan secara gerilya.

- Daerah *Wehrkreise Divisi III* meliputi tiga daerah yaitu:
- Pertama ; *Wehrkreise I* meliputi daerah eks Karesidenan Banyumas dan Pekalongan dibawah pimpinan Letkol M. Bakhrun, terdiri dari empat *Sub Wehrkreise* (SWKS) dan satu Korps Armada.
 - Kedua ; *Wehrkreise II* meliputi daerah Eks Karesidenan Kedu dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani, terdiri dari tujuh *Sub Wehrkreise*.
 - Ketiga ; *Wehrkreise III* meliputi Daerah istimewa Yogyakarta, dibagi kedalam 6 *Sub Wehrkreise*, dipimpin Letkol Suharto.

Di daerah *Wehrkreise-wehrkreise* itulah Kolonel Bambang Sugeng mengendalikan serangan pasukan Divisi III terhadap Belanda secara teratur, sesuai dengan doktrin perang wilayah/perintah siasat dari Markas Besar Komando Jawa (MBKD).

Seusai Perang Kemerdekaan, pada waktu pengakuan kedaulatan RI oleh Kerajaan Belanda tanggal 27 Desember 1949, dengan keputusan Presiden, Kolonel Bambang Sugeng diangkat sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Darat. Dan sebelum itu tanggal 21 September 1944 s.d. 27 Desember 1949 atas saran Kolonel AH. Nasution, Panglima Bambang Sugeng menjabat WK I KSAD (Wakil I Panglima Besar). Namun jabatan ini tidak lama diembannya, pada bulan Juni 1950 Kolonel Bambang Sugeng diangkat sebagai Panglima

Divisi I yang selanjutnya menjadi Tentara dan Teritorium (TT) V/Jawa Timur.

Dengan penugasannya ini berarti mulailah Bambang Sugeng dengan tugas-tugas baru di bidang diplomatik disamping tugas militer, yang ternyata dikemudian hari sangat bermanfaat bagi pengabdianya sebagai diplomat (Duta Besar) di beberapa negara.

Dalam sejarah TNI AD, 17 Oktober 1952 merupakan hari kelabu karena adanya kemelut yang melanda tubuh TNI AD dan berakibat mundurnya Kolonel A.H Nasution dari jabatan KSAD. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah kemudian menunjuk Kolonel Bambang Sugeng sebagai Pejabat Sementara KSAD. Dan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 76/M/1954 tanggal 31 Maret 1954 Kolonel Bambang Sugeng dikukuhkan sebagai KSAD dengan pangkat Jenderal Mayor.

Jenderal Mayor Bambang Sugeng merasa prihatin dengan adanya kemelut dalam tubuh TNI AD sejak tahun 1952. Sebagai prajurit yang memiliki jiwa dan semangat yang selalu menjunjung tinggi kesatuan, Bambang Sugeng berusaha dengan segala daya segera mengatasi kemelut tersebut.

Untuk mengatasi bahaya yang mengancam tubuh TNI AD itu, KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng merasa berkewajiban mempersatukan TNI AD. Menurut Bambang Sugeng keutuhan TNI AD adalah syarat mutlak untuk membangun suatu Angkatan Bersenjata yang kuat, dengan mengorbankan kepentingan pribadi untuk keselamatan bangsa dan Negara, sebagaimana pesan almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Dalam Perintah hariannya Nomor 1 Tahun 1953, KSAD antara lain menekankan : “.... Inilah suatu bahaya yang

mengancam, karena di luar Tentara tetap diusahakan dengan bermacam-macam maksud untuk menguasai Tentara atau golongan-golongan dari Tentara”

“.... Sadarlah Perwira, Bintara, Prajurit, keamanan belum sempurna, Angkatan darat belum terbangun baik. Kesan apa dunia internasional memberikan kepadamu. Hal-hal inilah yang kita sekalian wajib memperhatikannya”.

Upaya membangun keutuhan Angkatan Darat kemudian diwujudkan dan dimantapkan dalam konferensi Perwira Angkatan Darat di Yogyakarta tahun 1955. Jenderal Mayor Bambang Sugeng memberikan pengarahan yang mengajak para Perwira untuk menentukan pokok-pokok sendi bangunan pikiran bagi perkembangan Angkatan Darat dengan cara menyelesaikan persoalan yang ada dalam diri Angkatan Darat, guna mendapatkan satu kebulatan tekad dan tujuan. Hasil dari konferensi ini ialah lahirnya “*Piagam Keutuhan Angkatan Darat*”.

Atas permohonannya sendiri Jenderal Mayor Bambang Sugeng mengakhiri jabatannya sebagai KSAD pada tahun 1955. Walaupun telah bebas dari tugas sebagai seorang militer, tetapi pengabdian Bambang Sugeng kepada bangsa dan Negara tidak pernah ditinggalkannya.

Setahun kemudian Bambang Sugeng diangkat oleh pemerintah RI sebagai Duta di Vatikan sampai tahun 1960. Setelah itu tugas Duta Besar dilanjutkan hingga tahun 1964 sebagai Duta Besar di Jepang dan Duta Besar di Brazilia yang berakhir tahun 1966.

Bambang Sugeng dikenal sebagai sosok yang sederhana. Sederhana dalam bicara, sederhana tindak lakunya, sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam segala-galanya. Ia tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah angkuh

terhadap siapapun. Setiap orang didekatinya dengan penuh kasih dan hormat.

Karena sifat-sifatnya itulah antara lain yang menjadikan tentara tawanan Jepang yang dipimpin Mayor Migaki menaruh rasa hormat dan kagum kepada Bambang Sugeng yang diabadikan di atas prasasti, yang berbunyi : “SELOEROEH DOENIA SEKELOEARGA”.

Di akhir hayatnya Bambang Sugeng berpesan, ia ingin dimakamkan di tepi Sungai Progo, di tempat gugurnya 2.200 jiwa pemuda pejuang akibat keganasan tentara penjajahan Belanda pada tahun 1945-1949. Sesuai pesannya dan untuk mengenang perjuangannya dibangunlah monumen Bambang Sugeng di Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah.*

Bab 2

PUTRA TEGALREJO

1. Lahir Sebagai Anak Desa

Magelang merupakan sebuah kota Kabupaten yang ramai karena letaknya yang berada di antara kota-kota Yogyakarta, Purworejo, Temanggung dan Semarang. Gunung Tidar sebuah gunung kecil berdiri megah di tengah kota, hawanya sejuk dan menghijau oleh luasnya sawah dan rimbunnya pepohonan, serta pemandangan alam sekelilingnya yang mempesona. Dua buah sungai besar, kali Progo dan kali Elo berkelok di antara sawah yang membentang bagaikan dua ekor naga yang sedang melenggang di atas rerumputan ada di Magelang. Sementara itu beberapa gunung tinggi menjulang mengitari kota ini secara “*temu gelang*” (membentuk lingkaran). Menurut cerita dari kata inilah berasal nama Magelang. Gunung-gunung yang berderet Gunung Sumbing, Sindoro, Perahu, Telomoyo, Merbabu dan Merapi mengelilingi kota ini, menjadikan Magelang berada pada ketinggian rata-rata 375 m di atas permukaan laut dan berudara sejuk.

Magelang yang terletak di tengah pulau Jawa ini, karena letaknya yang strategis pernah menjadi kota militer, baik pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, maupun saat-saat perang kemerdekaan. Belanda menjadikan Magelang tempat untuk menjebak Pangeran Diponegoro melalui perundingan yang licik dan penuh tipu daya.



Ibu Zahro (orang tua Bambang Sugeng) bersama
Ibu Istiyah (istri Bambang Sugeng)
di rumah Jl. Suryo 9, Kebayoran Baru.

Untuk segera mengakhiri perang Diponegoro, dengan berbagai cara Belanda berusaha menangkap Pangeran Diponegoro. Di samping menggunakan cara militer, juga menjanjikan hadiah sebesar 80.000 ringgit, bagi siapa saja yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro. Karena setia dan cintanya rakyat kepada Pangeran diponegoro, usaha Belanda tidak membuahkan hasil. Akhirnya ditempuh cara perundingan dengan jaminan dari pihak Belanda, apabila perundingan gagal, Pangeran Diponegoro diperbolehkan

kembali ketempatnya. Tanggal 28 Maret 1830 perundingan dilaksanakan di Rumah Residen Kedu di Magelang. Perundingan ternyata gagal, namun tidak sesuai janjinya Jenderal de Kock memerintahkan Kolonel Cleerens dan anak buahnya untuk menangkap Pangeran Diponegoro, selanjutnya dibuang ke Menado.

Seratus lima belas tahun kemudian, pada tahun 1945 tiga bulan setelah Indonesia Merdeka, tentara Sekutu dengan diboncengi *Netherlands Indische Civil Administration* (NICA) yang ingin kembali menjajah Indonesia, berusaha menjadikan Magelang sebagai jalan pendekat untuk menghancurkan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang Markas Tingginya berada di Yogyakarta empat puluh kilo meter ke Selatan.

Di Magelang, suatu daerah yang mewarisi nilai-nilai tradisi keprajuritan Pangeran Diponegoro itulah pada tanggal 31 Oktober 1913 di desa Tegalrejo dari sepasang suami istri, Bapak Slamet dan Ibu Zahro, lahir dengan selamat anak laki-laki pertama yang kemudian diberi nama "Bambang Sugeng". Menurut orang Jawa "*Bambang*" mempunyai arti pemuda yang gagah dan rupawan, sedangkan "*Sugeng*" berarti Selamat, terbebas dari bahaya. Do'a dan harapan Pak Slamet dan Bu Zahro, diharapkan kelak anak pertamanya itu menjadi pemuda yang gagah, pemberani, rupawan dan senantiasa selamat dalam menjalani kehidupan.

Tegalrejo di mana Bambang Sugeng dilahirkan waktu itu adalah sebuah desa di Jawa yang jauh dari hiruk pikuk keramaian. Sebagaimana lazimnya penduduk Jawa, pada umumnya percaya betul bahwa kekuasaan yang Maha Mengetahui dan Maha Menentukan atas segala-galanya adalah "*Gusti Allah*" (Allah SWT). Upacara religius yang mereka lakukan selalu berkaitan dengan penyembahan

terhadap gusti Allah, walaupun upacara itu berlatar belakang dari kepribadian etnis. Demikian pula, kelahiran Bambang Sugeng disambut gembira oleh kedua orang tua, sanak kerabat dan tetangga dengan mengadakan upacara tradisi “*slametan*”, suatu ritual dengan menyajikan makanan juga minuman sebagai wujud rasa syukur dan untuk pengampunan dosa, tolak bala serta mencari keselamatan dunia dan akhirat.

Kehidupan rumah tangga Pak Slamet dengan Ibu Zahro tergolong keluarga yang relatif mampu seukuran masyarakat dan zamannya, namun mereka tetap hidup sederhana. Orang tua Bambang Sugeng, Pak Slamet membina rumah tangga dengan baik, sehingga dapat hidup dalam suasana tentram, damai, sejahtera dan harmonis. Keharmonisan rumah tangga



Jenderal Mayor Bambang Sugeng (ketiga dari kiri) foto bersama kedua orang tuanya Ibu Zahro (berkacamata) dan Bapak Slamet (keempat dari kiri).

Pak Slamet ini sangat mewarnai pertumbuhan dan perkembangan Bambang Sugeng. Walaupun orang desa Pak Slamet dan Bu Zahro berusaha membimbing dan mendidik Bambang Sugeng sebaik mungkin, agar anaknya kelak menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Sejak dini kepada Bambang Sugeng telah ditanamkan kejujuran, kesederhanaan melalui pendidikan agama serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Masa Kecil Hingga Remaja

Situasi pergolakan dalam usaha mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia mewarnai kehidupan masa kecil Bambang Sugeng sampai dengan mencapai usia remaja. Situasi ini tentu mempengaruhi jiwa dan cita-cita Bambang Sugeng dalam kehidupannya dikemudian hari.

Masa kecil adalah masa yang penuh dengan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya. Semenjak anak lahir, maka seorang ibu sangat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengurusan dan pemeliharaan anak. Sejak usia tiga tahun beban ibu agak sedikit berkurang, karena anak seusia itu sedikit demi sedikit dapat mengurangi ketergantungannya kepada orang tua, sudah dapat berjalan, makan dan main sendiri.

Bertambahnya usia, secara fisik anak mulai dapat mandiri dalam kegiatan, namun perkembangan jiwa khususnya pada usia tumbuh kembang tetap memerlukan bimbingan orang tua. Untuk itu Pak Slamet dengan tekun senantiasa memperhatikan dan mengawasi anaknya. Namun mungkin karena pengaruh lingkungan dan kebiasaan masyarakat, terdapat kebiasaan pada diri Bambang Sugeng kecil yang jarang dilakukan oleh anak-anak seusianya.

Pada usia dini, sebelum usia sekolah Bambang Sugeng mulai mengenal rokok dan mengisapnya walaupun secara sembunyi-sembunyi, Pak Slamet bukannya tidak mengetahui, bahkan dengan keras dia telah melarangnya. Tetapi nampaknya kebiasaan merokok itu tidak lagi bisa ditinggalkan. Karena takut dimarahi orang tuanya, Bambang Sugeng seringkali merokok sambil bersembunyi di atas langit-langit rumah orang tuanya. Kebiasaan buruk sejak kecil ini pada akhirnya berakibat pada kesehatan Bambang Sugeng. Ia sering sakit, bahkan mengidap sakit paru-paru yang cukup parah sebelum meninggal dunia.

Kebiasaan lain yang seringkali tidak dikehendaki orang tua pada anak-anaknya ialah kenakalan anak-anak, karena berakibat merepotkan keluarga. Pada masa kecilnya Bambang Sugeng tergolong anak yang nakal, tingkahnya cenderung menimbulkan kekhawatiran orang tua. Namun dari kenakalannya tersebut justru ada sifat menonjol yang dimiliki Bambang Sugeng, dia anak yang berani menghadapi resiko atas perbuatannya.

Sebagaimana halnya anak laki-laki lainnya Bambang Sugeng suka berolah raga, ia mempunyai hobi bermain sepak bola. Karena kegemarannya terhadap sepak bola, setiap disuruh belanja oleh orang tuanya, belanjanya ia jadikan gol pal (gawang) sepak bola. Akibatnya barang belanjanya seringkali rusak karena terkena bola atau secara tidak sengaja kena tendangan kaki pemain bola.

a. Masa Sekolah

Setelah Bambang Sugeng cukup umur untuk sekolah maka oleh ayahnya disekolahkan ke HIS (sekolah dasar) Tegalrejo tahun 1920 dan tamat tahun 1925. Semua pelajaran ditempuh dengan baik, lancar dan hampir tidak

pernah mengalami kesulitan. Setamat HIS, Bambang Sugeng melanjutkan ke MULO (semacam Sekolah Menengah Pertama) di Purwokerto. Pendidikan Mulo ditempuh dengan baik dan lancar berkat kecakapan dan kerajinannya mengikuti pelajaran. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah MULO pada tahun 1928, Bambang Sugeng melanjutkan ke AMS di Yogyakarta. Dengan masuknya di AMS Yogyakarta, berarti mendekati lagi rumahnya di Tegalrejo, sehingga ia tidak perlu indekos. Setiap hari Bambang Sugeng pergi ke sekolah dan se-kembalinya dari sekolah dapat membantu pekerjaan orang tuanya. Karena pandai membagi waktu, maka sekolahnya itu dapat ditempuh dengan lancar, bahkan memperoleh predikat sebagai pelajar teladan. Sebagai pelajar teladan dan putra bangsa Indonesia yang bercita-cita luhur, setamatnya dari AMS ia melanjutkan pendidikan di Rechts Hogere School (RHS) atau Perguruan Tinggi Ilmu Hukum di Jakarta.

Selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi Bambang Sugeng bercita-cita dan sangat berambisi menyelesaikan kuliahnya dengan lancar dan tepat waktu dengan harapan kelak dikemudian hari akan menjadi penegak hukum yang disegani. Sekalipun Bambang Sugeng mempunyai cita-cita dan berusaha agar dapat menyelesaikan pendidikannya di RHS, namun kalau Tuhan tidak menghendaknya pastilah tidak akan terlaksana. Kenyataan harus dihadapi Bambang Sugeng, karena beberapa alasan pada tahun 1936 ia tidak dapat menyelesaikan studinya di RHS.

b. Bekerja Membantu Orang Tua

Sekeluanya dari kuliah di RHS, Bambang Sugeng kembali mudik ke kampung halamannya di Tegalrejo

Magelang, untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Dalam adat Jawa dikenal istilah “*Pancer Wali*”, maksudnya seorang perempuan akan menjadi isteri seorang laki-laki jika pernikahan itu dilakukan oleh ayah kandung sebagai walinya. Kalau ayah kandung tidak ada karena meninggal dunia misalnya, maka wali dilakukan oleh saudara laki-laki (kakak atau adik) seayah yang sudah dewasa atau saudara laki-laki seayah. Semua anggota kekerabatan dari ayah yang dapat atau berhak mewakili sebagai wali disebut “*Pancer Wali*”. Dengan adanya pancer wali dikalangan masyarakat Jawa ini mengakibatkan adanya hak dan kewajiban tertentu bagi anak laki-laki dalam suatu keluarga. Anak laki-laki dituntut kewajiban “*Mendem jero, Mikul Duwur* : artinya harus dapat menjunjung tinggi derajat orang tua. Itulah kewajiban yang harus ditunaikan Bambang Sugeng sebagai anak laki-laki pertama dalam keluarga orang tuanya. Dia harus mengambil alih setidaknya membantu meringankan beban hidup orang tuanya menghidupi keluarganya. Walaupun untuk itu Bambang Sugeng terpaksa harus meninggalkan bangku kuliahnya di RHS Jakarta.

Sebagai pemuda cerdas yang mempunyai pandangan jauh ke depan, Bambang Sugeng berpendapat apabila tetap tinggal di desanya ikut orang tua tentu tidak akan memiliki pengalaman dan hidupnya tidak akan maju. Sadar terhadap kondisinya dan atas dasar keyakinannya Bambang Sugeng pergi merantau keluar jauh dari desa tanah kelahirannya untuk mencari pekerjaan penambah penghasilan untuk membantu orang tuanya. Keinginannya untuk meringankan beban kedua orang tuanya terkabul, Bambang Sugeng diterima bekerja sebagai seorang propagandis di Lampung, Sumatera Selatan.

Karena rasa tanggungjawabnya yang besar selama menjalankan tugas pekerjaannya Bambang Sugeng menunjukkan pribadi pegawai yang penuh dedikasi, ulet, disiplin dan cakap. Dalam pergaulan dengan sesama pegawai ia memiliki loyalitas dan kesetia kawan yang tinggi, sehingga disenangi dan disegani.

Setahun di perantaraan menjadi propagandis, karena dedikasinya Bambang Sugeng mendapat tawaran pekerjaan baru menjadi Klerk I Regent Temanggung, suatu jabatan yang cukup bergengsi waktu itu. Tawaran tersebut tentu saja sangat menggembirakan hatinya, karena selain mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ia pun dapat lebih dekat dengan keluarga dan kampung halamannya.

Pada tahun 1940 secara resmi Bambang Sugeng menjabat Klerk I di Temanggung. Rasa syukur kepada Tuhan ia wujudkan dengan mengerjakan tugas dan tanggungjawab jabatannya dengan lebih rajin dan penuh pengabdian. Dengan bekal pendidikan yang relatif tinggi dan pengalaman bekerja di Lampung, Bambang Sugeng menjadi abdi masyarakat yang baik dan berprestasi.

3. Membina Rumah Tangga Bahagia

Adalah hukum alam dan naluri manusia, bila seorang perjaka sudah cukup usia, atau mandiri karena sudah bekerja, ia ingin segera berumah tangga. Apalagi kalau dalam kehidupan pribadinya hati telah jatuh cinta pada seorang gadis pilihannya. Apa lagi yang harus ditunggu jika kedua belah pihak orang tua sudah merestui.

Begitulah, takdir kehidupan berlaku pada Bambang Sugeng. Sekembalinya di desa Tegalrejo dari Jakarta setelah putus kuliah di pendidikan tinggi RHS, pada usianya yang

keduapuluh tiga di tahun 1936 atas ridho Tuhan Yang Maha Pengasih, ia menikahi seorang gadis remaja pilihan hatinya bernama Sukemi. Bahtera rumah tangga dijalannya dengan bahagia, sehingga dari buah perkawinannya dengan Bambang Sugeng, Sukemi melahirkan seorang putri dan dua orang putra.

Empat tahun setelah perkawinannya lahir puteri pertama pada tahun 1940, diberi nama Endang Ruganika. Dua tahun kemudian (1942) menyusul lahir adiknya, bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Bambang Herulaskar, dan putra ketiga Bambang Purnomo dilahirkan pada tahun 1944.

Sungguh bahagia kehidupan rumah tangga yang di dalamnya dilengkapi dengan kelahiran putra-putri yang disayangnya. Namun kebahagiaan tersebut tidak lama



Jenderal Mayor Bambang Sugeng disela-sela kesibukannya memimpin Angkatan Darat masih menyempatkan diri berkumpul bersama keluarga.



Keluarga Bambang Sugeng pada waktu menjabat sebagai Duta Besar RI di Jepang.

dirasakan Bambang Sugeng, karena takdir Tuhan lebih berkuasa dalam mengatur perjalanan hidup manusia.

Hidup, mati, jodoh dan rezki adalah kuasa Tuhan. Pada tahun 1936 karena takdir Tuhan pemuda Bambang Sugeng “dipersatukan” dengan gadis Sukemi, sepuluh tahun kemudian mereka kembali dipisahkan pada tahun 1946 Nyonya Sukemi meninggal dunia karena sakit paru-paru dan dimakamkan di Desa Kranggan Temanggung.

Cukup besar ujian dan beban yang dipikul Bambang Sugeng sepeninggal isterinya selain kesibukannya sebagai Kepala Staf Divisi Komandan Resimen TKR ia harus membesarkan putra-putrinya sendirian. Syukur, ternyata tidak terlalu lama Bambang Sugeng hidup sendiri tanpa didampingi isteri. Selang beberapa bulan Bambang Sugeng dipertemukan dengan Istiyah, seorang janda karena suami meninggal, putri Wedana di Banjarnegara. Karena sudah

ada saling kecocokan pada tahun itu pula Bambang Sugeng menikahi Istiyah. Dari hasil perkawinannya dikarunia dua orang putri dan seorang putra Nyonya Istiyah dari suami sebelumnya yang telah meninggal, yakni Bambang Heryanto terlahir tahun 1946. Adapun kedua putrinya adalah Hera Tirtaningsih lahir tahun 1948 dan Safrisa Cahayani lahir tahun 1951.*

Bab 3

MEMENUHI PANGGILAN IBU PERTIWI

1. Mengabdikan Sebagai Perwira PETA

a. Masa Pendidikan Perwira PETA

Tanggal 8 Maret 1942 Jepang menduduki Indonesia dengan politik “*Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya*”. Jepang datang dengan dalih membebaskan Asia Timur Raya dari cengkeraman BEI – EI - RAN (Amerika – Inggris - Belanda) dan mendengung-dengungkan (kemerdekaan Indonesia dikemudian hari) “*Indonesia Soraino Dokuritsu*”.

Namun di saat pendudukan Jepang memasuki tahun kedua (1943) makin dirasakan bahwa kemenangan yang diharapkan sulit dicapai. Oleh sebab itu untuk menanggulangi tekanan pihak Sekutu, pada tanggal 3 Oktober 1943 dibentuk pasukan Pembela Tanah Air (PETA) oleh Letnan Jenderal Kumakici Harada, panglima tentara XVI Jepang di Indonesia melalui *Osamu Seirei* (pengumuman) No.44.

Pembentukan PETA ini sejalan dengan aspirasi bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin bangsa disaat itu agar bangsa Indonesia mahir dalam olah keprajuritan sebagai bekal perjuangan kemerdekaannya.

Untuk membentuk pasukan Peta ini, oleh militer Jepang diselenggarakan pendidikan Calon Perwira PETA di Bogor,

yang dilaksanakan 3 kelompok pendidikan Perwira PETA, yaitu :

- 1) Kelompok *Syodancho* (Komandan Peleton) dihimpun dari pemuda yang sebagian terbesar adalah pelajar sekolah lanjutan.
- 2) Kelompok *Cudancho* (Komandan Kompi) dihimpun dari Sukarelawan Pegawai Negeri (Pamong Praja) dan lain-lainnya.
- 3) Kelompok *Daidancho* (Komandan Batalyon) dihimpun dari pimpinan/tokoh masyarakat di lingkungannya dan orang-orang yang dianggap menonjol luar biasa oleh pasukan Jepang.

Pemuda Bambang Sugeng yang saat itu bekerja sebagai Klerk I (Juru Tulis) di pemerintahan Kabupaten Temanggung, bertugas melayani pendaftaran para pemuda Indonesia yang masuk dalam pendidikan militer PETA. Rupanya jiwa patriotik dan semangat tinggi yang ada dalam diri Bambang Sugeng tidak dapat dikendalikan lagi, akhirnya ia memutuskan untuk ikut masuk pendidikan militer PETA. Berbekal pengetahuannya yang luas dan kedudukannya yang menonjol Bambang Sugeng masuk dalam kelompok pendidikan *Daidancho* (Komandan Kompi).

Selama pendidikan militer PETA di *Gyugun Renseitai* Bogor, Bambang Sugeng menunjukkan minat dan perhatian yang besar. Setiap pelajaran baik pelajaran teori atau praktek / latihan dipelajari dengan tekun dan dihayati. Ia betul-betul dapat membagi waktu, waktu belajar benar-benar digunakan untuk belajar, demikian juga waktu istirahat atau libur digunakan sebagaimana mestinya. Karena ketekunan dan kerajinannya maka setiap mata pelajaran mendapat nilai yang cukup memuaskan. Setiap persoalan dalam pelajaran teori maupun praktek selalu

dapat dipecahkan, sehingga teman-temannya tidak jarang menanyakan berbagai masalah yang dianggap sukar kepadanya.

Bambang Sugeng selalu mengikuti latihan dengan penuh semangat dan keyakinan kepada diri sendiri, bahwa latihan merupakan penggemblengan jasmani dan membentuk jiwa keprajuritan yang sejati. Latihan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota PETA, guna memperoleh kemampuan melaksanakan tugas dikemudian hari. Dengan tidak mengenal lelah, ia mengikuti setiap latihan untuk mengasah ke-trampilan pribadinya di bidang kemiliteran. Hasilnya, Ia menjadi seorang anggota PETA yang trampil, cakap dan tangkas sebagai *Cudanco*.

Pelajaran-pelajaran teori yang diberikan dalam pendidikan diterimanya dengan penuh perhatian dan dipelajarinya dengan tekun. Apabila di dalam suatu pelajaran ada yang belum dipahaminya, maka ia akan menanyakannya sampai benar-benar dipahaminya.

b. Masa Dinas di PETA

Selesai pendidikan Perwira PETA di Bogor, para Perwira tersebut segera dikembalikan ke daerah masing-masing untuk menyusun pasukan PETA di daerahnya. Dalam penyusunan Daidan-daidan PETA di daerah-daerah ini Bambang Sugeng bertugas di Dai II Daidan Magelang, sebagai *Cudanco*, bersama-sama antara lain : Ahmad Yani, Sarwo Edi, Suryo Sumpeno dan Mariadi. Dari sinilah Bambang Sugeng merintis kariernya sebagai militer untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi sebagai pemuda harapan bangsa.

Dalam memimpin *Cudanco*, Bambang Sugeng bersifat membimbing dan mendidik anak buahnya. Kepada setiap anggotanya ditanamkan rasa tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas, disiplin yang kuat dan cara-cara menggunakan alat-peralatan yang ada. Latihan-latihanpun sering dilakukan guna menjaga fisik dan meningkatkan ketrampilan militer. Pemeriksaan-pemeriksaan terhadap anak buahnya sering dilakukan baik di dalam dinas maupun di luar dinas untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anggotanya. Bila ada yang melanggar peraturan yang berlaku, maka Bambang Sugeng mengambil tindakan yang tegas tanpa pandang bulu. Hal ini menimbulkan keakraban dan ia pun disegani anak buahnya. Karena ketelitian dan ketegasan di dalam memimpin, maka anak buahnya menjadi contoh bagi anggota lainnya. Karier Bambang Sugeng terus menanjak, tak lama kemudian pada tahun 1944 ia mendapat tugas untuk menjabat *Daidanco* di Gombang. Sebagai pembantunya antara lain ialah Sarbini, Suhandoyo, Bambang Wijanarko, Sudarsin, Suwito Haryoko, Suyoto, Sri Suwarno, Bintiro dan Kusen.

Tugas *Daidancho* diembannya dengan penuh tanggung jawab untuk kemajuan Batalyonnya dan untuk meningkatkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Sebagai *Daidancho* sifat-sifat kepemimpinannya dalam bidang kemiliteran semakin menonjol. Hal ini menyebabkan Bambang Sugeng menjadi salah seorang pemimpin PETA yang cukup dikenal.

2. Pengabdian Pada Masa Perang Kemerdekaan

a. Komandan Resimen TKR

Setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dalam perjanjian penyerahan tersebut, antar lain Jepang harus melucuti dan membubarkan pasukan-pasukan pribumi setempat yang telah dibentuk oleh Jepang. Sekutu nampaknya tidak ingin mengalami lagi kesulitan seperti halnya yang dihadapi Inggris dengan pasukan Aung San di Birma.

Pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, dua atau tiga hari sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI Jepang telah mendahului dengan membubarkan PETA dan HEIHO dengan menyuruh anggota-anggotanya pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, setelah menyerahkan senjata mereka kepada Jepang. Untuk melaksanakan tujuan tersebut di Daidan-daidan PETA, Jepang telah menipu PETA dengan mengatakan bahwa senjata-senjata PETA itu harus dikumpulkan karena akan diganti dengan senjata yang baru. Jepang berhasil mengelabui para anggota PETA yang pada umumnya pada saat itu belum mengetahui kalau Jepang telah kalah dan Indonesia telah merdeka.

Setelah PETA dibubarkan Jepang, seperti halnya anggota PETA lainnya Bambang Sugeng kembali ke Temanggung. Di Temanggung ia tidak berdiam diri, namun selalu mengikuti perkembangan situasi. Ia merasakan bahwa saat-saat kemerdekaan Indonesia telah tiba.

Memanfaatkan kekosongan kekuasaan (*Vacuum of Power*), atas nama bangsa Indonesia Bung Karno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lima hari kemudian, tanggal

22 Agustus 1945 keluar pengumuman dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan ini bukanlah suatu tentara, melainkan hanya merupakan suatu badan atau Korps Pejuang Bersenjata dengan tugas untuk menjaga ketentraman umum.

Bambang Sugeng, seorang pemuda yang di dalamnya mengalir darah pejuang yang cinta tanah air dan siap membela bangsa dan negara, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Bersama teman-temannya di daerah Temanggung ia membentuk BKR.

Organisasi BKR saat itu belum merupakan suatu organisasi yang *uniform* baik dalam bentuk maupun susunannya. Susunan persenjataan, kekuatan, peralatan maupun pimpinannya masih campur. Susunan organisasi campuran yang terdiri dari bermacam-macam organisasi militer seperti HEIHO, PETA, GYUGUN, KNIL serta organisasi semi militer organisasi lasykar pejuang.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Pembentukan Tentara Kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), maklumat pemerintah tersebut berisi : *“Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan Tentara Keamanan Rakyat”*.

Maklumat pemerintah tersebut ditindak lanjuti oleh Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Kasman Singodimejo SH. dengan mengeluarkan seruan Mobilisasi TKR pada tanggal 9 Oktober 1945, sebagai berikut :

“Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini oleh Presiden Republik Indonesia telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, tentara ini terdiri atas rakyat

Indonesia yang berperasaan penuh tanggungjawab atas keamanan masyarakat Indonesia dan guna menjaga kehormatan Negara Republik Indonesia”.

Pemuda dan lain-lainnya yang tegap sentosa badan dan jiwanya, bekas prajurit Hindia Belanda dan HEIHO, Kaigun-HEIHO, Barisan Pemuda, Hizbullah, Pelopor dan lain-lain baik yang sudah maupun yang belum pernah memperoleh latihan militer, supaya selekas-lekasnya mendaftarkan diri pada kantor BKR di Ibukota Kabupaten masing-masing, atau pada badan lain-lainnya yang ditunjuk oleh Residen (Kepala Daerah) atau wakilnya. Merdeka”.

Pembentukan TKR mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan masyarakat, beratus-ratus pemuda terdiri dari pelajar, pedagang, pegawai dan lain-lain berduyunduyun mendaftarkan diri, meninggalkan pekerjaannya untuk menyumbangkan jiwa raga bagi pembelaan tanah air.

Pada tanggal 20 Oktober 1945 Pemerintah RI mengangkat Supriadi (Tokoh pemberontakan Peta di Blitar) sebagai Pimpinan tertinggi TKR dan mantan Mayor KNIL Oerip Sumohardjo sebagai Kepala Staf Umum TKR. Sejak itu disusunlah Markas Besar Umum (MBU) TKR yang merupakan bagian dari Markas Tertinggi (MT) TKR.

MT-TKR meliputi 4 Komandemen, Komandemen I Jawa Barat, Komandemen II Jawa Tengah, Komandemen III Jawa Timur dan Komandemen Sumatera. Komandemen II Jawa Tengah pimpinan Jenderal Mayor Suratman membawahi empat Divisi, yaitu Divisi IV (Pekalongan, Semarang, Pati) berkedudukan di Salatiga, Divisi V (Kedu dan Banyumas) berkedudukan di Purwokerto, Divisi IX Istimewa Yogyakarta dan Divisi X Istimewa Surakarta.

Divisi V Kedu dan Banyumas di bawah pimpinan Kolonel Sudirman (kemudian digantikan Kolonel Sutirto) membawahi tujuh Resimen, antara lain Resimen Temanggung di bawah pimpinan Letnan Kolonel Bambang Sugeng.

Bambang Sugeng yang saat itu telah berhasil membentuk BKR di daerah Temanggung dan Wonosobo atas usaha dan inisiatifnya dibantu para pejuang di daerahnya, BKR kemudian dikembangkan menjadi TKR sebanyak 4 Batalyon.

- 1) Batalyon Temanggung dipimpin Mayor Suyoto.
- 2) Batalyon Parakan dipimpin Mayor Salmun.
- 3) Batalyon Wonosobo dipimpin Mayor Karyono.
- 4) Batalyon Tanjungsari dipimpin Mayor Kaslan

Setelah kekuatan diperbesar dengan pembentukan Batalyon di Wonosobo tersebut, Bambang Sugeng dipercaya menjadi Komandan Resimen dengan pangkat Letnan Kolonel.

b. Prasasti “SELOEROEH DOENIA SEKELOEARGA”

Akibat ditipu Jepang, praktis pada saat itu bangsa Indonesia tidak memiliki senjata sebagai alat perjuangan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan. Namun demikian dengan penuh semangat perjuangan para pemuda bekas PETA, HEIHO dan pemuda-pemuda militan lainnya tidak tinggal diam dan berusaha merebut senjata dari gudang-gudang tentara Jepang. Dengan terbentuknya BKR kemudian TKR sebagai wadah badan-badan perjuangan, maka perebutan senjata dari tangan Jepang semakin mantap.

Menghadapi geloranya semangat rakyat Indonesia dalam usahanya mendapatkan senjata, ada golongan tentara Jepang yang secara sukarela menyerahkan senjata-senjata-

nya, tetapi ada pula golongan tentara Jepang yang tidak mau menyerahkan senjata-senjatanya dan akan menyerahkannya kepada Sekutu. Menghadapi golongan kedua ini, tidak ada cara lain kecuali merebutnya dengan kekerasan.

Perebutan senjata dari tangan Jepang yang dilakukan secara damai dan berjalan lancar tanpa pertikaian, antara lain terjadi di Temanggung oleh pasukan Bambang Sugeng.

Setelah Kaisar Jepang memerintahkan penghentian perlawanan, meyusul penyerahan tanpa syarat tentara Jepang pada Sekutu, maka tentara Jepang diperintahkan untuk kembali ke induk pasukannya. Tetapi ada pasukan yang tidak dapat kembali ke induk pasukan, yaitu pasukan dari Migaki Butai yang berjumlah 533 orang termasuk 30 orang sipil.

Pasukan Batalyon Mayor Migaki Simatoyo tersebut sedang dalam perjalanan dari Nusa Tenggara Timur menuju Birma dan tidak bisa kembali ke induk pasukan, akhirnya tertawan oleh pasukan-pasukan tentara Indonesia pimpinan Letnan Kolonel Bambang Sugeng di kota Temanggung. Selanjutnya dilucuti dan orang-orangnya ditawan.

Tertawannya pasukan Mayor Migaki Simatoyo atau yang biasa dikenal dengan sebutan pasukan Migaki di Temanggung itu disebabkan karena waktu itu sedang berkecamuk perang melawan Jepang di Semarang yang terkenal dengan "Pertempuran Lima Hari Semarang".

Bambang Sugeng mengerti bagaimana perasaan hati tentara Jepang yang telah kalah perang. Karena itu ia mengeluarkan pengumuman yang intinya ; *"berbuat baiklah untuk membalas budi teman kepada tentara Jepang yang telah dilucuti senjatanya dan berada di daerah ini, anggaplah mereka sebagai tamu, sedapat mungkin menghormati mereka dan jangan merampas serta melakukan kekerasan kepada mereka"*

Setelah keluarnya pengumuman tersebut, rakyat Temanggung secara spontan memberikan makanan dan obat-obatan kepada tawanan Jepang tersebut, meskipun sebenarnya rakyat sendiri dalam keadaan serba kekurangan. Sikap rakyat Temanggung sebagai bangsa yang cinta damai dan tidak memperlihatkan permusuhan terhadap tentara Jepang itu disambut dan diterima dengan perasaan terharu oleh pasukan Migaki. Hal ini telah memberikan jaminan yang pasti bagi keselamatan para tawanan Jepang tersebut. Mereka berpendapat berhasilnya mereka kembali ke-negaranya dengan selamat adalah berkat kebijaksanaan Bambang Sugeng dan kemurahan hati serta sikap damai yang diperlihatkan rakyat Temanggung.

Perlucutan senjata tentara Jepang tersebut tercatat sebagai peristiwa sejarah perjuangan bangsa di daerah Temanggung yang sangat terpuji. Bambang Sugeng memperlakukan semua tawanan secara ketat tapi sangat manusiawi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konvensi Jenewa, tentang perlakuan terhadap tawanan perang.

Para serdadu Jepang yang ditawan, sama sekali tidak disiksa dan dianiaya, bahkan saat perundingan penyerahan, disertai janji perlindungan keselamatan jiwanya. Sehingga penyerahan mereka disertai pula dengan penyerahan semua perbekalan logistiknya. Dengan perbekalan logistik yang di dapat dari tawanan Jepang tersebut dapat untuk membantu perjuangan melawan Belanda yang dibantu Inggris yang saat itu telah memasuki kawasan Magelang. Juga untuk perlawanan di front Ambarawa sampai Semarang.

Oleh Letnan Kolonel Bambang Sugeng bala tentara Jepang yang di pimpin Mayor Migaki Shimatoyo ditempatkan di 3 lokasi kamp tawanan dan diberi kebebasan bergerak

dalam batas lingkup kamp. Bahkan dibekali dengan sebagian perbekalan tempurnya sendiri. Menyadari bahwa perang adalah suatu tindakan yang kejam dan menimbulkan mala petaka bagi umat manusia di dunia, maka sebagai tanda terimakasih kepada masyarakat Temanggung atas perlakuannya terhadap para tawanan Jepang tersebut, pimpinan pasukan Jepang yang ada di Temanggung itu minta izin kepada Kolonel Bambang Sugeng untuk membuat suatu



Prasasti Seloeroeh Doenia Sekeloearga (huruf Kanji Bahasa Jepang).

memoar dalam bentuk prasasti yang ditulis pada batu kali yang diambilkan dari kali Kuwas Temanggung selebar 1,5 m, tinggi 1,6 m dan tebal 50 cm bertuliskan “SE- L O E R O E H DOENIA SEKE- LOEARGA” tahun Saka 1877 berikut tulisan Kanji dalam bahasa Jepang. Kini batu prasasti tersebut ditempatkan pada lokasi Monumen Bambang Sugeng di Bukit Gumuk Godek, Kalurahan Maduresa, Desa Cekelan, Temanggung.

Di samping menawan tentara Jepang Bambang Sugeng juga menerima dan merawat bekas interniran Jepang yang terdiri dari orang tua, wanita dan anak-anak Belanda. Selain itu juga melaksanakan pengumpulan padi untuk India (India Rice) yang tengah dilanda kelaparan. Pengumpulan itu berhasil bahkan melebihi target yang ditentukan untuk daerah resimennya.

c. Bambang Sugeng Dalam Palagan Ambarawa

Peristiwa pertempuran Ambarawa, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Palagan Ambarawa terjadi antara tanggal 20 Nopember sampai dengan 15 Desember 1945, sebagai lanjutan perjuangan bangsa Indonesia menghalau tentara Sekutu yang mengundurkan diri dari kota Magelang setelah terjadi pertempuran sengit beberapa hari lamanya.

Akibat tak tahan menghadapi tekanan dan kepongkasan kesatuan-kesatuan TKR bersama Badan-badan Kelaskaran lainnya, pasukan Sekutu meninggalkan Magelang secara diam-diam pada malam hari 21 Nopember 1945 mengundurkan diri ke Ambarawa. Selain itu pengunduran Sekutu tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat pasukannya yang sejak 20 Nopember 1945 terlibat pertempuran dengan Batalyon TKR pimpinan Mayor Sumarto di Kota Ambarawa dan Bantir Sumowono.

Mengetahui pasukan Sekutu meninggalkan Magelang, pengejaran segera dilakukan oleh Batalyon Suryosumpeno, Batalyon Suwito Haryoko dan Batalyon Kusen dari Resimen Sarbini yang berkedudukan di Magelang. Ikut serta melakukan pengejaran Batalyon Suharto, Batalyon Sukandar dan Batalyon Ismullah dari Resimen Sunarwibowo Yogyakarta, juga Batalyon Imam Adrongi dari Resimen Isdiman

Purwokerto serta pasukan-pasukan lainnya dari Resimen Bambang Sugeng Temanggung, Resimen Moh Bahrin Cilacap dan lain-lain.

Akibat adanya pengejaran ini gerakan mundur pasukan Sekutu tertahan di antara Pingit - Ambarawa. Di daerah Jambu, pasukan Sekutu dihadang oleh pasukan Angkatan Muda pimpinan Sastrodihardjo dengan diperkuat oleh pasukan gabungan dari Suruh, Surakarta dan Ambarawa. Di sekitar Ngipik iring-iringan pasukan musuh yang mengundurkan diri itu mendapatkan serangan hadangan yang dilancarkan oleh pasukan dari Resimen Bambang Sugeng dan Batalyon Suryosumpeno.

Dalam Palagan Ambarawa ini pada mulanya pasukan-pasukan TKR kurang ada kerjasama dan bergerak sendiri-sendiri, sehingga kemampuan dalam Front Ambarawa ini lamban. Panglima Besar Jenderal Sudirman lalu turun tangan, memerintahkan kepada suatu rombongan yang terdiri dari Pak Gatot Subroto sebagai pimpinan, dengan anggota Mayor Abimanyu, Staf Divisi Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, Komandan resimen I Purwokerto dan Kapten Surono Ajudan Resimen I Purwokerto, untuk melakukan peninjau di sekitar front Ambarawa.

Berdasarkan hasil peninjauan di medan pertempuran, oleh Kepala Staf Umum TKR (KSU TKR) Pak Urip Sumoharjo, Pak Gatot ditetapkan sebagai Komandan front dan memegang komando teknis serta bertanggungjawab atas pasukan-pasukan dari Resimen Purwokerto dan Cilacap, Resimen Letnan Kolonel Sarbini Magelang, Resimen Letnan Kolonel Mukohar Purworejo, Resimen Letnan Kolonel Bambang Sugeng Temanggung dan Resimen Letnan Kolonel Sunarwibowo Yogyakarta.

Selanjutnya diadakan pembagian sektor serta pembagian tugas pasukan. Sektor tengah menjadi sektor pasukan-pasukan Banyumas, disebelah barat rawa Pening dan sebelah barat jalan Ambarawa-Ungaran merupakan sektor pasukan-pasukan dari Purwokerto dan Yogyakarta. Sedangkan sebelah timur Rawa Pening menjadi sektor pasukan-pasukan dari Surakarta dan Semarang.

Berdasarkan pembagian sektor tersebut dislokasi pasukan Resimen Bambang Sugeng dari Temanggung bergantian dengan pasukan dari Kedu berada di Pasekan-Jetis-Jimbaran-Begas Lor. Pos Komando di Ngipik dan pos depan di Kadipiro-Baran-Sikunir.

Tekanan pasukan-pasukan TKR semakin hari dirasakan musuh semakin berat, sehingga mereka berusaha untuk mematahkan kepungan TKR dengan mengadakan serangan-serangan kedudukan TKR, baik di darat maupun dari udara.

Bombardemen dan tembakan mitraliyur dari udara yang semakin menjadi-jadi itu, mengakibatkan gugurnya Komandan Sektor II Letnan Kolonel Isdiman, prajurit kepercayaan Kolonel Sudirman.

Tewasnya Letnan Kolonel Isdiman mengundang turun tangannya Kolonel Sudirman di medan Ambarawa, untuk secara langsung memimpin pasukan-pasukannya. Kepemimpinan Kolonel Sudirman ternyata menjadi titik balik yang menentukan jalannya pertempuran di Palagan Ambarawa. Koordinasi dan konsolidasi di antara pasukan-pasukan dan gerakan-gerakannya makin nyata, pengepungan terhadap musuh semakin teguh, penyusupan-penyusupan dalam kota makin hebat dan penghadangan lalu lintas makin rapi.

Akibat semakin beratnya tekanan pasukan-pasukan TKR, pasukan Sekutu meninggalkan benteng Banyubiru pada tanggal 5 Desember 1945, pasukan musuh tidak kuasa mempertahankannya lagi. Menyusul kemudian tanggal 9 Desember 1945 lapangan terbang Kali Banteng Semarang jatuh ketangan Republik, yang mengakibatkan putusnya bantuan udara musuh.

Jatuhnya Banyubiru dan mundurnya musuh ke Ambarawa segera tersiar ke seluruh front, maka moril pasukan perjuangan menjadi naik kembali seolah-olah tiap pasukan berlomba-lomba berusaha merebut kembali kota Ambarawa.

Akhirnya saat yang dinanti-nantikan tiba, sepuluh hari kemudian yakni tanggal 15 Desember 1945, pasukan Sekutu meninggalkan Ambarawa mengundurkan diri ke Semarang, dengan meninggalkan sejumlah obat-obatan dan perlengkapan militer. Sungguh tragis pasukan Sekutu yang jaya di medan laga perang dunia II, dikalahkan taktik "Supit Urang" pasukan-pasukan TKR di Palagan Ambarawa.

Pameo mengatakan "*Jer basuki mawa bea*", maksudnya setiap keberhasilan itu dicapai dengan ongkos, setiap perjuangan perlu pengorbanan. Palagan Ambarawa yang menghasilkan kemenangan pejuang bangsa Indonesia atas tentara Sekutu juga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya dipihak Indonesia, baik personel maupun materiil. Selain seorang Komandan Resimen I Divisi V Purwokerto Letnan Kolonel Isdiman, perlu dicatat juga gugurnya Mayor Suyoto dari Resimen Bambang Sugeng, beserta 27 orang anak buahnya.

Kompi Suyoto dari resimen Bambang Sugeng mengadakan penghadangan di jalan Raya Babadan Kabupaten Semarang terhadap tank Jepang yang datang dari Semarang akan ke Ambarawa. Pertempuran ini bersifat heroik tapi

setengah nekad, yaitu dengan menghentikan tank tersebut. Kecuali berani dan bersemangat menyala-nyala, mungkin juga terpengaruh kepercayaan jimatnya dari Kiai Subechi Parakan, Temanggung yang terkenal dengan bambu kuningnya, yang saat itu jadi mode.

Sore itu 28 Nopember 1945, Kapten Suyoto dengan pasukannya yang diperkuat barisan rakyat dari Bandungan di bawah pimpinan Taslim bergerak mendekati pos-pos Sekutu di Lemah Abang. Dini hari 29 Nopember 1945, pasukan Kapten Suyoto telah berhasil merapat ke sasaran. Pada saat gerakan pasukan mendekati tingkat penentuan, datang beberapa buah tank Jepang yang sedang bergerak dari arah Semarang menuju Ambarawa dengan disertai pasukan yang membawa perbekalan dan amunisi.

Dengan gagah berani dan penuh percaya diri pasukan Suyoto berbalik menghadang tank-tank musuh itu. Dengan bersenjata pistol Kapten Suyoto terus merangsek maju mendekati musuh, diikuti anak buahnya yang sebagian besar hanya bersenjatakan bambu runcing. Keberanian Kapten Suyoto disambut dengan tembakan-tembakan musuh yang mengenai dirinya. Darah Kapten Suyoto bersama 27 anak buahnya membasahi persada Ibu Pertiwi, mereka gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa.

Gugurnya Kapten Suyoto tidak menyurutkan semangat dan keberanian anak buah, justru meninggalkan moril dan semangat tempur pasukan. Musuh yang menghadapi semangat berani mati itu menjadi gentar, kemudian mereka mengundurkan diri.

Palagan Ambarawa menggambarkan dalam segala hal perjuangan bangsa Indonesia untuk membela dan mempertahankan kemerdekaannya masih sangat sederhana, jauh dari sempurna. Satu hal yang menjadi kekuatan bangsa

Indonesia adalah sifat perjuangan masih murni dan asli. Tak ada perbedaan antara satu dengan lainnya, semuanya mempunyai satu kebulatan; satu faham, satu tekad dan satu tindakan.

d. Kepala Staf Divisi II/Sunan Gunung Jati

Seiring dengan perkembangan organisasi tentara kebangsaan, karier militer Bambang Sugeng meningkat. Untuk memperdalam dan memperluas tugas tentara dalam arti yang lebih luas, melalui Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 tanggal 7 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat mulai 8 Januari 1946. Tidak lebih dari sebulan, dengan Penetapan Pemerintah No.4/SD tanggal 26 Januari 1946 kembali nama Tentara Keselamatan Rakyat ((TKR) diganti menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Pergantian tersebut bukan sekedar perubahan nama, tetapi juga untuk memperbaiki susunan dan bentuk ketentaraan yang lebih sempurna berdasarkan susunan militer internasional. Akhirnya mulai 3 Juni 1947 disahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan gabungan dari TRI dan laskar bersenjata.

Perjalanan panjang untuk menyempurnakan tentara kebangsaan Indonesia itu ditempuh dengan melakukan reorganisasi. Jumlah divisi di pulau Jawa yang semula berjumlah 10 divisi dikurangi menjadi 7 divisi. Dalam rangkaian reorganisasi ini Letnan Kolonel Bambang Sugeng dipromosikan sebagai Kepala Staf Divisi II / Sunan Gunung Jati.

Divisi II / Sunan Gunung Jati membawahi dua brigade, yakni Brigade Cirebon di bawah pimpinan Kolonel Susalit

bermarkas di Cirebon, dengan dua Resimen, Resimen Sapari di Cirebon dan Resimen Susman berada di Tegal. Dan Brigade Purwokerto berkedudukan di Purwokerto, yang membawahi Resimen Abimanyu di Cilacap serta Resimen Bahrun Purwokerto.

Pada tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda melancarkan agresi militernya ke seluruh wilayah RI, untuk menduduki seluruh Jawa Barat, perluasan daerah-daerah yang telah diduduki di kota-kota besar di Jawa serta pendudukan daerah perkebunan dan minyak di Sumatera. Dalam serbuannya ke Jawa Tengah gerakan militer Belanda dilancarkan secara serentak menggunakan Divisi B berkekuatan dua brigade, yaitu Brigade T dan W.

Untuk menghadapi agresi militer Belanda tersebut, Divisi II / Sunan Gunung Jati telah mempersiapkan pertahanannya. Dalam tahap rencana semula pertahanan diarahkan ke barat ke kompleks Gunung Slamet dan Baturaden, karena diperkirakan Belanda akan masuk dari Jawa Barat melalui Majenang-Bumiayu. Untuk menghadapi kemungkinan pendaratan pasukan Belanda di Cilacap, ditempatkan baterai-baterai Artileri.

Usaha pendaratan Belanda di pantai Cilacap gagal, oleh karena itu Belanda menyerang pertahanan RI melalui jalan pedalaman Slawi-Bumijawa-Pulosari-Belik-Bobotsari, Purbolinggo – Banyumas terus ke Purwokerto. Sedangkan di pantai utara (Pantura) Belanda bergerak dari arah Bandung menduduki Cirebon, menuju ke timur ke Brebes. Dari Brebes sebagian pasukan bergerak ke jurusan Banyumas; sebagian lainnya maju menuju Tegal.

Staf Divisi Gunung Jati sudah memperkirakan, bahwa suatu ketika Belanda berhasil menduduki Purwokerto. Sebelum Belanda menduduki Purwokerto, Staf berhasil

memindahkan markasnya ke Banjarnegara. Dari kota Banjarnegara inilah perlawanan-perlawanan gerilya dilancarkan, di susun garis pertahanan RI untuk meneruskan perlawanan terhadap Belanda.

Secara berangsur telah datang di Banjarnegara Staf Resimen 16 dengan pimpinan Letnan Kolonel Moh Bahrum. Juga Staf Divisi II/Sunan Gunung Jati dengan Panglimanya Kolonel Gatot Subroto dan Kepala Staf Letnan Kolonel Bambang Sugeng yang kemudian secara langsung memimpin pertahanan melawan Belanda.

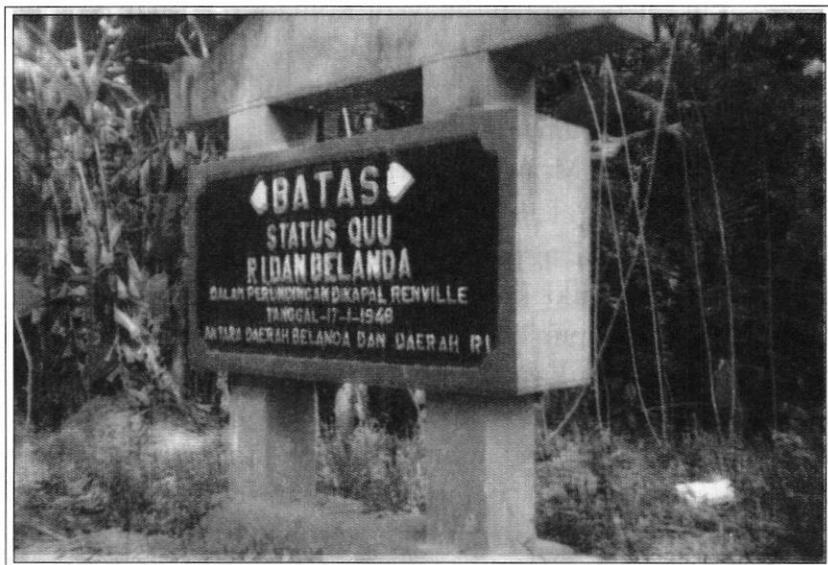
Pertahanan Divisi II Sunan Gunung Jati terutama dipusatkan di sekitar Cilacap, Purwokerto, Purbolinggo, Brebes dan Tegal yang disusun menjadi beberapa Sektor.

- 1) Sektor I, Gintung dibawah Komando Mayor Broto Sewoyo.
- 2) Sektor II, Serayu dibawah Komando Letnan Kolonel Sapari.
- 3) Sektor III, Tulis dibawah Komando Letnan Kolonel Moh Bahrum, dan
- 4) Sektor IV, Mrawu dibawah Komando Letnan Kolonel Susman.

Pada awalnya agresi militer Belanda yang pertama berhasil menduduki kota-kota yang menjadi sasarannya, baik di Jawa maupun di Sumatera. Namun TNI kemudian berhasil menemukan kembali jati dirinya, menyusun kantong-kantong gerilya di sekitar kota-kota kedudukannya, sehingga berhasil mematahkan dan membuntukan gerakan agresi militer Belanda, bahkan TNI dapat makin meningkatkan gerakan-gerakan gerilya di daerah-daerah pendudukan Belanda. Menghadapi *intensitas* perlawanan TNI, mendorong pihak Belanda kembali ke meja perundingan.

Maka atas desakan Dewan Keamanan PBB dan dengan bantuan “Komisi Jasa-jasa Baik”, dibuka kembali perundingan Indonesia-Belanda di atas Kapal “Renville” yang kemudian melahirkan “*Persetujuan Renville*” yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Salah satu keputusannya yang utama adalah penarikan satuan-satuan TNI dari kantong-kantong gerilya masing-masing ke seberang “*Garis Van Mook*”.

Dalam persetujuan Renville tersebut ditetapkan pasukan masing-masing pihak (Republik Indonesia dan Belanda) secara serentak tinggal tetap (*stand fost*) di sepanjang daerah-daerah diantara garis “*Status Quo*”. Untuk sementara waktu terlebih dahulu dibentuk daerah-daerah yang akan dikosongkan oleh tentara (*Militerized Zone*), sesuai dengan garis status quo yang disepakati.



Tetenger (tanda) batas garis Status Quo daerah tentara RI dan Belanda di daerah Kedu Banyumas setelah Persetujuan Renville di tanda tangani tanggal 17 Januari 1948.

Dalam perundingan mengenai penentuan batas garis demarkasi tersebut, Bambang Sugeng mendapat kepercayaan untuk memimpin delegasi militer Indonesia di front Banyumas-Kedu. Perundingan dengan Belanda tersebut dilangsungkan di Kemit. Hal ini disebabkan karena serangan militer Belanda waktu itu tertahan di daerah tersebut.

Delegasi militer yang dipimpin oleh Bambang Sugeng tersebut terdiri dari 7 anggota yaitu : Letkol Kun Kamdani, Mayor Rakhmat, Mayor Panuju, Kapten Subiyandino, Kapten Surono, Letnan Kusman dan Letnan Suyoto. Dalam delegasi itu terdapat pula pembesar sipil antara lain Bupati Banyumas dan Bupati Kebumen.

Bagi Kolonel Bambang Sugeng kota Banjarnegara yang menjadi Markas Komando dalam perang Kemerdekaan I menghadapi agresi Belanda, meninggalkan kenangan indah yang tak terlupakan sepanjang hayatnya.

Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Bambang Sugeng beda jabatan tetapi sama dalam hal status yang satu Panglima Divisi, satunya lagi Kepala Staf Divisi, tapi keduanya sama-sama menduda. Pak Gatot Subroto menikahi putri desa Bantarwaru Banjarnegara, sedangkan Pak Bambang Sugeng mempersunting Istiyah putri asisten Wedana Kepil di Banjarnegara, sebagai isterinya.

Satu hal yang selalu melekat dalam ingatan Kolonel Bambang Sugeng, terhindar dari maut akibat serangan udara pasukan Belanda. Pagi itu 4 Nopember 1947 jam menunjukkan pukul 07.00, selagi orang ramai pergi ke pasar, para anggota tentara dari staf resimen, staf brigade dan staf divisi tengah berkumpul di kota Banjarnegara, sedangkan kesatuan-kesatuan lainnya sedang mempersiapkan diri untuk melakukan tugas hari itu, mendadak mendapat serangan Belanda. Pesawat musuh yang kemudian dari 2 bomber dan

5 mustang berputar-putar di atas kota menjatuhkan bom dan menghujani tembakan 12,7. Akibat serangan udara musuh tersebut banyak jatuh korban dipihak RI. Namun Kolonel Bambang Sugeng yang saat itu sedang menyampaikan pengarahan kepala Staf Divisi II Sunan Gunung Jati dirumah mertuanyan Jl. Clincing (sekarang Jl. Busyaeri) No. 2 luput dari tembakan dan selamat.

e. Batal Sebagai Panglima Divisi I

Ketika perundingan antara RI dan Belanda tengah berlangsung di atas Kapal Renville, pada tanggal 20 Desember 1945 KNIP menerima mosi Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang. Setelah mosi RERA diterima oleh KNIP, Pemerintah menyiapkan rancangan susunan Kementrian Pertahanan dan pucuk pimpinan Angkatan Perang.

Terdapat dua pokok pikiran dalam rancangan undang-undang tersebut.

Pertama, organisasi dan kekuatan TNI harus diperkecil dan disederhanakan supaya lebih efisien dan efektif sesuai dengan keadaan dan posisi RI pada masa itu.

Kedua, dalam Negara Indonesia Serikat (NIS) yang akan dibentuk, TNI harus "bersaing" dengan perwira-perwira yang diwariskan oleh Belanda. Karena itu Angkatan Perang RI (APRI) harus menyiapkan tokoh-tokoh pimpinan yang dianggap representatif, terutama dalam hal kecakapan teknis.

Pada tanggal 6 Maret 1948, Pemerintah RI mengumumkan Undang-undang No.3 Tahun 1948 tentang Organisasi Keamanan Pertahanan dan Angkatan Perang. Untuk pelaksanaan undang-undang tersebut dikeluarkan Pene-

tapan Presiden tahun 1948 No.14, yang antara lain berisi, bahwa sejak 15 Mei 1948 susunan Kementrian Pertahanan terdiri atas staf-staf dan bagian-bagian seperti yang termasuk dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1948. Kesatuan mobil dan teritorial tersusun dalam Komando Jawa dan Komando Sumatera, terdiri atas divisi dan Sub teritorial. Penetapan Presiden No.14 juga menugasi para panglima kesatuan-kesatuan mobil dan teritorial segera menyelesaikan Rekontruksi dan Rasionalisasi. Paling lambat tanggal 1 Juni 1948 laporan harus sudah diterima Menteri Pertahanan. Sebagai pedoman umum, untuk pangkat-pangkat yang tidak mempunyai kepastian "Acting Rank", diturunkan satu tingkat dengan mengingat faktor-faktor lainnya.

Sesuai penetapan Presiden No.14 Bambang Sugeng yang semula menjabat Kepala Staf Divisi II / Sunan Gunung Jati, dipromosikan menjadi Panglima Divisi I dengan pangkat Kolonel, daerahnya meliputi Kedu, Yogyakarta dan sebagian Banyumas. Upacara serah terima jabatan dari panglima Divisi lama (Divisi II dan III) kepada Panglima Divisi I (baru) dilaksanakan di Markas Divisi Magelang.

Sesuai dengan penyusunan Divisi yang baru tersebut, maka satuan TNI di daerah Yogyakarta yakni Resimen 22, masuk ke dalam Divisi I, Kolonel Bambang Sugeng dengan susunan brigadenya sebagai berikut :

- 1) Brigade I : dipimpin oleh Letkol Sapari
kemudian diganti
Letkol M. Bachrum.
- Batalyon 1 : Mayor Brotosewojo, kemudian
diganti dengan Mayor Hartojo.
- Batalyon 2 : Mayor Brotosiswojo.
- Batalyon 3 : Mayor Soerono.
- Batalyon 4 : Mayor Wongso Atmojo.

- 2) Brigade II : Pimpinan Letkol Pranoto
 - Batalyon 1 : Mayor A. Yani
 - Batalyon 2 : Mayor Soerjo Sumpeno
 - Batalyon 3 : Mayor Darjatmo
 - Batalyon 4 : Mayor Panoedjoe
- 3) Batalyon III : Pimpinan Letkol Soeharto
 - Batalyon 1 : Mayor Sardjono
 - Batalyon 2 : Mayor Soedarmo
 - Batalyon 3 : Mayor Sroehardjo
 - Batalyon 4 : Mayor Soedoyo
- 4) Brigade IV : Letkol Martono
 - Batalyon 1 : Mayor Sregiri
 - Batalyon 2 : Mayor Mahmoed
 - Batalyon 3 : Mayor Moh. Anas

Di samping kesatuan mobil tersebut, di wilayah Komando Divisi I terdapat kesatuan teritorial yang meliputi :

- 1) STC (Sub Territorial Comando) Banyumas :
Dipimpin oleh Mayor Koen Kamdani.
- 2) STC (Sub Territorial Comando) Pekalongan : Mayor
Brotosewojo.
- 3) STC (Sub Territorial Comando) Kedu : Letkol M.
Sarbini.
- 4) STC (Sub Territorial Comando) Yogyakarta : Letkol
Selo Ali.

Rencana rasionalisasi dan reorganisasi ternyata tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Hambatan terjadi di Divisi VI (lama) serta pada pucuk pimpinan di pusat. Untuk mengatasi berbagai kesulitan, Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman mengeluarkan keputusan; pembentukan divisi-divisi baru dibatalkan. Divisi-divisi lama diteruskan

dengan nama komando pertempuran, dipimpin panglima-panglima lama.

f. Panglima Divisi III/Jawa Tengah

Untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Beberapa kali dilakukan perundingan politik namun menemui jalan buntu, sementara itu Belanda justru meningkatkan kegiatan militernya yang cenderung mengulangi agresi militernya.

Untuk menghadapi segala kemungkinan, utamanya untuk menghadapi agresi militer II Belanda, Panglima Besar Angkatan Perang RI menyiapkan Panglima Tentara Teritorium Jawa (PTTD) dan Panglima Tentara Teritorium Sumatera (PTTS), masing-masing sebagai panglima pertempuran di Jawa dan di Sumatera.

PTTD dan PTTS dalam kegiatannya biasa mempergunakan istilah Panglima Komando Jawa dan Panglima Komando Sumatera, masing-masing bermarkas pada Markas Besar Komando Jawa (MBKD) dan Markas Besar Komando Sumatera (MBKS). Panglima Komando Jawa adalah Kolonel A.H Nasution, sedangkan Panglima Komando Sumatera dipercayakan kepada Kolonel Hidayat.

MBKD yang mengemban tugas pokok mengadakan konsolidasi dan mengatur siasat untuk menghadapi agresi Belanda yang akan datang sewaktu-waktu, membawahi 4 divisi dan 3 daerah militer istimewa, yaitu ; Divisi I/Jawa Timur, Divisi II/Jawa Tengah bagian Timur, Divisi III/Jawa Tengah Bagian Barat dan Divisi IV/Siliwangi. Ada pun 3 daerah militer istimewa tersebut ialah :

- 1) Daerah militer istimewa pertama, meliputi daerah Surabaya, Malang dan Kediri.
- 2) Daerah militer istimewa kedua, meliputi daerah Solo, Semarang, Pati, Bojonegoro dan Madiun.
- 3) Daerah militer istimewa ketiga, meliputi daerah Kedu, Banyumas, Pekalongan dan Yogyakarta.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing Panglima Divisi merangkap sebagai Gubernur Militer, kecuali Panglima Divisi IV/Siliwangi.

Kolonel Bambang Sugeng sesuai instruksi Panglima MBKD tanggal 28 Desember 1948 diangkat menjadi Panglima Divisi III/Jawa Tengah bagian Barat Divisi III pimpinan Kolonel Bambang Sugeng ini terdiri dari 3 brigade dan 4 Subteritorium.

- 1) Brigade 8 dibawah pimpinan Letkol M. Bahrum.
- 2) Brigade 9 dibawah pimpinan Mayor Ahmad Yani
- 3) Brigade 10 dibawah pimpinan Letkol Soeharto.
- 4) Sub Teritorium Banyumas pimpinan Mayor Koen Kamdani.
- 5) Sub Teritorium Pekalongan pimpinan Mayor Brotosewojo.
- 6) Sub Teritorium Kedu pimpinan Letkol Sarbini.
- 7) Sub Teritorium Yogyakarta pimpinan Letkol Soehoed.

Seperti telah diduga sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer ke dua dengan sasaran pokok ke Jawa Tengah khususnya ibukota Republik Yogyakarta, dengan tujuan sesegera mungkin menghancurkan pusat kekuatan TNI dan menawan pimpinan pemerintah RI.

Sesuai rencana sebelumnya yang tertuang dalam Perintah Siasat No.1 Tahun 1948, melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI), Panglima Besar Sudirman memerintahkan seluruh Angkatan Perang menjalankan rencana melaksanakan Perang Rakyat Semesta (Perata), dengan mengikutsertakan rakyat secara aktif dan mengerahkan semua tenaga dan harta kekayaan rakyat.

Strategi pertahanan diubah yang semula sistem Linier diganti dengan sistem Wehrkreise, dilengkapi dengan taktik perang gerilya.

Untuk menghadapi serangan Belanda tersebut, sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh pimpinan Angkatan Perang waktu itu, maka di Jawa Tengah yang menjadi tanggungjawab Divisi III dibentuk Wehrkreise-wehrkreise guna melakukan perlawanan secara gerilya.

Daerah-daerah Wehrkreise Divisi III yang menjadi tanggung jawab Kolonel Bambang Sugeng meliputi 3 daerah Wehrkreise, yaitu :

- 1) Wehrkreise I di bawah pimpinan Letkol Moh. Bahrum mengendalikan daerah-daerah Banyumas, Pekalongan dan Wonosobo dengan Pos Komando (Posko) di desa Makam (sebelah Utara Purbolinggo, terdiri dari 4 Sub Wehrkreise (SWKS) dan 1 Korp Armada.
- 2) Wehrkreise II dibawah pimpinan Letkol Sarbini meliputi daerah Kedu (minus Wonosobo) ditambah Kabupaten Kendal (mulai dari Semarang) dengan Posko di Bruno (sebelah utara Purworejo), terdiri dari 7 SWKS

- 3) Wehrkreise III di bawah pimpinan Letkol Suharto, meliputi daerah Yogyakarta, dengan Posko di daerah pegunungan Selatan Yogyakarta, terdiri dari 6 SWKS.

Di daerah Wehrkreise-wehrkreise itulah, serangan terhadap Belanda dilancarkan oleh pasukan Divisi III secara teratur di bawah Komando Panglima Divisi Kolonel Bambang Sugeng, sesuai doktrin perang wilayah Perintah Siasat dari pimpinan MBKD.

Setelah berhasil menduduki Ibukota Republik Yogyakarta dan menawan para pimpinan pemerintahan RI Belanda berkampanye kepada dunia internasional, bahwa TNI telah dapat dihancurkan dan pemerintahan Republik Indonesia sudah tiada lagi.

Menyikapi propaganda Belanda tersebut, Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III yang bertanggung jawab atas daerah Yogyakarta mempunyai perasaan dan pemikiran, bahwa Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia sebagai lambang eksistensi bangsa dan Negara RI harus direbut dengan senjata. Menurut Bambang Sugeng Yogyakarta harus diserang secara besar-besaran, dengan demikian akan menjadi jelas bagi sejarah bahwa sekalipun Yogyakarta ditinggalkan oleh Belanda kelak, namun kita tidak menerima kota Yogya sebagai hadiah. Paling tidak, menurut Bambang Sugeng, bangsa Indonesia harus membuktikan kepada dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia masih mempunyai kekuatan untuk menjadikan kedudukan Belanda di Yogyakarta tidak tertahan. Setidak-tidaknya ada 3 alasan mengapa Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng menetapkan Yogyakarta sebagai sasaran serangan :

- 1) Yogyakarta adalah ibukota Republik Indonesia, sehingga bila dapat “direbut” walau hanya beberapa jam, akan sangat berpengaruh besar.
- 2) Di Yogyakarta, tepatnya di Hotel Merdeka, banyak wartawan asing dan juga masih ada anggota delegasi Komisi Tiga Negara (KTN) dari PBB.
- 3) Yogyakarta langsung dibawah wilayah Divisi III/ Gubernur Militer IV sehingga tidak perlu persetujuan Panglima/Gubernur Militer lain dan semua pasukan memahami dan mengausai situasi daerah operasi.

Guna mewujudkan keinginannya tersebut Kolonel Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi III, melalui Perintah Siasat Nomor : 4/S/Cop I tanggal 1 Januari 1949 memerintahkan Letkol Moh. Bahrum Komandan Wehrkreise I, Letkol Sarbini Komandan Wehrkreise II, dan Letkol Suharto Komandan Wehrkreise III, untuk segera mengadakan perlawanan serentak terhadap Belanda pada tanggal 17 Januari 1949, agar timbul suasana pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda, yang dapat perhatian dunia luar, untuk menyatakan kebohongan keterangan-keterangan Belanda. Bambang Sugeng mengeluarkan “*Counter Issue*” melawan propaganda Belanda, yang mengatakan seolah-olah perjuangan RI sudah lumpuh.

Kepada Komandan Daerah III Letkol Suharto, Kolonel Bambang Sugeng pada tanggal 18 Pebruari 1949 di daerah Panjatan Yogyakarta memerintahkan secara langsung untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibukota antara tanggal 25 Pebruari 1949 s.d 1 Maret 1949, dengan menggunakan bantuan pasukan dari Brigade 9 Ahmad Yani.



Monumen Pejuang Perang Gerilya.

Perintah kepada Komandan Daerah itu diikuti instruksi rahasia kepada Komandan Daerah I untuk pada waktu yang bersamaan (tanggal 25 Pebruari 1949 s.d 1 Maret 1949) mengadakan serangan-serangan serentak terhadap salah satu obyek musuh dan mencegah bala bantuan masuk Yogyakarta. Selanjutnya disusunlah rencana serangan umum secara serentak ke kota Yogyakarta yang akan dilancarkan pada siang hari. Berkat kerjasama yang erat antara Komandan Wehrkreise III dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menghasilkan karya juang gemilang yang mengokohkan semangat perjuangan. Setelah mengadakan berbagai pertimbangan, perencanaan dan persiapan yang masak antara Sri Sultan HB IX dengan Letkol Suharto dan dengan Komandan-komandan Wehrkreise lainnya, akhirnya terjadilah Serangan Umum

pada tanggal 1 Maret 1949. Peristiwa inilah yang terkenal dengan nama “Serangan Umum 1 Maret”.

Walaupun pasukan TNI hanya menduduki Yogyakarta selama 6 jam dalam serangan umum itu, namun dari segi politik serangan umum itu sangat penting, karena berhasil mempengaruhi jalannya perdebatan Dewan Keamanan PBB. Selain serangan tersebut disiarkan di radio, juga diberitakan oleh tiga Perwira Komisi PBB yang ketika itu kebetulan berada di Yogya.

Dalam perjuangan gerilya selanjutnya tidak henti-hentinya pemerintah RI menyerukan kepada masyarakat yang waktu itu terdiri dari macam-macam aliran dan golongan, supaya tetap bersatu dalam hal ini Gubernur Militer III yang juga Panglima Divisi III Kolonel Bambang



Bambang Sugeng mengendalikan TNI masuk Yogyakarta 1949.

Sugeng mengeluarkan pengumuman Nomor : 07/Div III / 49 tanggal 30 Juli 1949 tentang penggalangan persatuan. Bahwa kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama melenyapkan bahaya kolonial imperialisme dari tanah air Indonesia. Semua golongan harus bersatu. Kekuatan RI adalah dalam perang total yang mewajibkan semua golongan ikut serta di bawah satu komando.

Sebagai hasil dari perjuangan gerilya ini, daerah kota Yogyakarta dapat diterima kembali dari Belanda. Untuk mengurus daerah-daerah yang telah dikembalikan oleh Belanda, maka timbullah kesibukan-kesibukan RI untuk menyusun pemerintahan serta pejabat-pejabatnya. Kolonel Bambang Sugeng selaku Panglima Divisi III/Gubernur Militer III membuat surat kepada Presiden para Menteri, Pangsar APRI, PTTD, dan semua Jawatan tentang situasi kesibukan sehari-hari serta saran-saran yang seyogyanya mendapat perhatian khusus.

Saran-saran itu antara lain :

- 1) Semenjak Agresi Belanda yang kedua ini terjadi maka pemerintahan yang terselenggara adalah pemerintahan militer, yang terus menerus diadakan perbaikan baik mengenai formasi, organisasi maupun tekniknya.
- 2) Dengan perubahan suasana yang mengakibatkan kesempatan antara lain untuk konsolidasi dan stabilisasi kembali pemerintah pusat, dengan demikian di kota Yogya tampak kesibukan usaha membangun kembali Kementrian-kementrian dan Jawatan-jawatan.
- 3) Dalam keadaan sibuk, hendaknya oleh yang bersangkutan (Kementrian dan Jawatan) selalu diingat-

kan, bahwa masih tetap adanya pemerintahan militer dan tetap berlaku peraturan-peraturannya.

- 4) Kenyataan-kenyataan telah tampak, bahwa kesibukan membangun di Yogya seolah-olah melupakan masih tetap adanya pemerintah militer, sehingga timbul tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan organisasi pemerintah militer yang sedang berjalan, bahkan ada kalanya bertentangan dan mengakibatkan stagnasi jalannya roda pemerintahan.
- 5) Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan hubungan langsung mengenai organisasi dan personalia kepada instansi bawahannya, tanpa melalui saluran hirarchis organisasi pemerintahan militer yang mana mengakibatkan akan rusaknya sifat pimpinan dan disiplin pemerintah militer.
- 6) Selain diperlukan adanya perhatian khusus, sangat diharapkan adanya usaha untuk memperkuat organisasi pemerintah militer di daerah luar Yogya, mengingat akan munculnya kesulitan-kesulitan di daerah akibat adanya *cease fire* (gencatan senjata).

Saran-saran Bambang Sugeng ini menunjukkan kecintaannya kepada bangsa dan negara serta komitmennya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.

3. Meniti Puncak Karier

a. Panglima Tentara Teritorium Jawa Timur

Konferensi Meja Bundar (KMB) di kota Den Haag (Nederland) mengakhiri sengketa bersenjata antara Indonesia dan Belanda, yang disusul dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal

27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani piagam Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) di ibukota Amsterdam Nederland. Pada waktu yang sama di Jakarta bertempat di Istana yang sekarang disebut Istana Merdeka diadakan suatu upacara pemindahan kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), yang pada upacara itu diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di halaman Istana itu bendera Belanda diturunkan dan naiklah Sang Saka Merah Putih untuk berkibar di alam merdeka. Sedang di kota Yogyakarta pada tanggal itu juga diadakan upacara pemasukan Republik Indonesia ke dalam RIS yang tidak sampai setahun umurnya.

Pada waktu pengakuan kedaulatan se usai perang kemerdekaan, Kolonel Bambang Sugeng diangkat sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta. Jabatan Kepala Staf Umum Angkatan Darat tidak lama dipegang Kolonel Bambang Sugeng, karena pada bulan Juni 1950 ia diangkat sebagai Panglima Divisi I yang kemudian menjadi Tentara dan Teritorium (TT) V/ Jawa Timur, di Malang. Tugas utama Panglima TT V mengamankan daerah Jawa Timur dari anarkisme kekacauan sesudah pengakuan kedaulatan RI.

Pada awal masa jabatannya di Jawa Timur Bambang Sugeng menghadapi masalah gangguan keamanan di daerah Bangil, Pandaan dan sekitarnya yang dikenal sebagai gerombolan Malik. Penumpasan gerombolan Malik cukup sulit diatur, karena mereka menggunakan taktik gerilya dengan menciptakan "*Angst-psychose*" yaitu rasa takut masyarakat untuk melaporkan keberadaan gerombolan di daerahnya. Beberapa Batalyon pernah ditugaskan sebelumnya, tetapi tidak juga berhasil.

Untuk menumpas gerombolan Malik yang meresahkan masyarakat ini, Kolonel Bambang Sugeng memanggil Komandan Batalyon 30 Brigade IV Kapten Sumitro (jabatan terakhir Pangkoptamtib dengan Pangkat Jenderal TNI). Ke markas Divisi I Jalan Suropati Malang.

Kepada Kapten Sumitro dengan lugas Kolonel Bambang Sugeng menyatakan : *“Kalau diserahi tugas untuk mengamankan daerah Bangil, Pasuruan, Pandaan dan sekitarnya yang berbatasan dengan Mojokerto, Mojosari dan Sidoarjo, berapa lama waktu yang dibutuhkan”*.

Dengan tidak kalah tegasnya Komandan Batalyon 30 Kapten Sumitro menjawab : *“6 bulan, pak”* atas dasar jawaban tersebut Batalyon 30 ditugasi menyelesaikan gangguan keamanan gerombolan Malik dalam waktu 6 bulan.

Begitulah gaya kepemimpinan Bambang Sugeng, dalam memberi tugas kepada bawahannya selalu disertai dengan jadual waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas. Dan inilah salah satu kepemimpinan yang dibutuhkan supaya bawahan yang menerima tugas ada dorongan untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai jadual yang telah ditentukan. Dengan demikian bawahan akan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diembannya.

Sesuai kesanggupannya dalam waktu yang relative singkat gerombolan Malik di Bangil, Pasuruan, Pandaan dan sekitarnya dapat ditumpas oleh Batalyon 30, dengan menggunakan prinsip operasi anti gerilya yaitu persaingan merebut hati rakyat dengan gerombolan.

Masa kepemimpinan Kolonel Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi I Jawa Timur periode 1950-1952 juga diwarnai dengan pergantian nama Divisi. Pada hari ulang

tahun Divisi I / Jawa Timur yang ke 3, tanggal 17 Desember 1951, nama Divisi I Jawa Timur diganti menjadi Divisi I / Brawijaya.

Penggantian nama tersebut ditandai dengan parade pasukan secara besar-besaran di seluruh wilayah Jawa Timur, dilengkapi dengan manuver latihan perang-perangan yang menampilkan para prajurit yang heroik profesional.

Divisi Brawijaya memiliki sesanti yang tertulis dalam panji-panjinya yang bergambar candi Penataran disertai bintang Pancasila di atasnya "*Bhirawa Anoraga*". Artinya



Bambang Sugeng melaporkan kepada KSAD AH. Nasution setelah pergantian Panglima Brawijaya.

“Suatu kekuatan dan ketangkasan yang tidak diperlihatkan”.

Menjelang akhir jabatannya sebagai Panglima “Brawijaya” karena kesehatannya, Kolonel Bambang Sugeng seringkali tidak aktif. Ia mengambil cuti karena sakit, tugas-tugas hariannya diselesaikan oleh Kepala Staf Letnan Kolonel dr. Suwondo. Pada saat-saat seperti itulah terjadi peristiwa pendaulatan Panglima Teritorium V Brawijaya sebagai akibat dari peristiwa 17 Oktober 1952.

Dua hari setelah kejadian peristiwa 17 Oktober 1952 di Jakarta, datanglah 3 orang Perwira Menengah Angkatan Darat berpangkat Kolonel, teman dan bekas anak buah Kolonel Bambang Sugeng.

Mereka adalah Kolonel Bambang Sumpeno, Kolonel Suhud dan Kolonel Sapari, menghadap Bambang Sugeng yang sedang dalam keadaan istirahat karena sakit. Ketiga Kolonel itu menjelaskan keterlibatan Letnan Kolonel dr Suwondo penjabat Panglima Teritorium V Brawijaya yang ikut mengambil bagian dalam Peristiwa 17 Oktober 1952.

Setelah menerima penjelasan itu, segera Kolonel Bambang Sugeng mengambil sikap.

Pertama ; Mengambil alih pimpinan Panglima Teritorium V Brawijaya dan melaporkannya ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1952. **Kedua** ; Membuat pidato radio.

Setelah itu, Kolonel Bambang Sugeng memanggil Letkol dr . Suwondo yang berada di Malang dan belum lama datang dari Jakarta untuk datang ke Surabaya memberikan penjelasan tentang kejadian dan keterlibatannya dalam Peristiwa 17 Oktober 1952. Letkol dr. Suwondo datang ke Surabaya, tetapi bukannya memenuhi panggilan Kolonel Bambang Sugeng, justru ia datang ke Surabaya untuk

membatalkan pidato radio yang sudah disiapkan Kolonel Bambang Sugeng dan digantinya dengan Perintah Harian yang disiarkannya melalui RRI Surabaya. Tentu saja hal itu memicu timbulnya konflik antara Kolonel Bambang Sugeng dengan Letkol dr. Suwondo.

Tidak bisa dihindari konflik di antara keduanya melebar, yang berakibat pada sikap saling curiga mencurigai di antara kedua pimpinan Teritorium Brawijaya itu di seputar kedudukan masing-masing terkait dengan Peristiwa 17 Oktober yang baru lalu.

Dalam pidato radio yang telah disiapkan tetapi belum sempat disiarkan Kolonel Bambang Sugeng antara lain menuntut tiga hal :

- Pertama : Menanti pidato Persiden RI
- Kedua : Membebaskan Presiden dari kungkungan para Perwira
- Ketiga : Menuntut secara yuridis kepada para Perwira yang menggerakkan demonstrasi

Sedangkan Perintah Harian Letkol dr. Suwondo tertanggal 21 Oktober 1952 bertujuan mengadakan tindakan pengamanan ke dalam, dengan rencana mengadakan penangkapan terhadap mereka yang condong kepada kaum partai, antara lain terhadap tiga orang Kolonel yang telah menghadap Kolonel Bambang Sugeng. Bahkan bila perlu penangkapan atas Kolonel Bambang Sugeng.

Rencana yang telah disiapkan Letkol dr. Suwondo tersebut gagal dilaksanakan karena kedatangan Letkol Abimanyu dari PMT Surabaya, yang meminta agar rencana penangkapan-penangkapan itu tidak dilaksanakan.

Di tengah situasi yang tidak kondusif tersebut, datang utusan Kepala Staf Angkatan Darat, Letkol Suprpto dan

Letkol S. Parman yang mendapat mandat untuk mengetahui keadaan Teritorium V/Brawijaya dari dekat serta melaporkan hasilnya kepada KSAD di Jakarta.

Setelah menghadap Kolonel Bambang Sugeng (Letkol Suprpto dan Letkol S. Parman oleh KSAD tidak diijinkan mengadakan hubungan dengan pejabat-pejabat di Surabaya, kecuali Kolonel Bambang Sugeng dan Letkol Sudirman) dan melihat kenyataan bahwa masalah di Teritorium V cukup rawan, maka atas nama KSAD kedua utusan itu memutuskan pergantian Panglima Teritorium V/Brawijaya Letkol dr. Suwondo diberhentikan dari jabatannya, dan sebagai penggantinya diangkat Letkol Sudirman. Setelah itu utusan KSAD kembali ke Jakarta melapor kepada KSAD, bahwa keadaan Teritorium V/Brawijaya cukup genting akibat tersiarnya berita yang tidak proporsional tentang Peristiwa 17 Oktober 1952.

Tindakan penggantian Panglima Teritorium V/Brawijaya tersebut dibenarkan oleh Menteri Pertahanan dengan mengesahkan Letnan Kolonel Sudirman sebagai pejabat Panglima Teritorium V/Brawijaya.

Dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab keamanan Teritorium V/Brawijaya tanggal 22 Oktober 1952 Letkol Sudirman mencabut Perintah Harian pejabat panglima Letkol dr. Suwondo yang dikeluarkan sehari sebelumnya.

b. Kepala Staf Angkatan Darat ke Tiga

Usaha pemerintah dalam mengatasi ketegangan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat akibat Peristiwa 17 Oktober 1952, menuju penyelesaian secara integral, ditempuh antara lain dengan cara memutuskan mem-

bebaskan dari fungsinya beberapa Perwira Angkatan Darat, termasuk di dalamnya pembebasan Kolonel A.H. Nasution dari jabatannya sebagai KSAD pada tanggal 5 Desember 1952, yang dilakukan berdasarkan nota Kolonel A.H. Nasution tertanggal 4 Nopember 1952 berisi permohonan berhenti dari jabatan KSAD.

Sebagai pengganti Kolonel A.H. Nasution, pada tanggal 22 Desember 1952 pemerintah mengangkat Kolonel Bambang Sugeng sebagai pejabat KSAD. Pengangkatan Kolonel Bambang Sugeng menjadi tumpuan harapan bagi pemerintah



Pelantikan Kolonel Bambang Sugeng sebagai KSAD.

dan juga Angkatan Darat serta masyarakat, bahwa pejabat KSAD yang baru itu dapat menyelesaikan ketegangan-ketegangan yang merebak di lingkungan Angkatan Darat pasca peristiwa 17 Oktober 1952. Selain itu tidak bisa dihindari pula tugas dan tanggung jawab KSAD Kolonel Bambang Sugeng dalam usaha mempertinggi mutu Angkatan Darat melalui pembangunan Angkatan Darat.

Langkah-langkah Kolonel Bambang Sugeng dalam usahanya membangun Angkatan Darat, diawali dengan pengesahan Pendidikan Calon Perwira dan Calon Bintara



KSAD, Kolonel Bambang Sugeng menerima ucapan selamat.

Artileri Penangkis Serangan Udara (PSU) di Pusat Pendidikan Artileri, melalui Surat Keputusan Nomor : 26/KSAD/KPTS/53 tanggal 9 Pebruari 1953. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga Perwira dan Bintara kesenjataan Artileri yang dirasakan sangat kurang. Lama pendidikan masing-masing untuk Perwira 3 Tahun dan untuk Bintara 1 Tahun.

Satu setengah bulan kemudian dikeluarkan pula keputusan Nomor : 53/Ksad/Kpts/53 yang menghapus Pangkat Pembantu Letnan Cadangan diganti dengan Pangkat Pembantu Letnan Calon Perwira.

Keputusan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pangkat cadangan dalam arti sebenarnya hanya dipakai untuk mereka yang termasuk tenaga-tenaga cadangan. Oleh karena itu perkataan Pembantu Letnan Cadangan (Calon Perwira) kurang tepat untuk dipakai bagi mereka yang termasuk para abituren PPPAD.
- 2) Bahwa tingkatan pendidikan yang diadakan di PPPAD yang menghasilkan para abituren tersebut belum mempunyai nilai sedemikian untuk dapat mengangkat mereka yang lulus dari PPPAD menjadi Perwira Angkatan Darat.
- 3) Bahwa para abituren PPPAD sebelum diangkat menjadi Perwira AD perlu mempertinggi pengetahuannya dan kecakapannya secara praktek dalam waktu tertentu sehingga mereka dianggap cakap untuk diangkat menjadi perwira-perwira AD.
- 4) Selama praktek tersebut perlu diberikan suatu pangkat Calon Perwira.

Selain ide-ide tersebut dalam rangka menghasilkan perwira-perwira muda TNI AD yang akan diharapkan nantinya menjadi pimpinan di jajaran Angkatan Darat, maka Kolonel Bambang Sugeng mengharapkan dibentuknya suatu Akademi Militer. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tanggal 30 April 1953 KSAD telah mengesahkan Panitia Perencanaan Akademi Militer dengan Surat Keputusan No. 78/KSAD/Kpts/53 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Kolonel Jatikusumo
Wk. Ketua : Letkol Askari (Insp. Art)
Anggota : Letkol Sukanda (Insp. Inf), Letkol Suryo-
surarso (InpKav), Mayor Suyatmo (SUAD
VI), Mayor Subyono (SUAD III) dan Mayor
Ashari (SUAD IV).

Terobosan lain dilakukan Kolonel Bambang Sugeng setelah mendengar saran-saran pertimbangan dari Wakil K I Staf Umum Angkatan Darat, tentang perlunya merubah dan menyesuaikan susunan organisasi Seksi I Staf Umum Angkatan Darat. Berdasarkan Keputusan Nomor : 106 / KSAD / Kpts / 53, KSAD memutuskan :

- 1) Mengganti susunan Organisasi Seksi I Staf Umum Angkatan Darat dengan susunan baru.
- 2) Mengesahkan dan menetapkan berlakunya susunan Organisasi Seksi I Staf Umum Angkatan Darat terhitung mulai tanggal 9 Juli 1953.

Seminggu kemudian tanggal 19 Juli 1953 KSAD Kolonel Bambang Sugeng menerapkan peraturan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) melalui Keputusan Nomor : 113/Ksad/Kpts/53 menggantikan Keputusan Ksad Nomor 95/Ksad/Kpts/51, tanggal 25 Mei 1951.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1953 telah dikeluarkan Surat Keputusan KSAD Nomor : 135/Ksad/Kpts/53 tentang Perubahan Organisasi Biro Pendidikan Tentara Inspektorat Infanteri dengan bentuk organisasi yang baru Dinas Pendidikan Jasmani Angkatan Darat.

Masih dalam bulan Agustus, KSAD telah mengeluarkan lagi Surat Keputusan Nomor : 141/Ksad/Kpts/53 tertanggal 25 Agustus 1953 tentang ditiadakannya Staf VI Markas Besar Polisi Militer dan memasukkan Tugas Perencanaan Sistim Pendidikan yang semula dikerjakan oleh Staf VI Markas Besar Polisi Militer di dalam Kesatuan Pendidikan Polisi Militer (PPPM) di Cimahi di bawah Biro Pendidikan.

Menjelang kenaikan pangkatnya menjadi Jenderal Mayor, KSAD Bambang Sugeng mengeluarkan keputusan nomor : 58/Ksad/Kpts/54 tentang Pembentukan Panitia Administrasi yang bertugas antara lain :

- 1) Mempelajari seluruhnya administrasi dalam Angkatan Darat yang saat itu berlaku.
- 2) Mempelajari cara-cara dan keadaan administrasi yang seharusnya memenuhi tujuan : membuat sistim administrasi yang fleksibel yang dapat berjalan dalam keadaan administrasi biasa dan administrasi dalam keadaan perang.
- 3) Menggunakan bahan-bahan hasil tersebut 1) dan 2) untuk mewujudkan penyempurnaan administrasi Angkatan Darat sebagaimana diharapkan dengan mengingat ukuran kecakapan dan kemampuan pejabat-pejabat, keadaan alat-alat serta batas kekuatan keuangan.

Untuk memenuhi personel dalam Polisi Militer, khususnya tenaga Perwira, maka KSAD dengan Surat Kepu-

tusan No. 81/Ksad/Kpts/54 tertanggal 24 Maret 1954 telah mengesahkan pendidikan Polisi Militer yang diselenggarakan di PPPM dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Dari luar Angkatan Perang, SMA, (Tamat) dengan pendidikan selama 1 tahun 11 bulan.
- 2) Dari Infanteri PLT, Tamtama SMP dengan pendidikan selama 1 tahun 8 bulan.
- 3) Dari Bintara, PM, SMP, (Tamat) dengan pendidikan selama 1 tahun 8 bulan.

Besok harinya pada tanggal 25 Maret 1954 KSAD dengan Surat Keputusan No. 87/Ksad/Kpts/54 telah meresmikan berdirinya Pusat Pendidikan Kesehatan Lapangan Angkatan Darat (PPKLAD) bertempat di Cililitan Jakarta. Pada tanggal 26 Maret 1954 KSAD dengan Surat Keputusan No. 90/Ksad/Kpts/54 memutuskan mensahkan Sekolah Pembantu Ahli Rontgen AD yang bertempat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.

c. Pemberlakuan Nomor Register Pusat (NRP) Prajurit TNI AD

Salah satu hasil Konperensi Meja Bundar (KMB), di bidang Militer adalah pembentukan APRIS. Dengan adanya pembentukan APRIS ini, maka di bidang militer banyak masalah teknis administrasi personel yang perlu diselesaikan. Organisasi Angkatan Perang RI yang telah melalui masa-masa perjuangan bersenjata yang cukup panjang dan berat harus mengalami perubahan dengan terbentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang merupakan gabungan dari 3 kekuatan yaitu :

- 1) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

- 2) Bekas Anggota Angkatan Darat yang disusun oleh atau di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda.
- 3) Bekas Anggota Angkatan Laut Belanda.

Dengan demikian upaya pembenahan di bidang administrasi personel khususnya, menjadi salah satu perhatian utama dalam rangka konsolidasi Organisasi TNI.

Dalam fase konsolidasi di bidang organisasi maka aspek di bidang personel waktu itu dapat merupakan hambatan dan kesulitan penyelenggaraan administrasi, antara lain disebabkan :

- 1) Masih terdapat beberapa kesatuan yang bertindak sendiri-sendiri dengan mengabaikan ketertiban penyelenggaraan administrasi yang bersifat terpusat dan standar, termasuk juga dalam hal ini masih adanya batalyon-batalyon fiktif.
- 2) Selain adanya perbedaan-perbedaan dalam jumlah kekuatan terdapat pula perbedaan data yang dimiliki dengan kenyataan yang ada, khususnya mengenai tanda kepangkatan.
- 3) Masalah situasi dan kondisi keamanan yang tidak mendukung akibat adanya peristiwa DI/TII, APRA, Andi Aziz dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dalam rangka upaya penyelenggaraan pengurusan administrasi yang baik dan tertib, maka mutlak diperlukan data personel yang lengkap. Sebagai tindak lanjut pengumpulan data personel ini, maka Kepala Staf "A" memerintahkan beberapa perwira ke Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Selatan.

Semua data yang masuk telah dihimpun dan diserahkan kepada Kepala Staf "A" yang selanjutnya diproses oleh bagian Registrasi dan Statistik.

Bahan administrasi yang masuk dan berhasil diproses berjumlah 88.324 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Kesatuan	Penerima	Ba/Ta	Jumlah
1.	Kementrian Pertahanan	250	317	567
2.	Teritorium I	553	7.205	7.758
3.	Teritorium II	138	5.226	5.364
4.	Teritorium III	740	9.025	9.765
5.	Teritorium IV	678	23.238	23.916
6.	Teritorium V	1.043	31.607	32.650
7.	Teritorium VI	34	2.804	2.838
8.	Teritorium VII	81	2.276	2.357
9.	MBAD	608	2.501	3.109
Jumlah		4.125	84.199	88.324

Sumber : Sejarah Ajudan Jenderal TNI-AD 1945-1985

Apabila dibandingkan dengan perkiraan jumlah Anggota Militer Angkatan Darat sebanyak 200.000 orang, maka dalam tahun 1950 tersebut baru dapat diselesaikan registrasinya \pm 50%.

Dengan adanya data personel tersebut, maka Kepala Staf "A" Angkatan Darat Tmt 1 April 1951 mengeluarkan Surat Keputusan atas nama KSAD berupa Surat Keputusan Serie MBSA (Nomor : A/MBSA/51) yang menetapkan sementara pangkat-pangkat dari anggota kesatuan staf,

dinas yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan yang bersangkutan sebagaimana tercantum dibelakang namanya masing-masing berikut NRPnya.

Pada lampiran Surat Keputusan Serie MBSA itu ditetapkan Nama, Pangkat, Jabatan terakhir dan Nomor Registrasi Pusat (NRP).

Kemudian berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : E/MP/47/51 tanggal 1 Oktober 1951, Kepala Staf "A" Angkatan Darat mengeluarkan Piagam yang menyatakan bahwa nama yang tertera dalam piagam yang bersangkutan ditetapkan Pangkat dan Nomor Registrasinya (NRP). Dalam prakteknya pemakaian NRP ini baru dimulai pada tahun 1955, sedang bulan April 1951 s/d tahun 1954 memakai Reg. No. seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Staf "A" serie MBSA, namun demikian ternyata bahwa dengan sistem NRP ini lebih mempermudah



Piagam penetapan NRP Prajurit TNI AD salah satu karya Bambang Sugeng dalam menertibkan administrasi TNI AD.

penyimpanan dan penerimaan berkasnya serta dapat diketahui asal kesatuan yang bersangkutan. Selain itu pemberian NRP tersebut dibagi ke dalam dua golongan yakni golongan perwira digunakan NRP yang terdiri atas 5 angka sedang untuk Bintara dan Tamtama terdiri atas 6 angka.

Untuk pemberian Nomor Registrasi Pusat (NRP) dimulai dari :

- 1) NRP 10001 atas nama Kolonel Bambang Sugeng untuk perwira.
- 2) NRP 100001 atas nama Pembantu Letnan Satu atas nama Prayitno untuk Bintara.

Pemberian NRP baru untuk golongan Perwira An. Kolonel Bambang Sugeng merupakan suatu langkah yang sangat berani apakah karena beliau pada saat itu sebagai pimpinan Angkatan Darat atau karena ada pertimbangan lain. Namun langkah penertiban ini sangat berarti untuk mewujudkan organisasi Angkatan Darat yang lebih baik dihari-hari berikutnya.*

Bab 4

MENEGAKKAN SOLIDITAS PRAJURIT

1. Intervensi Parlemen ke dalam Angkatan Darat

Banyak hikmah bisa dipetik dari buah perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi fisik merebut, mempertahankan dan membela Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia ber-tempur dan menderita. Dalam masa revolusi fisik itu rakyat berkorban jiwa, dan harta benda. Terbukti, bahwa daya hidup bangsa Indonesia sangat besar, sehingga dapat mempertahankan diri dan menghindari kehancuran. Masa berbahaya yang telah dilintasi memperkuat jiwa bangsa Indonesia, memperteguh patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia.

Dalam era perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaannya, memunculkan sikap dan tekad TNI untuk selalu membela dan memperjuangkan tanah air dari penguasaan bangsa lain. Di bawah kepemimpinan Panglima Besar Sudirman, TNI menjadikan kemerdekaan bangsa dan negara sebagai rujukan perjuangan dan arah dari setiap aktifitas keseharian, walaupun untuk itu harus mengorbankan jiwa dan raga. *"APRI (TNI), lebih baik hancur bersama-sama debunya kemerdekaan daripada hidup subur dalam alam penjajahan"*.

Perang kemerdekaan telah usai, suasana perjuangan negara dan bangsa Indonesia sesudahnya memasuki era (babak) baru yang merupakan suasana konsolidasi. Dalam keadaan yang serba sulit mulailah rakyat Indonesia berusaha untuk menyembuhkan luka-luka yang diderita pada masa revolusi fisik. Di sisi lain tenaga dan pikiran masih perlu pula dipergunakan untuk menegakkan kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara, karena munculnya gangguan-gangguan yang membahayakan keutuhan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya keutuhan Angkatan Darat.

Era sesudah pengakuan kedaulatan RI adalah era pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Seperti lazimnya dalam masa transisi, sesuatu seringkali menimbulkan komplikasi, bahkan bisa jadi terjadi benturan yang berakibat gangguan-gangguan dalam usaha pembangunan.

Pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia sejak tahun 1950 banyak dibicarakan dalam parlemen sehingga suhu politik dalam negeri pada saat itu tidak begitu kondusif terhadap situasi pemerintahan. Hal ini dimungkinkan akibat sistim pemerintahan RI sejak terbentuknya NKRI, dimana berlaku sistim Kabinet Parlementer. Dalam sistim tersebut Menteri Pertahanan mempunyai tanggung jawab penuh dalam bidang politik pertahanan negara dan Angkatan Perang. Sedang menurut UUDS' 1950 Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang dalam arti simbolis dan bukan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Sebagai akibat dari sistim Demokrasi Parlementer tersebut, Parlemen terlalu jauh mencampuri masalah Angkatan Perang terutama mengenai Angkatan Darat.

Pada waktu peleburan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Republik Indonesia (RI), sebagai hasil kesepakatan antara RI dengan Bijzonder Federaal Overleg (BFO) Negara-negara Federal, 2/3 anggota DPR berasal dari wakil-wakil bekas negara-negara bagian. Kenyataan ini mengakibatkan kekhawatiran TNI / Angkatan Perang kepada DPR tersebut karena DPR inilah nanti yang secara langsung akan membicarakan segala sesuatu yang menyangkut pembangunan negara termasuk bidang Pertahanan / Militer. DPR yang mayoritas anggotanya terdiri dari bekas-bekas pemerintah federal inilah yang berkuasa menentukan undang-undang negara termasuk undang-undang yang menyangkut nasib prajurit-prajurit TNI, yang sebelumnya telah berjuang justru menentang kaum federal. Namun karena komitmen TNI yang akan senantiasa taat kepada pemerintah yang menjalankan kewajibannya menurut UUD negara, maka secara kompromistis TNI menerimanya biarpun dengan berat hati.

Dengan demikian sebagai konsekwensi dari perbedaan pendapat tentang pembangunan aspek kehidupan bangsa termasuk masalah Angkatan Darat dalam suatu proses transisi yang sangat kompleks itu kadang terjadi benturan antar kepentingan yang menimbulkan berbagai bentuk kejadian atau peristiwa seperti halnya yang terjadi pada peristiwa "17 Oktober 1952".

2. Massa Rakyat Menuntut Parlemen dibubarkan

Peristiwa 17 Oktober 1952, merupakan peristiwa bersejarah bagi Angkatan Perang Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat di mana telah terjadi suatu demonstrasi massa di Jakarta, disertai dengan demonstrasi senjata

berat yang diarahkan ke Gedung Parlemen dan Istana Merdeka yang diorganisir oleh sekelompok rakyat.

Para demonstran dengan slogan-slogan dan poster menuntut ; Bubarkan perlemen sekarang juga, Parlemen tidak ada gunanya, Parlemen tidak Repräsentatif, Parlemen bukan warung kopi, Suara rakyat suara merdeka, rakyat tidak bisa membiayai sidang dan slogan-slogan lainnya yang menggambarkan rasa kekecewaan serta rasa ketidak puasan rakyat kepada cara kerja Parlemen saat itu.

Pada saat yang bersamaan, waktu itu rombongan Angkatan Darat pimpinan KSAD Kolonel AH. Nasution bersama dengan para Panglima Daerah menghadap Presiden Soekarno ke Istana untuk menyampaikan saran dan pendapat tentang situasi pemerintahan terutama dalam hal campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mengenai masalah-masalah Angkatan Darat, sehingga dalam kesempatan itu Kolonel AH. Nasution mengusulkan agar Presiden membubarkan DPRS dan mengambil alih kekuasaan negara demi keselamatan negara.

Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak menyenangi Angkatan Darat untuk menyudutkan kepemimpinan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel AH. Nasution pada saat itu. Suasana meruncing dengan adanya pernyataan dari Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP) yang menyatakan bahwa demonstrasi 17 Oktober 1952 disetujui serta dibantu, atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Angkatan Perang. Tanggapan dan sanggahan Kolonel AH. Nasution berupa penjelasan kejadian yang sesungguhnya kepada Presiden seputar peristiwa 17 Oktober 1952, tidak membuahkan hasil dan tidak menyelesaikan persoalan, justru menimbulkan gangguan soliditas Angkatan Darat sehingga terjadi peng-

gantian Panglima-panglima daerah diluar prosedur yang berlaku.

Berlarutnya persoalan-persoalan Angkatan Perang yang semakin gencar dibicarakan di DPRS tetapi belum juga mendapatkan penyelesaian, maka KSAD Kolonel AH. Nasution melalui sebuah nota kepada Menteri Pertahanan meminta agar pemerintah membebaskan dirinya dari jabatan KSAD dan sekaligus sebagai pertanggungjawabannya dalam Peristiwa 17 Oktober 1952.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup akhirnya Presiden menerima pengunduran diri Pak Nasution dan mengangkat Kolonel Bambang Sugeng sebagai Pejabat Kasad.

Beban tugas Kolonel Bambang Sugeng sebagai Kasad sangatlah berat terutama menyatukan pro dan kontra di tubuh organisasi Angkatan Darat. Dalam mengatasi masalah inilah timbul pemikiran lahirnya Piagam Keutuhan Angkatan Darat yang dianggap dapat mewartakan kembalinya soliditas Angkatan Darat.

3. Rasa Tidak Puas Berakibat Peristiwa 17 Oktober 1952

Masalah internal Angkatan Darat yang mewarnai munculnya Peristiwa 17 Oktober 1952, berawal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan dan kepemimpinan Pimpinan Angkatan Darat dalam membangun Angkatan Darat.

Merasa tidak sejalan dengan kebijaksanaan pimpinan Angkatan Darat, Kolonel Bambang Supeno mengajak para Panglima Daerah menandatangani pernyataan menuntut Presiden mengganti Kolonel AH. Nasution sebagai KSAD, karena menurut keyakinannya kepemimpinan Kolonel

AH Nasution telah menyimpang dari pembangunan Angkatan Darat.

Para Panglima Daerah tidak merespon ajakan Kolonel Bambang Supeno ini karena cara tersebut dapat berdampak pada terjadinya perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat.

Kegagalan Kolonel Bambang Supeno mempengaruhi Panglima Daerah untuk mendukung pernyataan tidak mengendorkan semangatnya apalagi memupusnya, justru ia menghadap langsung kepada Presiden / Panglima Tertinggi dan mengutarakan maksud dan keinginannya agar Pimpinan Angkatan Darat diganti.

Upaya Kolonel Bambang Supeno menghadap Presiden ini mendapat tanggapan yang serius di kalangan pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat, sehingga pada tanggal 12 Juli 1952 para Perwira Angkatan Perang antara lain Jenderal Mayor TB. Simatupang, Kolonel AH. Nasution, Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Kawilarang, Kolonel Bambang Sugeng, Kolonel Sadikin, Letnan Kolonel Bakhrum, Letnan Kolonel Kosasih, Letnan Kolonel S. Parman, Letnan Kolonel Bustomi, Letnan Kolonel Suprayogi, Letnan Kolonel Suprpto, Letnan Kolonel Sutoko, Mayor Rukmiko, Mayor Subeno, Mayor Adjie dan Mayor Murtono mengadakan rapat di kediaman Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Jenderal Mayor TB. Simatupang. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa tindakan Kolonel Bambang Supeno tidak dibenarkan karena menyalahi kode etik Perwira.

Buntut dari tindakan Kolonel Bambang Supeno tersebut, KSAD Kolonel AH. Nasution memberikan sanksi membebaskannya dari segala tugasnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Presiden dan Menteri Perta-

hanan. Pembebasan tugas tersebut tidak diterima oleh Kolonel Bambang Supeno.

Demikian halnya keputusan rapat para pimpinan Angkatan Darat tanggal 12 Juli 1952, tidak diindahkan oleh Kolonel Bambang Supeno yang menyatakan dalam suratnya tertanggal 13 Juli 1952, tentang tidak adanya lagi kepercayaan Kolonel Bambang Supeno kepada Kolonel AH. Nasution sebagai KSAD. Selain ditujukan kepada Menteri Pertahanan, surat itu juga ditembuskan kepada Ketua Seksi Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor TB. Simatupang, Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel AH. Nasution, Panglima TT I s.d. VII dan Pengurus Ikatan Perwira Angkatan Darat.

Surat Kolonel Bambang Supeno itu menimbulkan suasana yang cukup tegang antara Seksi Pertahanan dan Menteri Pertahanan. Ketegangan memuncak karena Menteri Pertahanan tidak mengizinkan Seksi Pertahanan untuk mendengar secara langsung keterangan pribadi dari Kolonel Bambang Supeno mengenai isi suratnya tertanggal 13 Juli 1952.

Seksi Pertahanan melaporkan masalah ini kepada Sidang Parlemen untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan sampainya persoalan kepada Parlemen bukan berarti persoalan berakhir, justru menjadi lebih meluas yang akhirnya mengakibatkan mosi tidak percaya dari Baharuddin, dan kawan-kawan atas kebijaksanaan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Akibatnya timbullah rasa tidak senang dari pimpinan Angkatan Darat dan masyarakat umum tentang situasi perdebatan di Parlemen mengenai masalah Angkatan Perang.

Sebagai reaksi dari ketidakpuasan tersebut pada tanggal 11 Oktober 1952 di Jakarta telah berkumpul para Panglima

Daerah antara lain Kolonel Simbolon dari TT IV, Letnan Kolonel Dr. Suwondo TT V, Kolonel Gatot Subroto dari TT VII, untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi, sesuai tradisi TNI, "Musyawarah untuk mupakat"

Selain itu maksud pertemuan tersebut juga untuk menanggapi permasalahan Angkatan Perang di DPR agar persoalan tidak bertambah meluas sampai ke masyarakat. Ternyata selain Angkatan Perang masyarakat juga sudah tidak puas melihat cara kinerja Parlemen, sehingga akhirnya terjadi demonstrasi massa rakyat di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1952, yang menuntut dibubarkannya Parlemen.

Bersamaan terjadinya demonstrasi di luar Istana, KSAD Kolonel AH. Nasution bersama Panglima-Panglima Daerah menghadap Presiden Soekarno untuk mengusulkan kepada Presiden agar DPR dibubarkan dan kemudian mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan demi keselamatan negara. Kesamaan waktu dan kemiripan tuntutan demonstrasi dengan usul pimpinan Angkatan Darat memunculkan persepsi yang bias dan salah terhadap Angkatan Darat. Saran Kolonel AH. Nasution tidak diterima oleh Presiden dengan dalih Presiden tidak mau dianggap diktator dan berjanji akan mempelajari situasi.

Sikap dan penolakan Presiden terhadap saran pimpinan Angkatan Darat itu membawa pengaruh terhadap perkembangan Angkatan Darat berikutnya. Walaupun demikian Kolonel AH. Nasution tetap loyal kepada keputusan Presiden dan tidak ada usaha untuk memperuncing situasi apalagi merebut kekuasaan.

Justru Kolonel AH. Nasution segera menyadari bahwa cara yang ditempuhnya kurang tepat, walaupun tujuan yang sebenarnya adalah menyatakan ketidakpuasan ter

hadap DPRS dan menghendaki kembali ke UUD 1945, di mana kekuasaan penuh ada di tangan Presiden.

Sebagai pertanggung-jawaban atas tindakannya Kolonel AH. Nasution meminta agar pemerintah membebaskannya dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan bersedia diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diajukan untuk menghindari keretakan dan perpecahan di kalangan Angkatan Darat dan juga untuk menghindari akibat-akibat negatif yang lebih luas.

4. Akibat Peristiwa 17 Oktober 1952 di Daerah

Peristiwa 17 Oktober 1952 dimanfaatkan oleh Kolonel Bambang Supeno dan kelompoknya yang berseberangan dengan pimpinan Angkatan Darat untuk mencapai keinginannya dengan mempengaruhi Panglima-Panglima Daerah termasuk Kolonel Bambang Sugeng. Pada tanggal 19 Oktober 1952 Dua hari setelah peristiwa, Kolonel Bambang Supeno, Kolonel Suhud dan Kolonel Sapari menghadap kepada Kolonel Bambang Sugeng di Surabaya untuk menjelaskan tentang Peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Panglima Teritorium V/Brawijaya Letkol dr. Suwondo ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Karena penjelasan sepihak itu Kolonel Bambang Sugeng mengambil alih pimpinan Panglima Teritorium V/Brawijaya.

Demikian juga Panglima Teritorium VII/Makasar Kolonel Gatot Subroto, dikatakan juga terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952 berdasarkan dokumen yang diterima oleh Kepala Staf Teritorium VII/Makasar langsung dari Menteri Penerangan A. Mononutu yang menyatakan bahwa Kolonel Gatot Subroto turut dalam melaksanakan pengambil alihan kekuasaan di Jakarta.

Dari Jakarta pengaruh Peristiwa 17 Oktober 1952 juga menyebar ke wilayah lain seperti di Teritorium II/Sumatera Selatan, di mana Komandan Brigade X Letkol Kretarto mengambil alih pimpinan Panglima Teritorium II dari Letkol Kosasih.

Semua kejadian ini sangat disesalkan oleh pemerintah karena semakin mempersulit penyelesaian persoalan-persoalan yang menyangkut Peristiwa 17 Oktober 1952.

Begitu besar dampak Peristiwa 17 Oktober 1952 sehingga daerah-daerah mengambil tindakan sendiri-sendiri dalam menyikapinya, tanpa ada koordinasi sebelumnya dari komando atas. Apa boleh buat akhirnya di tubuh Angkatan Darat pada saat itu terjadi curiga mencurigai, pro-kontra di dalam menjalankan kepemimpinan Angkatan Darat.

5. Mengalang Persatuan Perwira Angkatan Darat

Persoalan yang berlarut-larut di lingkungan Angkatan Darat akibat Peristiwa 17 Oktober 1952 semakin menjadi perbincangan yang sangat serius di Parlemen. Untuk meredamnya, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 22 Nopember 1952 berisi pembebasan tugas dan tanggungjawab beberapa Perwira Angkatan Darat, termasuk di antaranya Kolonel AH. Nasution dibebaskan dari Jabatan KSAD sejak 5 Desember 1952. Maklumat pembebasan ini didasarkan pada Nota yang disampaikan Kolonel AH. Nasution pada tanggal 4 Nopember 1952 tentang permohonan berhenti dari jabatannya sebagai KSAD.

Sebagai pribadi yang bertanggungjawab atas kejadian Peristiwa 17 Oktober 1952, Kolonel AH. Nasution menyampaikan pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut kepada Presiden / Pangti, Perdana Menteri dan Wakil Perdana

Menteri. Dalam pertanggungjawabannya Kolonel AH. Nasution mengungkapkan prolog dan epilog Peristiwa 17 Oktober 1952. Pertanggungjawaban itu dimaksudkan untuk menjelaskan kejadian sebenarnya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang berhubungan dengan TNI AD.

Sebagai pengganti Kolonel AH. Nasution, pemerintah mengangkat Kolonel Bambang Sugeng sebagai Pejabat KSAD terhitung mulai tanggal 22 Desember 1952. Pengangkatan Kolonel Bambang Sugeng sebagai Pejabat KSAD menjadi harapan besar bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan ketegangan di lingkungan Angkatan Darat akibat Peristiwa 17 Oktober 1952 menuju kekompakan dan kesatuan para Perwira Angkatan Perang umumnya dan Angkatan Darat khususnya sebagaimana yang disepakati pada saat membentuk Ikatan Perwira Republik Indonesia (IPRI) di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 1949.

Pejabat KSAD Kolonel Bambang Sugeng mengawali tugasnya dengan menyelesaikan Peristiwa 17 Oktober 1952 melalui prosedur Hukum di Pengadilan (Tinggi Militer), dengan melakukan pemeriksaan terhadap mantan KSAD Kolonel AH. Nasution dan para Panglima Teritorium serta beberapa Perwira Angkatan Darat yang dianggap bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut, termasuk Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor TB. Simatupang.

Walaupun pemeriksaan telah dilakukan sedemikian jauh dan meluas, akan tetapi penyelesaian melalui proses hukum ini tidak dapat membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Kegagalan dalam penyelesaian melalui mediasi hukum, tidak menyurutkan langkah Kolonel Bambang Sugeng untuk menyelesaikan masalah dalam tubuh Angkatan Darat, bahkan pada saat usahanya mencari alternatif pemecahan

menghadapi hambatan dan tantangan Kolonel Bambang Sugeng tetap tegar menghadapinya.

Salah satu hambatan yang dihadapi adalah keputusan Pejabat KSAD Kolonel Bambang Sugeng menetapkan Letkol Warrow sebagai Pejabat Panglima Teritorium VII/ Makasar. Keputusan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Sri Sultan Hameng Kubuwono IX, karena dianggap bertentangan dengan dasar-dasar usaha penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952 secara integral berdasarkan keterangan tanggal 22 Nopember 1952, di mana Kabinet tidak membenarkan tindakan Letkol Warrow dalam pengambilalihan pimpinan Teritorium VII dan penahanan atas diri Panglima Teritorium VII Kolonel Gatot Subroto.

Keputusan Pejabat KSAD Kolonel Bambang Sugeng ini berbuntut panjang karena dibawa dalam pembicaraan di Kabinet sehingga menimbulkan suasana tegang dan meruncing antara pihak yang pro dan kontra. Mengingat tidak adanya kebulatan suara dari Kabinet, akhirnya Kabinet menyerahkan persoalan tersebut kepada Pejabat KSAD. Dengan keputusan seperti itu Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX menilai Kabinet menyetujui Keputusan Pejabat KSAD untuk menetapkan Letkol Warrow sebagai Panglima Teritorium VII. Sebagai reaksi atas ketidaksetujuannya, maka Menteri Pertahanan Hameng Kubuwono IX, mengundurkan diri sejak 1 Januari 1953 dari Jabatan Menteri Pertahanan dan jabatannya diserahkan kepada Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito

Hambatan lain yang dihadapi Pejabat Kasad Kolonel Bambang Sugeng dalam membangun Angkatan Darat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1953, dimana Menteri Pertahanan yang baru Mr. Iwa Kusumasumantri merubah susunan Kementrian Pertahanan. Dampak kebi

jaksanaan itu antara lain dibekukannya Gabungan Kepala Staf (GKS) Angkatan Perang yang dipimpin oleh Jenderal TB. Simaputang, sebagai koordinator Kepala-kepala Staf Angkatan. Setelah Gabungan Kepala Staf ini ditarik Kabinet, berarti sewaktu-waktu masing-masing Kepala Staf Angkatan bertindak sebagai Ketua rapat.

Penerapan PP No. 35 tahun 1953 di lingkungan Angkatan Perang, menjadikan tidak jelas batas antara kebijakan Politik Militer dan Militer Teknis. Terjadi bias antara kebijakan pemerintah / Menteri Pertahanan dan tanggung-jawab Kepala Staf Angkatan. Akibatnya timbul kegoncangan dalam Angkatan Darat, karena pengangkatan beberapa Perwira sebagai Pejabat teras Markas Besar (Mabad) oleh Menteri

Dengan menggunakan PP No. 35, Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusumasumantri mengadakan mutasi beberapa Pejabat penting di Markas Besar Angkatan Darat tanggal 30 Nopember 1953, yang pelaksanaannya tanpa meminta pertimbangan dari pejabat Kasad terlebih dahulu. Mutasi tersebut diantaranya Pejabat Wakil Kasad Letkol Suprpto digantikan oleh Letkol Zulkifli Lubis serta dua orang pembantunya masing-masing Letkol Sapari sebagai Asisten I dan Letkol Abimanyu sebagai Asisten II Kasad. Permasalahan baru timbul karena sebelumnya melalui suratnya tertanggal 23 Nopember 1953 Pejabat KSAD Kolonel Bambang Sugeng telah menyampaikan pernyataan kepada Menteri Pertahanan agar sementara waktu jangan diadakan mutasi-mutasi di lingkungan Angkatan Darat sebelum ada penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952 secara mantap. Dalam jawabannya Menteri Pertahanan mengatakan, bahwa mutasi-mutasi dilakukan atas janji Jaksa Agung dan atas usul-usul Pejabat KSAD. Dengan demikian Menteri

Pertahanan sudah tidak konsisten lagi dengan apa yang telah disepakati dengan Pejabat KSAD.

Adanya perbedaan faham tersebut berpengaruh terhadap pendirian pejabat KSAD, baik dalam usaha penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952 maupun dalam usaha pembangunan Angkatan Darat secara keseluruhan. Kolonel Bambang Sugeng menyadari usaha apapun yang dilakukannya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal tanpa ada dukungan dari politik kemiliteran yang seharusnya diberikan oleh Menteri Pertahanan. Menurut Kolonel Bambang Sugeng persoalan yang terjadi di lingkungan Angkatan Perang khususnya Angkatan Darat bukanlah persoalan insidental dan kasuistik melainkan persoalan yang prinsipil yang penyelesaiannya menyangkut nasib Angkatan Perang / Angkatan Darat di masa yang akan datang sekaligus menentukan apakah Pembangunan Angkatan Darat bebas dari permainan politik atau tidak.

Munculnya perbedaan faham antara Pejabat KSAD dengan Menteri Pertahanan, mendorong KSAD Kolonel Bambang Sugeng pada tanggal 2 Desember 1953 mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, yang disampaikan kepada Presiden / Panglima Tertinggi, Perdana Menteri Wilopo, Menteri Pertahanan (ad interim Prawoto Mangkusasmito) dan kepada Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor TB. Simatupang.

Sementara itu dalam masyarakat telah tersiar berita-berita dan tanggapan-tanggapan di media cetak baik dari masyarakat maupun Angkatan Perang mengenai surat permohonan berhenti pejabat KSAD Kolonel Bambang Sugeng yang dihubungkan dengan peristiwa mutasi para Perwira di Markas Besar Angkatan Darat. Tanggapan yang

cukup pedas ditujukan kepada pemerintah antara lain disampaikan oleh Panglima Teritorium III Kolonel Kawilarang, dengan tegas menyatakan agar perlu adanya batas yang tegas antara lapangan politik dan militer.

Mengantisipasi permasalahan ini maka Pejabat KSAD mengadakan tindakan pengamanan dengan memberikan penjelasan seperlunya khususnya di lingkungan Angkatan Darat. Pada tanggal 7 Desember 1953 Pejabat KSAD memanggil semua Panglima Teritorium untuk membicarakan sekitar masalah mutasi di Markas Besar Angkatan Darat yang telah dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Para Panglima pada umumnya bersikap loyal terhadap tindakan Pejabat KSAD, walaupun diikuti dengan harapan agar Pejabat KSAD meninjau kembali permohonan berhentinya sehubungan dengan pentingnya usaha segera membangun keutuhan dan pembangunan Angkatan Darat pada waktu itu.

Untuk menjawab desas-desus dan tanggapan-tanggapan Angkatan Perang tentang mutasi para Perwira Angkatan Darat di Markas Besar Angkatan Darat ini, pada tanggal 18 Desember 1953 pemerintah mengeluarkan sebuah pengumuman yang bertujuan untuk memperkuat tindakan mengadakan mutasi tersebut. Melalui pengumuman tersebut pemerintah menyatakan bahwa mutasi para Perwira mempunyai dasar hukum dan sah. Pemerintah tidak membenarkan adanya tanggapan-tanggapan lagi dari para Perwira (Panglima Teritorium) yang sifatnya menentang atas keputusan itu.

Untuk lebih jelasnya pengumuman pemerintah itu adalah sebagai berikut :

- a. Mutasi dalam Markas Besar Angkatan Darat yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan Surat

Keputusan Presiden Nomor 220 / 1953 tanggal 30 Nopember 1953 mempunyai dasar hukum yang sah.

- b. Pemerintah menegaskan di sini, bahwa tidak dibenarkan para Panglima atau Perwira Angkatan Perang menyatakan pendirian di depan umum tentang soal-soal kebijaksanaan pemerintah.

Pengumuman Pemerintah tersebut tidak serta merta menghapuskan adanya perbedaan antara Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusuma Sumantri dengan Pejabat KSAD Kolonel Bambang Sugeng bahkan suasana khususnya di lingkungan Perwira Angkatan Darat semakin menunjukkan ketidaktenangan.

Pada tanggal 18 Desember 1953, Pejabat KSAD mengeluarkan sebuah Perintah Harian yang khusus ditujukan kepada seluruh warga Angkatan Darat ; *"..... Jauhkanlah dirimu dari maksud-maksud dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari jalan hukum dan disiplin, karena jika tidak demikian, anasionallah maksud dan perbuatanmu. Jagalah nama gelarmu sebagai Tentara Nasional Indonesia yang membawa perlambang kepatuhan, ketentuan dan disiplin"*

Dalam Perintah Harian Pejabat KSAD tersebut, jelas memperlihatkan kepatuhan dan loyalitas KSAD kepada pemerintah, sehingga pihak pemerintah merasa mempunyai kekuatan dan alasan untuk mempertahankan Kolonel Bambang Segeng sebagai KSAD pada Jabatannya. Pada tanggal 26 Desember 1953 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan penolakan atas permohonan berhenti KSAD yang diajukan pada tanggal 2 Desember 1953 sebelumnya.

Surat Keputusan itu berisi sebagai berikut :

- a. Tidak dapat mengabulkan permohonan Pejabat KSAD termaktub suratnya tertanggal 2 Desember 1953.
- b. Memerintahkan kepada Pejabat KSAD untuk tetap dalam jabatannya dan menjalankan tugas serta kekuasaannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Pertimbangan pemerintah yang lain untuk tetap mempertahankan Kolonel Bambang Sugeng sebagai pejabat KSAD mengingat keadaan keamanan negara RI pada saat itu masih membutuhkan tenaga pejabat KSAD Kolonel Bambang Sugeng.

Dengan pengumuman dan keputusan serta kepercayaan pemerintah kepada Kolonel Bambang Sugeng bukan berarti pemerintah mengabaikan tindakan-tindakan sebelumnya, namun pemerintah tetap pada pendiriannya dalam arti tetap membenarkan dan memperkuat tindakan yang dilakukannya.

Pendapat prinsipil yang pernah diajukan KSAD Kolonel Bambang Sugeng kepada Pemerintah sekitar penyelesaian persoalan Angkatan Darat dan keutuhan Angkatan Darat tidak dijadikan dasar dalam tindakan-tindakan pemerintah selanjutnya.

Keputusan Presiden Panglima Tertinggi yang dikeluarkan pada akhir Desember 1953 benar-benar menutup usaha-usaha Pejabat KSAD untuk mencari jalan yang disetujui bersama antara pemerintah dan Pejabat KSAD dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di lingkungan Angkatan Darat. Dengan melihat situasi seperti itu pihak Angkatan Darat menyangsikan penyelesaian dan keutuhan Angkatan Darat dapat tercapai.

Akibatnya ketegangan dan ketidakpuasan dalam tubuh Angkatan Darat pun semakin memuncak, sehingga Pejabat KSAD mengkhawatirkan terjadinya usaha-usaha untuk menghalangi, menghambat, mempersukar bahkan mempersulit penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952.

Dalam situasi yang seperti ini sebagai Pemimpin yang bertanggungjawab di jajaran Angkatan Darat, KSAD mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada seluruh warga Angkatan Darat, dengan mengeluarkan Perintah Harian Nomor 1/ KSAD / PH / 54 tanggal 26 Juli 1954 yang berbunyi :

Kepada segenap Anggota Angkatan Darat di manapun berada diperintahkan untuk :

- a. Tidak mengindahkan aktivitas dalam bentuk atau cara apapun juga, yang dapat menghalang-halangi, melambatkan, mempersulit atau merintangangi penyelesaian persoalan 17 Oktober 1952 oleh Hakim melalui saluran hukum.
- b. Melaksanakan putusan Hakim kelak, bagaimanapun juga jatuhnya dan bunyinya putusan itu.
- c. Dimengerti bahwa pelanggaran terhadap perintah ini dianggap sebagai insubordinasi.

Apabila kita simak Surat Perintah Harian KSAD, tersebut dengan tegas ditekankan agar segenap anggota Angkatan Darat benar-benar menunjukkan suatu sikap loyal dan disiplin yang tinggi terhadap keputusan dari Komando atas termasuk dalam penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952. Bagaimanapun hasil keputusan yang dikeluarkan itu harus loyal menerimanya.

6. Penyelesaian Model TNI

Penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952 melalui proses hukum tidak dapat mengakhiri permasalahan sampai tuntas. Menghadapi kenyataan penyelesaian permasalahan secara hukum yang tidak kunjung selesai, KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng beserta para Perwira Angkatan Darat lainnya merasa perlu menempuh upaya lain sesuai tradisi TNI dengan mengadakan suatu pertemuan, guna mencari solusi menyelesaikan Peristiwa 17 Oktober 1952 dan akibatnya serta usaha untuk mengembalikan keutuhan TNI AD sebagaimana yang pernah ditampilkan dalam merebut, menegakkan dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, pada tanggal 30 Nopember 1954 KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng mengundang seluruh Panglima Teritorium, para Komandan, Instruktur, Direktur, Kepala Kesenjataan / Dinas Jawatan jajaran Angkatan Darat dan juga para pejabat teras Markas Besar Angkatan Darat untuk mengikuti rapat di SUAD pada tanggal 3 Desember 1954. Dalam rapat tersebut KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng mengadakan suatu briefing tentang keadaan Angkatan Darat. KSAD menyampaikan keyakinan dan kepercayaannya bahwa tiap-tiap anggota Angkatan Darat mempunyai kehendak yang sama yaitu menciptakan suatu Angkatan Darat yang kuat, kokoh, moril dan teknis. Kemudian dihubungkan dengan hari depan negara RI sebagai negara nasional yang dicita-citakan, yang didalamnya ada organisasi Angkatan Darat yang merupakan pendukung serta pelindungnya.

Namun dengan adanya Peristiwa 17 Oktober 1952 menjadi berpengaruh luas terhadap organisasi. Dalam

Angkatan Darat, telah terjadi pertentangan-pertentangan dan curiga-mencurigai.

Akibatnya organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Tujuan untuk menciptakan Angkatan Darat yang kuat kokoh, moril maupun teknis tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu dengan kesadaran untuk berakur kembali, menyelesaikan pertentangan-pertentangan secara tulus iklas, melepaskan pendirian/ pendapat pribadi yang dapat mengganggu jalannya penyelesaian permasalahan sesungguhnya Peristiwa 17 Oktober 1952 tidak hanya berpengaruh kepada internal Angkatan Darat saja tetapi juga berpengaruh kepada aspek yang lain seperti halnya sosial politik. Berarti tidaklah cukup hanya di antara Perwira Angkatan Darat ada ketulusan dan keikhlasan untuk akur, maaf-memaafkan tetapi termasuk dengan komponen lain (Partai politik).

Demikian pengarahan KSAD di dalam menindaklanjuti upaya penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952 dan usaha membangun Angkatan Darat. Selanjutnya dalam rapat tanggal 3 Desember 1954 KSAD juga menyatakan kesediaannya untuk menerima saran / masukan, pertimbangan demi terwujudnya kembali persatuan anggota-anggota Angkatan Darat.

Menyimak pengarahan KSAD tersebut, semua peserta rapat menyadari sepenuhnya bahwa keutuhan kembali Angkatan Darat pada saat itu di atas kepentingan yang lainnya. Dan diperoleh pendapat dan pendirian yang sama tentang cara menyelesaikan persoalan Angkatan Darat oleh Angkatan Darat sendiri dengan cara kekeluargaan, ketulusan dan keikhlasan untuk menghilangkan pendapat/ pendirian yang berbeda atau bertentangan tentang persoalan yang sama di lingkungan Angkatan Darat.

Selanjutnya peserta rapat mempercayakan kepada KSAD agar jalan keluar yang telah disepakati oleh warga Angkatan Darat dalam menyelesaikan Peristiwa 17 Oktober 1952 dan hasilnya disampaikan kepada Jaksa Agung, Pemerintah / Presiden.

Selain itu peserta rapat juga menyampaikan kepada KSAD, bahwa sejak rapat 3 Desember 1954 antara sesama mereka telah hilang rasa curiga-mencurigai, prasangka dan lain-lain antara yang satu dengan yang lainnya.

Kendati penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952 telah dipercayakan sepenuhnya oleh peserta rapat Kepada KSAD, namun KSAD tetap menghendaki saran pertimbangan, bentuk cara mana yang seharusnya diambil agar mempunyai efek ke luar tanpa dapat ditafsirkan yang tidak-tidak dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau landasan oleh pihak tertentu yang masih berusaha mengacaukan negara terutama Angkatan Darat.

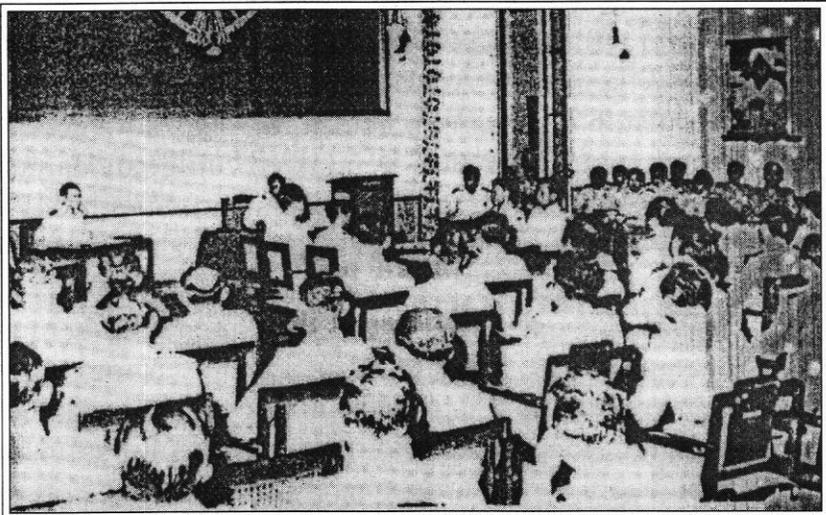
Guna mencari bentuk penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952 yang representatif maka diperoleh kesepakatan untuk mengadakan pertemuan secara lebih luas lagi dengan para senior Perwira Angkatan Darat. Pelaksanaan rapat ditetapkan pada tanggal 17 Januari 1955, dengan mengundang tokoh-tokoh Perwira Angkatan Darat, seperti : Jenderal Mayor TB. Simatupang, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel M. Simbolon, Kolonel A.E Kawilarang, Kolonel Bambang Utoyo, Kolonel Moh. Bakhrum, Kolonel Sudirman, Kolonel Sodikin, Kolonel JF. Warrow, Kolonel Bambang Supeno, Kolonel GPH. Jatikusumo, Kolonel Suprpto, Kolonel Sungkono, Kolonel Suhud, Kolonel AH. Nasution, Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Surjo Suroso, Kolonel Dr. A. Saleh, Letkol Abimanyu, Letkol Sapari Suriadibrata, Letkol Oto Abdulrahman, Letkol A. Kosasih, Letkol A. Tahir, Letkol

Suprayogi, Letkol A. Bustomi, Letkol MMR. Kartakusuma, Letkol Sutoko, Letkol A. Parman, Letkol Kretarto, Letkol A. Bratamenggala, Letkol Askari, Letkol Sukardi, Letkol Dr. Sujono, Letkol AY. Mokoginta, Letkol Imam Suharto, Letkol MY. Prayogo, Letkol Omon Abdulrahman, Letkol Surakhman, Letkol Dr. Sumantri, Letkol Akil Prawiradireja, Letkol Mursito, Letkol RMS. Surya Sumarno, Letkol Guritno (Sekretaris IPRI Pusat), Mayor Mukhamad, Mayor Sriamin, Mayor Sutejo, Mayor Sukarjo, Mayor Kuswondho, Mayor Subiyono, Mayor Sumantri dan Mayor Slamet Ali Yunus, Ketua Senat Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD).

Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, KSAD memimpin rapat yang dihadiri oleh 49 Perwira, Jenderal Mayor TB. Simatupang dan AH. Nasution berhalangan hadir. Rapat yang dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 17 dan 18 Januari 1955 dan menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Peserta Rapat sependapat dengan KSAD bahwa untuk keutuhan Angkatan Darat diperoleh suatu kebulatan tekad untuk bersatu di kalangan Perwira Angkatan Darat dan hendak diwujudkan dalam usaha bersama untuk menyelesaikan Peristiwa 17 Oktober 1952 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Rapat tanggal 17 Januari 1955 dipandang belum mampu untuk menghasilkan perumusan tata cara pelaksanaan maksud tersebut di atas, oleh karena itu perlu dibentuk Panitia Persiapan yang bertugas membantu KSAD untuk merencanakan suatu kertas kerja bagi rapat lanjutan yang diselenggarakan selekas mungkin di Yogyakarta.

- c. Panitia Persiapan yang dibentuk harus dipilih dari Perwira-perwira yang berpengalaman luas serta mendalam terhadap masalah-masalah pokok yang akan dihadapi.
- d. Pokok-pokok pikiran yang akan dirumuskan oleh rapat lanjutan harus bersifat mendalam dan tetap serta mempunyai kekuatan untuk mengikat para Perwira dari generasi yang sekarang dan generasi-generasi yang akan datang sehingga sungguh-sungguh menjadi pedoman mutlak bagi mereka untuk memelihara dan mengutuhkan / mempersatukan Tentara.
- e. Di dalam menghadapi instansi-instansi di luar Angkatan Darat seperti Pemerintah, Parlemen, Jaksa Agung, Partai-partai Politik, maka KSAD selalu pimpinan yang tertinggi Angkatan Darat dengan sendirinya akan mewakili seluruh Angkatan.

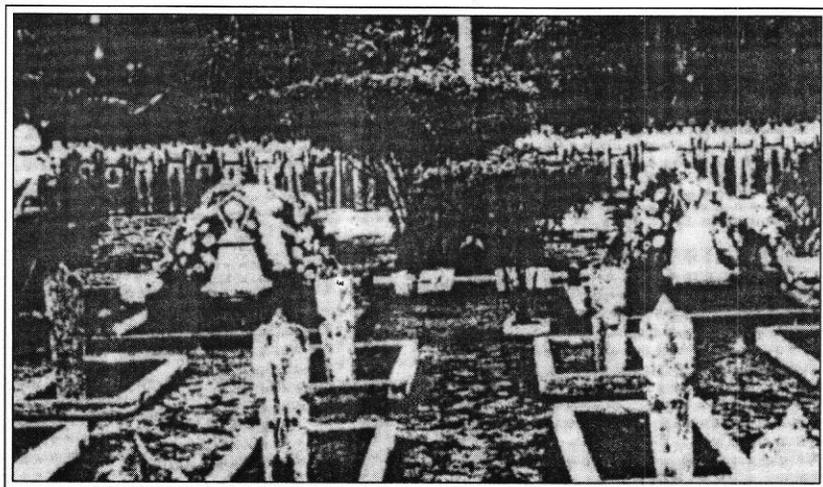


Suasana Rapat Perwira Angkatan Darat tanggal 17 dan 18 Januari 1955 dalam rangka mencari penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952.

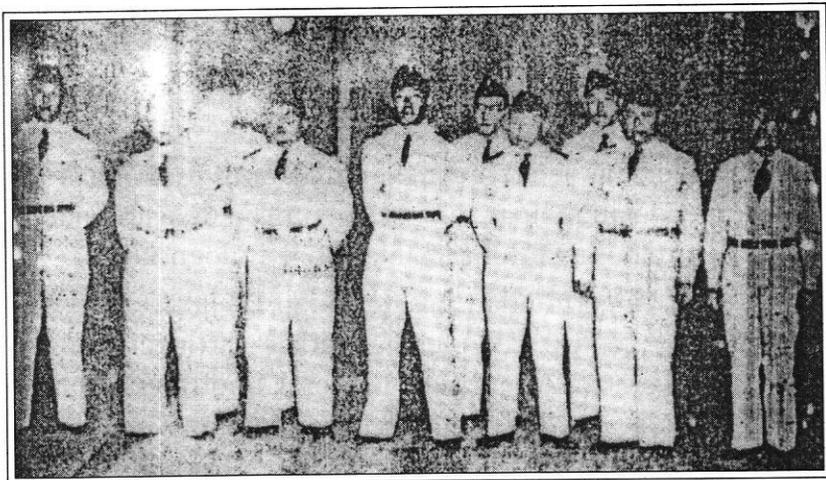
Selain kesimpulan sebagaimana yang disebutkan di atas, rapat lanjutan ditetapkan pada 17 Pebruari 1955, bertempat di gedung Istana Negara Yogyakarta. Pemilihan kota Yogyakarta sebagai tempat konperensi, sesuai dengan arti Yogyakarta dalam sejarah Angkatan Perang di mana kota Yogyakarta adalah tempat yang berhubungan dengan sejarah lahir dan tumbuhnya Tentara Nasional Indoensia.

Sebelum pemerintahan pusat pindah ke Jakarta, Yogyakarta menjadi tempat kedudukan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat. Almarhum Jenderal Sudirman sebagai lambang Persatuan TNI, dipilih menjadi Panglima Besar Angkatan Perang juga di Yogyakarta, dan mulai saat itu pula beliau menetap. Meskipun beliau meninggal di Magelang namun sesuai dengan pesan beliau dikebumikan di Yogyakarta.

Untuk memantapkan hasil rapat dilakukan ziarah ke makam Almarhum Pangsar Jenderal Sudirman dan Pak Urip



Ziarah ke makam Panglima besar Jenderal Sudirman di TMP Kusuma Negara Yogyakarta untuk memantapkan hasil rapat tanggal 17 Februari 1955.



Panitia Rapat Konferensi Keutuhan Angkatan Darat di Yogyakarta tanggal 17 Oktober 1955.

Sumohardjo di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta dengan maksud Jenderal Sudirman yang merupakan Bapak TNI mempunyai arti yang sangat berharga bagi para Perwira yang hendak menyatukan niatnya dalam mewujudkan dan mengabadikan keutuhan TNI. Kehidmatan bersama dalam mengenang Almarhum dari dekat akan lebih mendalami rasa persatuan.

Panitia persiapan diketuai oleh KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng dengan dibantu oleh beberapa orang Perwira yang terdiri dari Kolonel Zukifli Lubis, Kolonel Suprpto, Kolonel Bambang Supeno, Letkol Sutoko, Letkol Sapari, Letkol Guritno, Letkol S. Parman, Mayor Waluyo dan Mayor Suyono Ongko.

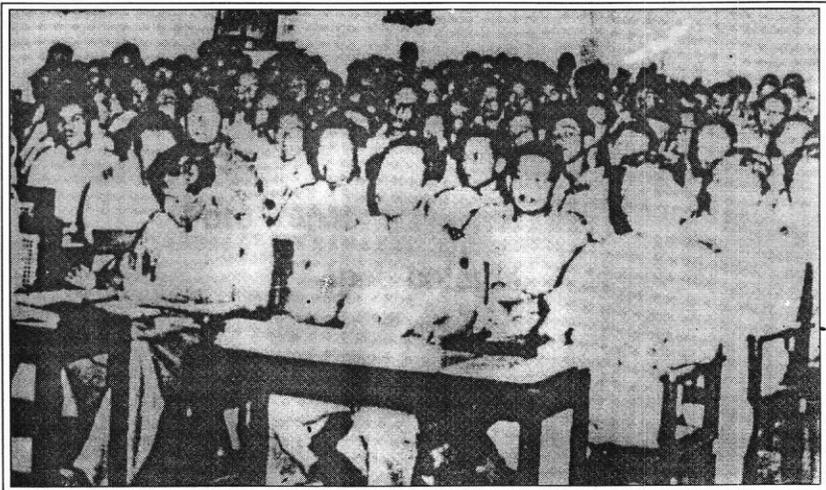
Dalam konperensi tersebut dihadiri sebanyak 289 orang Perwira, dengan tidak melihat pihak kontra dan pro Peristiwa 17 Oktober 1952.

Dalam programnya Jenderal Mayor Bambang Sugeng selaku penanggungjawab keutuhan Angkatan Darat melalui

konperensi Yogya mengemukakan, agar peserta rapat di dalam memberikan tanggapan-tanggapan, saran-saran dan lain-lain didasarkan kepada : Hati yang tulus ikhlas, sifat taat dan patuh, dan Jiwa keutuhan yang harus melahirkan jiwa persatuan dan kesatuan.

Selain itu KSAD juga, mengajak kepada peserta rapat agar :

- a. Memusatkan penyelesaian-penyelesaian persoalan Angkatan Darat kepada Dwi Tunggal (Presiden dan Wakil Presiden), karena menurut KSAD, Dwi Tunggal merupakan lambang keutuhan dan persatuan, berdiri di atas segala partai dan golongan, merupakan lambang pusat kekuasaan dan sebagai pemimpin rakyat.
- b. Para Perwira di dalam menentukan tanggapan, saran, harus menjadi pegangan untuk perkembangan Angkatan Darat di masa depan.



Rapat Colegiall pembagian Seksi Keutuhan dan Persatuan Angkatan Darat di Yogyakarta tanggal 17 Februari 1955.

Setelah penyampaian prasaran dari para Perwira dalam rangka mendapatkan kesimpulan saran-saran dari masing-masing masalah, pada tanggal 21 Pebruari 1954 diadakan rapat kolegial pembagian seksi sesuai dengan pembahasan permasalahan seperti yang meliputi : Keutuhan dan persatuan Angkatan Darat, Penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952 dan Pembangunan Angkatan Darat.

Secara lengkap pembagian seksi-seksi adalah sebagai berikut :

Seksi I

Membidangi : Keutuhan dan Persatuan Angkatan Darat terdiri dari :

Ketua : Kolonel Dr. Azis Saleh, dan Anggota terdiri dari Kolonel Sudirman, Letkol Sukardi, Letkol Kretarto, Letkol Yunus Anis, Letkol Minggu, Letkol Sarumpaet, Letkol Padmo Saputro, Mayor Hasan Kasim, Mayor Kartijo, Mayor Slamet Ali Yunus dan Lettu Aris Mudakar.

Seksi II

Membidangi : Penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952 terdiri dari :

Ketua : Kolonel M. Simbolon dan Anggota yang terdiri dari Kolonel YF. Warrow, Letkol Ajie Ibrahim, Letkol Gani, Letkol S. Parman, Letkol MY. Prayogi, Letkol Rukman, Letkol Sambas, Letkol Surahman, Mayor Jukhro, Sumitradilaga, Mayor Bargowo, Mayor Hartoyo, Mayor Mashudi, Mayor Muhammad Mayor Rusman, Mayor Singgih, Mayor Suyono Ongko, Mayor S. Cokrodipura dan Kapten Marsudi.

Seksi III

Membidangi : Pembangunan Angkatan Darat terdiri dari :

Ketua : Letkol Dr. Sujono dan Anggotanya terdiri dari: Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Bambang Supeno, Kolonel Suprpto, Kolonel A.E. Kawilarang, Letkol Basuki Rakhmat, Letkol Ibnu Subroto, Letkol MMR. Kartakusumah, Letkol Mursito, Letkol Sarbini, Mayor Akhmad Tirtosudiro, Mayor Soleh, Mayor Sueb, Mayor Sukarto, Mayor Wahyuhuyogo, Mayor Wiyono, Kapten YZ. Arifin dan Kapten Suparjo.

Rapat Colegiall seksi-seksi berlangsung sampai dengan tanggal 24 Pebruari 1955, dan berhasil memecahkan, menimbang dan menyimpulkan saran-saran ketiga masalah pokok konperensi.

Setelah mendapatkan pengesahan dari KSAD, hasil rapat Colegiall dijadikan hasil keputusan dari konperensi para Perwira Angkatan Darat Yogyakarta.

Sebagai bukti telah dicapainya kembali keutuhan di lingkungan Angkatan Darat melalui konperensi Yogya, maka diciptakanlah suatu "*Piagam Keutuhan*". Atas nama seluruh prajurit TNI AD dengan bulat hati mengucapkan janji, persatuan dan kesatuan.

7. Piagam Keutuhan Angkatan Darat

Penandatanganan Piagam Keutuhan dilakukan pada tanggal 25 Pebruari 1955 di Gedung Negara (Gedung Agung) dengan upacara yang penuh hikmat, dan spesifik serta mengandung arti simbolik, dihadiri oleh Presiden / Panglima Tertinggi, Wakil Presiden, Ketua DPR, Perdana Menteri dan

beberapa menteri lainnya, Kasal, Kasau serta para pejabat lainnya.

Ketika jarum jam menunjukkan tepat pukul 20.30 lampu-lampu ruangan dipadamkan, masuklah pembawa "Piagam Keutuhan", Mayor Sumantri dengan diapit dua prajurit Angkatan Darat pembawa obor penerang menuju sebuah meja yang dipersiapkan untuk penandatanganan. Dengan menghadap penuh kepada Panji-panji Angkatan Darat "Kartika Eka Paksi", KSAD Jendral Mayor Bambang Sugeng membacakan "Piagam Keutuhan". Selesai dibacakan, Piagam Keutuhan ditandatangani diiringi bunyi roppel. Penandatanganan usai, dikumandangkan "Sangkakala Keutuhan Angkatan Darat" ruanganpun menjadi terang benderang oleh sinar lampu yang dinyalakan.

Sangkakala Keutuhan Angkatan Darat, diciptakan oleh Kolonel Bambang Soepeno tanggal 16 Pebruari 1955 dini hari jam 00.30, beserta Komandan Korsik RI-13 (Korem 072 Pamungkas sekarang) Peltu Sarimin Rasmojo.

Nada Sangkakala melukiskan irama kesedihan penuh keharuan, melambangkan kesedihan yang dirasakan oleh prajurit-prajurit TNI AD, akibat keretakan yang telah timbul. Mendadak sontak irama berubah merefleksikan kebanggaan serentak, menggambarkan kembalinya daya keutuhan pribadi sendiri, gembira bergelora, bersemangat, siap sedia, setelah bertemunya hati, perasaan dan pikiran dari seluruh Perwira Angkatan Darat.

Demikian kegigihan dan keuletan KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di jajaran Angkatan Darat.

Biarpun dalam prosesnya banyak tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi tetapi tekad dan semangatnya

tidak pernah luntur, di dalam mempersatukan para Perwira Angkatan Darat yang sempat kena pengaruh kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan Angkatan Darat dan negara secara menyeluruh.



"Piajam Djogja 55
Gedung Negara
25 Feb. 1955"



Kapat
Pusat Perwira
Angkatan Darat Republik Indonesia

Piagam
Pestakan Angkatan Darat
Republik Indonesia

Para para Insan Angkatan Darat Republik Indonesia, yang karena kebakti dari
sebab yang Maha Kuasa dengan dikehendaki oleh:
Pestakan Angkatan Darat? "Kapat" Pusat Perwira Angkatan Darat,
Pusat Perwira Angkatan Darat, dan Insan Angkatan Darat
Republik Indonesia. Maka berketetapan dan berkeputusan bersepakat
Pestakan Angkatan Darat Republik Indonesia, Kapat Perwira,
dan Para Insan Angkatan Darat Republik Indonesia,
berketetapan sama bersepakat pada tanggal 25 Februari 1955 di Yogyakarta, telah ber-
sepakat dan berkeputusan sebagai berikut:

1. Angkatan Darat Republik Indonesia adalah sebagai satu kesatuan dan terdapat
tersebut terdapat dan terdapat dan terdapat yang tidak terpisahkan digambarkan
kepada Angkatan Darat, Mada dan berkeputusan untuk memelihara Nama dan Dignitas
kepada setiap anggota Angkatan Darat Republik Indonesia yang telah dan
oleh berkeputusan dan berkeputusan dan berkeputusan dan berkeputusan Angkatan
Darat Republik Indonesia.
2. Para Insan Angkatan Darat Republik Indonesia berkeputusan berkeputusan
dan berkeputusan dan berkeputusan berkeputusan berkeputusan berkeputusan
kepada setiap anggota Angkatan Darat Republik Indonesia.
3. Para Insan Angkatan Darat Republik Indonesia berkeputusan berkeputusan
kepada setiap anggota Angkatan Darat Republik Indonesia.
4. Para Insan Angkatan Darat Republik Indonesia berkeputusan berkeputusan
kepada setiap anggota Angkatan Darat Republik Indonesia.
5. Para Insan Angkatan Darat Republik Indonesia berkeputusan berkeputusan
kepada setiap anggota Angkatan Darat Republik Indonesia.

Yogyakarta, 25 Februari 1955.
Jenderal Perwira
Angkatan Darat Republik Indonesia
Jabawa
Bambang Sugeng
(Rendek Merau Bandung Djogja)
M 10001

KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng membacakan Piagam Keutuhan Angkatan Darat di Yogyakarta, 25 Februari 1955.

Selama proses penyelesaian permasalahan Angkatan Darat itu, KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng selalu bertindak demokratis, dengan selalu meminta saran, tanggapan, dari para Perwira-perwira lainnya terutama dari Perwira seniornya. Sifat loyal juga melekat pada dirinya, biarpun pada awal kepemimpinannya sebagai KSAD berbeda faham dengan pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan di Angkatan Darat tetapi dalam usaha penyelesaian masalah Angkatan Darat berikutnya tetap memusatkan penyelesaian itu kepada Dwi Tunggal (Presiden dan Wakil Presiden) sebagai lambang keutuhan dan persatuan.*

Bab 5

MENGEMBAN TUGAS DUTA BANGSA

1. Meninggalkan Angkatan Darat

Jenderal Mayor Bambang Sugeng semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang berpenampilan sederhana. Sederhana dalam berbicara, sederhana dalam berpakaian, yaa sederhana dalam segalanya. Kesederhanaan itu ia warisi dan berkat didikan kedua orang tuanya yang dijadikannya sebagai pegangan hidup dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara di samping keberanian dan kejujurannya.

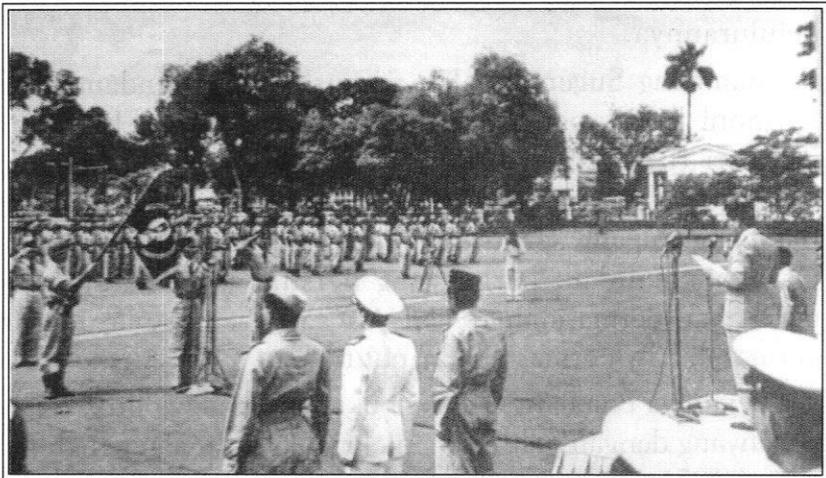
Bambang Sugeng adalah manusia yang mendambakan harmoni kehidupan, sifat dan wataknya selalu berusaha mencari titik temu, di tengah pandangan yang berbeda bahkan bertentangan. Karena sifat dan wataknya itu, Bambang Sugeng semasa menjabat Kepala Staf Angkatan Darat memainkan peran yang bersifat khas dalam permasalahan-permasalahan TNI AD yang bercampur dengan permasalahan-permasalahan politik.

Sejatinya Bambang Sugeng bukanlah orang politik, tetapi ia kenyang dengan politik. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 1971, ditanya tentang politik secara singkat ia hanya menyatakan "*Saya sudah kenyang politik*". Dan ketika ditanya siapa yang akan dipilihnya dalam pemilu yang akan datang,

dia hanya berkata bahwa Pemilihan Umum yang akan dihadapi ini tidak umum, dalam arti yang seluas-luasnya "*Tidak sebebas yang dulu*". Memang, selagi menjabat Kepala Staf Angkatan darat, Bambang Sugeng adalah orang yang tidak bisa menjadi umpan politik.

Setelah Kolonel A.H Nasution menyatakan mundur sebagai KSAD akibat peristiwa 17 Oktober 1952, sebagai perwira senior dan karena pembawaan sifat-sifatnya, Kolonel Bambang Sugeng diangkat sebagai KSAD. Dengan sekuat tenaga ia berusaha mempersatukan kerukunan kembali dalam tubuh Angkatan Darat.

Karena kejujuran hatinya dan tekadnya yang kuat, Bambang Sugeng berhasil menyembuhkan luka-luka dalam tubuh Angkatan Darat. Hanya sebentar reda pertentangan itu, kembali muncul intrik-intrik, hasutan dan fitnah untuk memecah belah Angkatan Darat. Bambang Sugeng masih berusaha sekuat tenaga dan jiwanya menghadapi godaan-



Dalam suatu Upacara Militer Mayor Jenderal Bambang Sugeng diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatan KSAD terhitung mulai tanggal 8 Mei 1955.

godaan perpecahan dari dalam dan tekanan-tekanan dari luar. Tekadnya yang kuat dan niatnya yang bersih tidak sanggup lagi menghadapi cobaan-cobaan itu. Mental Jenderal Mayor Bambang Sugeng tidak kuat lagi menghadapi tekanan dalam Angkatan Darat yang dipimpinya, hatinya yang bersih mulai patah.

Sebagai seorang yang patah hati dia kehilangan gairah dan semangat, ia meninggalkan Angkatan Darat. Sebagai prajurit Sapta Marga ia mencoba menyelesaikan sesuai dengan kemampuannya, fisik, mental dan spiritual, tetapi tugas yang dipangkunya selama ini terlalu berat baginya.

Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI No : 117 / M / tahun 1955 tanggal 13 Mei 1955, terhitung mulai tanggal 8 Mei 1955 Bambang Sugeng diberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri dari jabatan KSAD.

Bambang Sugeng meminta berhenti sebagai KSAD tahun 1955 dengan mengajukan permohonan sebanyak 5 kali kepada Presiden Sukarno karena adanya perbedaan yang tidak bisa dijembatani lagi. Bagi Bambang Sugeng, pertimbangan politik berbeda dengan pertimbangan ketentaraan. Karena prinsipnya itu, ia tidak sejalan dengan Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri tentang penyelesaian akibat "Peristiwa 17 Oktober 1952". Sebab dalam pandangannya Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah hasil dari "Petualangan Politik",¹ DPR terlalu jauh ikut campur dalam urusan intern TNI AD. Sedangkan bagi Iwa Kusuma Sumantri, selaku Menteri Pertahanan Negara RI merasa berkepentingan langsung untuk menempatkan orang-orang yang sepihak dengannya di dalam struktur organisasi TNI AD.

¹ Tempo, No. 3 Tanggal 20 Maret 1971.

2. Duta Besar Manca Negara

Mengingat pengabdian Bambang Sugeng yang senantiasa penuh kesetiaan terhadap nusa dan bangsa, maka pemerintah meminta kesediaannya mewakili Negara Republik Indoneisa sebagai Duta Besar. Reputasi kepemimpinannya, kapasitasnya sebagai mediator dan dialog diplomatis yang ia miliki memenuhi persyaratan untuk ditempatkan menjadi Duta Besar. Karena kemampuan yang Bambang Sugeng miliki mengantarkannya sebagai prajurit TNI pertama yang dikaryakan (Dwi Fungsi) menjadi diplomat (Duta Besar) di manca negara.

Pada awal Bambang Sugeng menjabat Duta Besar RI, pemerintah Indonesia di bawah Perdana Menteri Ali Sastro Amidjoyo yang memiliki kebijakan luar negeri: *“Kerjasama dengan golongan Negara-negara Asia-Afrika yang ditunjukkan untuk memperkuat usaha kearah tercapainya perdamaian dunia yang kekal.”*² Politik Luar Negeri yang digariskan yaitu politik Luar Negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan yang menuju kearah perdamaian dunia, politik kearah kerjasama yang erat antara negara-negara Asia-Afrika dan politik bertetangga yang baik”.

Penjabaran dari politik luar negeri tersebut oleh Bambang Sugeng selama menjabat Duta Besar di Eropa, Asia dan Amerika Latin diterapkan dengan konsep diplomatik bilateral yang baik, sehingga terjalin kerjasama yang erat dari negara-negara sahabat, sekaligus mendukung terhadap kebijakan-kebijakan RI di dunia internasional khususnya dalam konfrontasi dengan Belanda tentang masalah Irian Barat.

² Deparlu, 25 tahun Deparlu 1945-1970, Panitia Sejarah Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1970.

3. Duta di Vatikan 1956 - 1959

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.385/M tahun 1956 tanggal 1 Agustus 1956 pemerintah mengangkat Bambang Sugeng sebagai Duta RI pada Tachta Suci Vatikan menggantikan Duta DR. Alfian Yusuf Helmi.³

Ketika menjabat Duta RI di Vatikan (Roma), Bambang Sugeng sukses melaksanakan misi diplomatiknya, sehingga dianugerahi (Bintang Kebapaan) *Santo Gregorio* dari Sri Paus ke 23. Bintang tertinggi itu juga diberikan kepada Presiden RI pertama Sukarno.⁴

Pemberian Bintang Jasa tersebut karena dinilai oleh Sri Paus, Bambang Sugeng berhasil menjalin kerjasama yang



Presiden Soekarno melantik Bambang Sugeng menjadi Duta R.I. pada Tachta Suci Vatikan 1 Agustus 1956 di Istana Negara.

³ Dokumen keluarga Bambang Sugeng.

⁴ Sinar Harapan 11 Juni 1986.

baik antara RI – Vatikan, juga sukses mengenalkan konsepsi Dasar Negara RI Pancasila⁵ kepada Sri Paus, sehingga terjalin kerukunan hidup antar umat beragama khususnya dalam menata kerukunan hidup beragama di Indonesia (antara Katolik dengan agama lainnya di Indonesia).

Kebijakan yang lain yang menonjol sewaktu menjabat Duta di Vatikan (Roma) yaitu pengamanan kapal perang RI, di mana Duta Bambang Sugeng memerintahkan kepada misi pembelian kapal perang TNI AL yang dipimpin R.E. Martadinata, agar menjaga kapal-kapal perang TNI AL⁶ yang baru dibeli dari Italia, ia juga memerintahkan atase pertahanan (Athas) RI di Roma Ahmad Taher agar menjaga kapal itu dari unsur sabotase PRRI/Permesta⁷. Karena disinyalir akan ada sabotase dari pihak PRRI/Permesta.

4. Duta Besar di Jepang 1960 - 1964

Sesuai Keputusan Presiden Sukarno No.12/M tahun 1960 tanggal 19 Januari 1960 pemerintah kembali mengangkat Bambang Sugeng Duta pada Tachta Suci di Vatikan menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk pemerintahan kerajaan Jepang di Tokyo menggantikan MR. Rudolf Alexander Asmaun.⁸

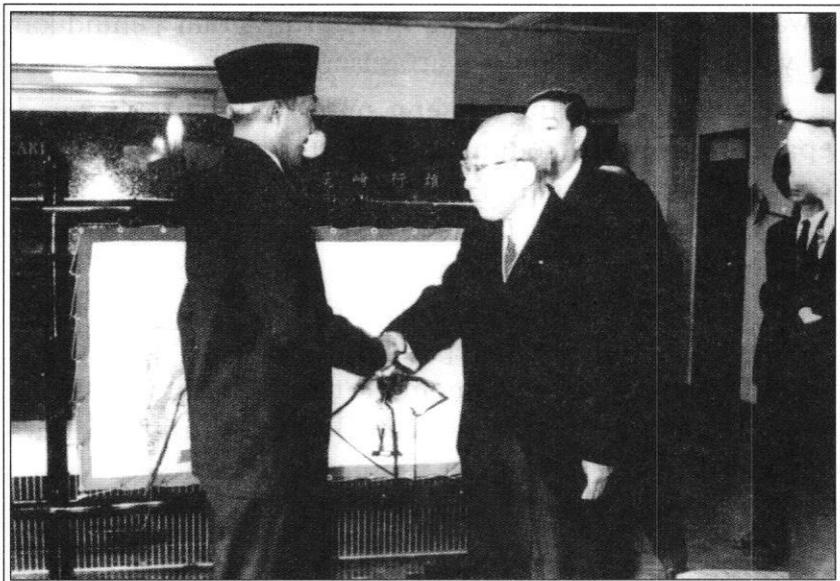
Kebijakan yang menonjol dari Bambang Sugeng sewaktu menjabat Duta Besar RI di Jepang, memperkenalkan budaya, tari, lagu, busana dan bahasa Indonesia di Jepang, melalui lembaga pendidikan Indonesia. Sehingga pemerintah Jepang

⁵ Berita Buana, 26 September 1983.

⁶ Suara pembaharuan 17 September 1991.

⁷ Wawancara 11 Juni 2005.

⁸ Dokumen Keluarga.



Duta Besar RI untuk Jepang Bambang Sugeng dalam suatu kesempatan mengadakan kunjungan kehormatan di Istana Kaisar Hiro Hito Jepang.

simpati terhadap pemerintah Indonesia dan turut mendukung program Asian Games di Jakarta 1962.⁹

Jepang sebagai suatu Negara yang pernah menjajah Indonesia, sesuai dengan konvensi internasional, berke-wajiban memberikan pampasan perang. Bambang Sugeng diperintahkan Presiden Sukarno untuk mengurus pampasan perang tersebut.

Program yang seharusnya dikerjakan 12 bulan, oleh Bambang Sugeng diselesaikan dalam waktu 6 bulan dengan hasil yang memuaskan, sehingga pemerintah Jepang memberikan pampasan perang baik dalam bentuk sumbangan dana pembangunan nasional maupun dalam program-program pendidikan bagi warga negara Indonesia. Salah satu

⁹ Wawancara Keluarga.

siswa yang sekolah di Jepang melalui program pendidikan ini yaitu Bapak Ginanjar Kartasasmita.¹⁰

Sewaktu Bambang Sugeng menjabat Duta Besar di Jepang, Indonesia sedang konfrontasi dengan Belanda tentang status Irian Barat. Bambang Sugeng menerima informasi bahwa kapal induk AL Belanda “*Karel Doorman*” akan merapat di pelabuhan Tokyo untuk mengisi bahan bakar. Mendengar informasi itu, dalam logika pemikiran Bambang Sugeng, kalau Jepang mengizinkan kapal induk Belanda *Karel Doorman* mendarat di pelabuhan Tokyo, berarti Jepang berserikat dengan Belanda musuh Indonesia, berarti Jepang memusuhi dan musuh Indonesia. “*Kawan dari lawan saya adalah lawan saya*”.



Presiden RI pertama Ir. Sukarno, dalam suatu kunjungan kenegaraan ke Jepang 1952.

¹⁰ Wawancara Keluarga.

Segera ia perintahkan pada Ajudan dan keluarganya untuk mengepak semua pakaian dan barang-barang masuk koper untuk dikirim kembali ke Indonesia. Selesai koper-kopernya dikunci Bambang Sugeng dengan berpakaian uniform Jenderal TNI lengkap dengan Bintang dan tanda-tanda jasa, segera mendatangi "Gaimusho", Departemen Luar Negeri Jepang waktu itu. Bambang Sugeng masuk memberi hormat seorang Jenderal, duduk dengan gerak penuh geram sambil berkata dengan lantang: "Yang Mulia Menteri Luar Negeri saya sudah siap membungkus barang-barang saya untuk segera kembali ke Indonesia, bila pemerintah Jepang membiarkan Karel Doorman mendarat di Tokyo, saya anggap itu tindakan permusuhan terhadap negara saya, Negara Indonesia. Kalau demikian misi saya sebagai Duta Besar RI di Jepang telah gagal. Saya sekarang juga meninggalkan Tokyo, Jepang dan kembali ke Indonesia, percuma saya di sini".

Menteri Luar Negeri Jepang kaget dan terheran-heran ia kemudian memberi jaminan dengan menjawab: "Tidak Tuan Duta Besar, Karel Dorman tidak akan mendarat di Tokyo, itu saya jamin"¹¹. Setelah ada pernyataan itu, Bambang Sugeng yakin bahwa Jepang tidak akan memihak Belanda. Kebijakan menteri luar negeri Jepang itupun segera disampaikan kepada pemerintah Indonesia guna mengambil langkah-langkah antisipatif lainnya. Sebab kapal Belanda Karel Doorman tidak akan singgah di Jepang tapi langsung ke perairan Irian Barat.

Sebagai Duta Besar Jepang Bambang Sugeng memiliki ikatan moral yang dalam dengan bangsa Jepang, terkait dengan penyelamatan 553 orang interniran Jepang di Temanggung. Sewaktu menjabat Komandan Resimen TKR

¹¹ Berita Idayu, No.12 tahun 1970, hal 4-6.



Dalam suatu kesempatan usai tennis Bambang Sugeng mengadakan Coffee Morning dengan pejabat Jepang.

di Temanggung, Bambang Sugeng berhasil melucuti dan menawan 553 orang tentara Jepang bagian dari *Nakamura Butai* yang sedang membangun Kubu Logistik di Temanggung yang cukup untuk satu Divisi tempur (15 ribu prajurit) selama 5 tahun yang digudangkan di 7 lokasi.¹²

Atas jasanya itu, Konsul Jenderal Jepang Kunio Kato pada 24 Nopember 1993 berziarah ke makam Bambang Sugeng dan mengusulkan kepada pemerintah Jepang agar memberikan pendidikan dan ketrampilan kepada 5000 pemuda Indonesia dan mengusulkan kepada Japan International Corporation Agency (JICA) agar diadakan tukar menukar wartawan antara RI-Jepang, terutama wartawan Temanggung).¹³

¹² Kedaulatan Rakyat, 9 Pebruari 1984.

¹³ Suara Karya, 26 Oktober 1993.

Penyelamatan 553 prajurit Jepang tersebut, termasuk 30 orang sipil dari pasukan *Yon Migaki Butai* pimpinan Mayor Migaki selalu dikenang para bekas interniran Jepang, mereka membuat sebuah prasasti yang ditulis dengan huruf Kanji berbunyi "*Wampo Daiwa Daigetzu*" yang artinya "*Seloeroeh Doenia Sekeloearga*". Para bekas interniran dan keluarganya hingga kini merasa berhutang budi pada Bambang Sugeng karena pada waktu itu diperlakukan dengan baik.¹⁴

Diungkapkan oleh salah seorang interniran Jepang yang masih hidup Toichiro Kyozowa "*Jangankan dianiaya barang-barang milik kami tidak satupun yang dirusak atau dirampas*".

Sementara itu N. Ikogami bekas interniran lain yang berganti nama menjadi Cakra mengatakan prasasti itu



Duta Besar Bambang Sugeng mendampingi kunjungan KSAD Jenderal AH. Nasution ke Jepang.

¹⁴ Sinar Harapan, 10 Oktober 1985.

adalah satu-satunya prasasti Jepang di Luar Negeri. Dalam prasasti itu ditulis candra sengkala berbunyi "*Pandito Sapto Ngesti Ratu 1877 Saka*", yang berarti : "Hari Kemerdekaan RI 1945 M".

Prasasti tersebut saat ini ditempatkan dalam monumen Bambang Sugeng di Gumuk Godek desa Maduroso Temanggung.

Saat menjabat Dubes di Jepang Bambang Sugeng pernah berpidato yang isinya himbauan kepada putra-putri Indonesia..... "*Pertama-tama hendaknya tiap-tiap warga Indonesia sungguh-sungguh menyadari bahwa ia adalah putra-putri Indonesia penuh dengan kepribadian Indonesia. Kecakapan teknik semata-mata tidak akan berarti dan membawa manfaat, jika manusia Indonesia yang memilikinya tidak sempurna dalam arti sebagaimana saya maksudkan itu...*"¹⁵. Kata-kata tersebut diucapkan untuk menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara dan pentingnya nasionalisme Indonesia senantiasa ditanamkan. Bambang Sugeng memiliki rasa nasionalisme yang tinggi baik saat menjabat KSAD maupun saat menjabat Duta Bangsa. Kecintaannya terhadap Indonesia begitu tinggi, maka wajarlah kalau pemerintah Indonesia menugasinya sebagai Duta Besar.¹⁶

5. Duta Besar di Brazil. 1964-1967

Bambang Sugeng setelah sukses menjabat Dubes di Jepang oleh Pemerintah Indonesia kembali dipercaya untuk menjabat Duta Besar dan berkuasa penuh di Republik Brazilia yang berkedudukan di Rio de Janeiro sejak 1964 hingga 4 November 1966.

¹⁵ Dokumen keluarga.

¹⁶ Idem.



Duta Besar RI untuk Brazilia Bambang Sugeng sedang memberikan amanat pada suatu upacara resmi di KBRI Brazil 1964.

Pada saat menjabat Dubes di Brazilia, di Indonesia terjadi peristiwa G.30.S/PKI, atas inisiatifnya sendiri ia pulang ke Indonesia, tanpa perintah pulang dari Presiden¹⁷. Berkaitan dengan peristiwa G.30 S/PKI Bambang Sugeng pernah dipanggil oleh Pangkoptantib Jenderal Sumitro, yang tercatat bekas anggota Bambang Sugeng, sewaktu menjabat Panglima Tentara dan Teritorium Brawijaya di Jawa Timur.

Bambang Sugeng adalah seorang pejabat yang jujur dan berdisiplin. Selama menjalankan tugas jabatannya ia tidak mau memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Karena kejujuran itu, sekalipun ia bekas pejabat tinggi pemerintah RI dan pernah tiga kali menjabat Duta Besar, ia tidak memiliki kekayaan yang berlebih-lebihan, bahkan rumahnya adalah sebuah rumah

¹⁷ Hasil Wawancara 11 Juni 2005.



Profil sederhana Bambang Sugeng tidak diragukan lagi, kendati dia dekat dengan Presiden RI pertama Ir. Sukarno. (tanda X) Megawati Presiden RI ke 5 waktu kecil.

kecil dan sederhana sekali. Ia jauh dari kehidupan mewah. Orang-orang yang memuja materi menganggapnya bodoh, keliwat jujur. Selain dikenal kejujurannya, juga senantiasa penuh kesetiaan terhadap nusa dan bangsa, sebagaimana Jenderal Mayor Bambang Sugeng lukiskan dalam kata-kata indah puisinya, ketika menjabat Duta Besar di Brazil yang ditulis dalam bahasa Perancis dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

TERRA

Não me fales
De PARAISO
Não me fales
De INFERNO.
Que significam ? ...

PURAS ILUSÕES,
Repletas de VAZIO.

EMBORA

Queira eu morrer;

ACASO

Um milhar de vêzes, POREM

Preciso de RENASCER,

De vêzes um milhão,

SEMPRE e SEMPRE DE NOVO

Neste mundo que é meu ...

MEU PARAISO,

MEU INFERNO,

diáfano e real:

Chamado

I N D O N E S I A !

TANAH AIR

Jangan Kau Cerita

Tentang Sorga.

Jangan Kau Cerita.

Tentang Neraka.

Apa Artinya....?

Khayalan Belaka,

Bertabur Kehampaan.

Sesungguhnya

Kuingin Aku Mati;

Mungkin

Beribu Kali. Tetapi

Kuingin Dilahirkan Kembali

Sejuta Kali Lagi,

Selalu Dan Selalu Kembali
Di Dunia Milikku Ini

Sorgaku,
Nerakaku,
Fana Dan Nyata
Bernama
I n d o n e s i a.

Bambang Sugeng pun mengetahui keadaan dan posisi dirinya. Suatu ketika muncul bisikan halus dalam dirinya: *"Hai Bambang Sugeng, engkau ini Duta Besar yang sial, malang, setiap diplomat harus mengecap setiap jenis kehidupan di negeri di mana ia ditempatkan"*. Tetapi tetap saja bisikan itu ia tepisnya. Bambang Sugeng tetap tegar dalam kesederhanaan dan kejujurannya, sampai ia bawa ke dalam pengabdian terakhir menghadap Tuhannya.*

Bab 6

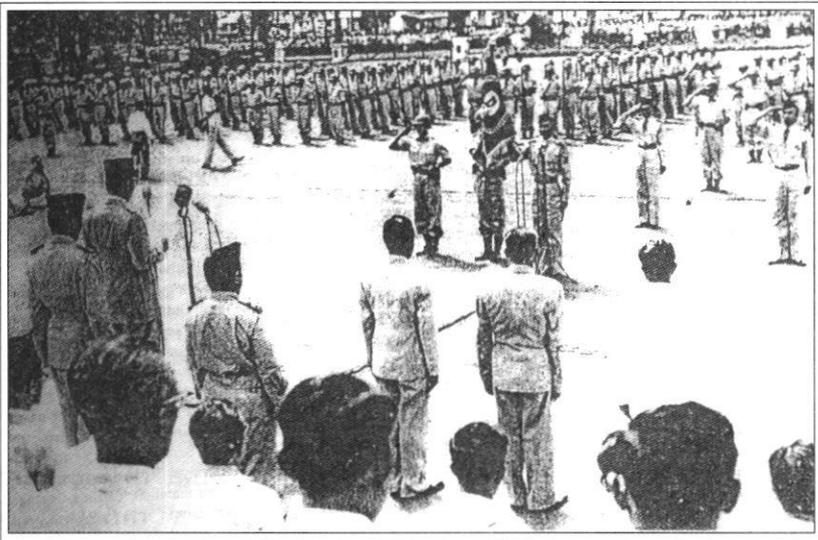
AKHIR PENGABDIAN

1. Masa Purna Tugas

Dalam suatu upacara yang penuh hidmat di Gedung Agung Yogyakarta, Istana Kepresidenan, tanggal 25 Pebruari 1955 Piagam Keutuhan Angkatan Darat ditandatangani, sebagai pertanda berakhirnya kemelut dalam tubuh Angkatan Darat. Berarti pula, masalah 17 Oktober 1952 yang terkatung-katung selama lebih kurang 28 bulan selesai, sehingga masalah yang semula mungkin menjadi batu penarung bagi persatuan nasional telah dapat diatasi.

Sekalipun di dalam tubuh Angkatan Darat telah terjadi penyelesaian yang baik dengan dicapainya Piagam Keutuhan, tidaklah demikian halnya antara Angkatan Darat dengan Pemerintah tetap saja belum ada kesepakatan pendapat dalam penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952. KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng selaku pemrakarsa piagam keutuhan dan telah berusaha dengan segala daya dan tenaga menyelesaikan permasalahan-permasalahan Angkatan Darat kecewa berat, karena merasa perjuangannya sia-sia dan mendapat tantangan justru dari pemerintah.

Oleh karena itu KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng akhirnya mengajukan permohonan kepada pemerintah agar dibebaskan dari jabatannya sebagai KSAD.



Jenderal Mayor Bambang Sugeng berhenti dari jabatan KSAD.

Dengan adanya permohonan tersebut, pemerintah kemudian membahas persoalan tersebut dan akhirnya dalam Sidang Kabinet tanggal 11 Mei 1955 diputuskan bahwa permohonan berhenti Jenderal Mayor Bambang Sugeng diterima dengan baik oleh pemerintah.

Dengan diterimanya permohonan tersebut, maka terhitung tanggal 8 Mei 1955 berakhirlah karier Jenderal Mayor Bambang Sugeng dalam bidang kemiliteran dengan mendapat hak pensiun sebesar Rp.522,-.

Setelah Bambang Sugeng mengakhiri jabatannya dalam lingkungan Angkatan Darat, kemudian dipercaya pemerintah untuk memegang sebagai Duta Besar di beberapa Negara yakni di Vatikan, Jepang dan Brazilia. Dialah yang memulai tradisi karier diplomasi bagi tokoh-tokoh militer yang telah dimatangkan dalam pengalaman mereka dalam jabatan-jabatan ketentaraan. Pada tahun 1966 pemerintah memanggil pulang kembali Jenderal Mayor Bambang Sugeng

dari Brazilia ke Indonesia. Atas dasar Surat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor R / 0281 / 66 tanggal 20 Agustus 1966, Menteri / Panglima Angkatan Darat pada tanggal 3 Oktober 1966 memberhentikan Jenderal Mayor Bambang Sugeng dari jabatannya sebagai Duta Besar dan mengangkatnya sebagai Perwira Tinggi diperbantukan Menteri/Panglima Angkatan Darat, setelah itu dia memasuki masa pensiun.

Tidak banyak yang terdengar mengenai Bambang Sugeng dalam tahun-tahun terakhir hidupnya setelah dia dikembalikan dari pos-pos diplomatiknya dan menetap kembali di Indonesia. Sejak beberapa waktu fisiknya telah mengalami kemunduran berhubung dengan penyakit yang diidapnya. Namun setiap orang yang bertemu Bambang Sugeng masih melihat bahwa semangat perjuangannya tidak pernah padam, tetap hidup. Untuk mengisi waktu dan juga untuk mengembangkan bakat menulis agar dapat menyegarkan ingatannya sesekali dia menulis berbagai artikel dan dimuat di surat kabar Harian Merdeka.

2. Pengabdian Terakhir Bambang Sugeng

Pada awal tahun 1977 Bambang Sugeng mulai menderita sakit paru-paru. Pada bulan Juni 1977 penyakitnya kambuh dan semakin parah, sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Karena parah penyakitnya, untuk berbincang-bincang sudah sukar, pernafasannya sudah dibantu dengan alat pernafasan buatan. Baiknya hubungan beliau dengan masyarakat dan teman-temannya, menyebabkan banyak handai taulan dan familinya yang menjenguk.

Makin hari penyakitnya semakin parah dan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 1977 jam 21.00 ia dipanggil oleh Tuhan

Yang Maha Kuasa untuk menghadapNya. Dengan berpulangNya Bambang Sugeng untuk selama-lamanya. Bangsa Indonesia telah kehilangan salah seorang tokoh yang telah ikut memberikan andilnya secara langsung dalam perjuangan mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia.

Sesuai dengan pesannya, Bambang Sugeng di makamkan di Kranggan Temanggung Jawa Tengah, di tepi kali Progo tidak jauh dari rumah kediaman keluarga dari pihak ibunya,



Presiden Suharto berdo'a di depan jenazah Jenderal Mayor Bambang Sugeng saat disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta.



Presiden Suharto mengalungkan Bintang Dharma kepada Ny. Bambang Sugeng sebagai penghargaan atas jasa-jasa Jenderal Mayor Bambang Sugeng.

dimana dalam perang kemerdekaan di tempat itu telah berlangsung pertempuran yang sengit antara para pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia melawan pasukan penjajah Belanda.

Dari rumah sakit jenazah dibawa ke rumah kediamannya di jalan Surya No.6 Kebayoran Baru. Untuk penghormatan terakhir diadakan kebaktian secara Kristen oleh Pendeta Kaligis dari Gereja Effatha. Hadir juga pada kebaktian itu teman-teman seperjuangannya antara lain, Menhankam Pangab Jenderal TNI Panggabean, Wapangab Jenderal TNI Soerono. Kasad Jenderal TNI Makmun Murod, mantan Kasad Letjen TNI (Purn) DR. TB. Simatupang, mantan Kasal Laksamana TNI Subiyakto, Jenderal TNI AH. Nasution, mantan Kapolri Jenderal Pol. Sucipto Yudodihardjo. Kol (Purn) Alex Kawilarang, Pendeta W.I Rumarti, Pendeta Leinia dan handai taulan serta kerabat lainnya.

Sebelum diberangkatkan menuju Yogyakarta melalui pelabuhan udara Halim Perdana Kusuma, terlebih dahulu disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat untuk menerima penghormatan terakhir. Presiden Soeharto hadir melayat, demikian juga Kapolri Jenderal Pol. Widodo Budidarmo, Pangkostrad Mayjen TNI Leo Lopulisa, para pejabat teras Markas Besar Angkatan Darat (Mabad) beserta sejumlah Perwira Menengah.

Upacara pelepasan jenazah dari Mabad dipimpin oleh Kasad Jenderal TNI. Makmun Murod sebagai inspektur upacara. Sewaktu jenazah tiba di Temanggung disambut masyarakat dan pejabat pemerintah setempat dengan cucuran air mata terutama dari pihak keluarganya.

Jenazah dimakamkan dengan upacara militer dengan Inspektur Upacara Jenderal TNI Soerono dan hadir saat itu selain teman-teman seperjuangan beliau, juga rakyat



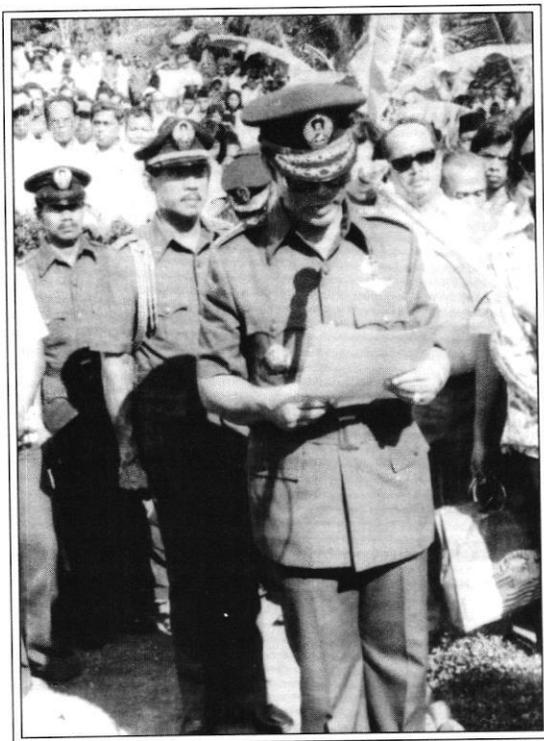
Ucapan pelepasan Jenazah dari Mabad.



Jenazah Bambang Sugeng tiba di Pangkalan Udara Adi Sucipto Yogyakarta disambut dengan Upacara Militer.



Pada Upacara Pemakaman Jenderal Mayor Bambang Sugeng di Temanggung. Kasad Jenderal Makmun Murod dan Pangdam Diponegoro Mayor Jenderal Yasir Hadibroto mendampingi jenazah.



Inspektur Upacara Jenderal TNI Surono sedang memberikan sambutannya pada Upacara Pemakaman Jenderal Mayor Bambang Sugeng di Temanggung.

sekitar Temanggung yang ingin menyampaikan penghormatan terakhir kepada salah satu pahlawan bangsa dan Negara Indonesia. Itulah "Pengabdian Terakhir" Bambang Sugeng, dan sesungguhnya akhir pengabdian dari setiap pejuang bahkan semua manusia adalah memenuhi panggilan Tuhan untuk menghadapNya dialam lain yang sifatnya kekal tiada berakhir.

Selama pengabdiannya kepada bangsa dan negara almarhum Jenderal Mayor Bambang Sugeng telah memperoleh 10 buah tanda jasa dari pemerintah yaitu Bintang

Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi I, Bintang Gerilya, Bintang Sewindu, Satya Lencana Perang Kemerdekaan I dan II, Satya Lencana Gom I dan IV, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun dan Satya Lencana Penegak, bintang kebapaan (Santo Gregorius dari Sri Paus), bintang Mahaputra Pradana dari Presiden Suharto.

Sebagai penghargaan atas jasanya yang telah disumbangkan dalam pengabdian terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1997 Pemerintah memberikan pangkat kehormatan setingkat lebih tinggi kepada Jenderal Mayor Bambang Sugeng menjadi Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 50/ABRI/1977 tanggal 23 Oktober 1997 yang ditetapkan di Jakarta oleh Presiden RI Soeharto.

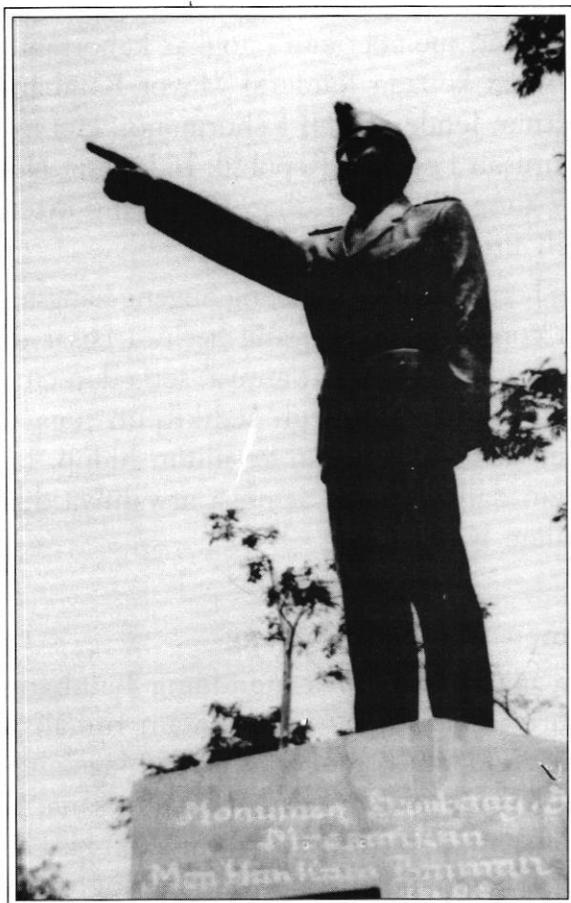
Dengan berpulangnyanya Bambang Sugeng bangsa Indonesia kehilangan contoh manusia yang berjiwa besar dan sederhana, setia kepada kawan-kawannya, setia dan cinta kepada tanah airnya, tidak mengeluh sedikitpun juga walaupun dihimpit berbagai cobaan dan kesulitan hidup. Ia manusia yang beriman dan tawakal. Semoga arwahnya dilapangkan Tuhan di alam baka.

3. Monumen Bambang Sugeng

Semasa masih hidupnya mendiang Bambang Sugeng mempunyai cita-cita dapat membangun rumah walaupun kecil di bukit Godek di tepi jalan raya Magelang-Temanggung, untuk menghabiskan masa tuanya di sana. Keinginan itu dilandasi suatu harapan, setiap saat akan bisa menikmati keindahan pemandangan gunung Sumbing dan Sindoro. Sayang keinginan tersebut tidak terkabul.

Setelah Bambang Sugeng tiada, salah seorang iparnya Harijadi memiliki gagasan untuk mewujudkan keinginan Bambang Sugeng yang belum terkabul tersebut. Gagasan itu disampaikan kepada Kolonel (Pur) Bambang Purnomo, adik mendiang Bambang Sugeng. Tetapi bukan rumah yang ingin didirikan di sana, melainkan monumen.

Ide Harijadi disambut Kolonel Bambang Purnomo : “wah.....kuwi angker banget lho mas” (Aduh, itu sangat



Monumen Bambang Sugeng di Bukit Godek.



Batu Prasasti yang merupakan bagian dari fondasi bangunan monumen Bambang Sugeng di Temanggung.

angker lho mas). Dijawab Herijadi : “nanti “Penghuninya” saya pindahkan semua”. Dan monumen yang diangankan adalah monumen Bambang Sugeng.

Sebongkah batu yang diambil dari kali Kuwas terpilih oleh tangan manusia di antara jutaan batu gunung yang berserakan di desa Kranggan Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah dijadikan batu pertama untuk menandai “Monumen Bambang Sugeng”, di bukit Godek, 650 meter di atas permukaan laut. Bukit tersebut terletak di tepian jalur jalan raya antara Kabupaten Magelang dan Temanggung.

Desa Kranggan yang letaknya berbatasan dengan kota Temanggung, termasuk desa makmur yang terbelah oleh aliran kali Progo dan pernah dilintasi hubungan kereta api Magelang Bawang.

Batu yang berukir prasasti itu diletakkan oleh Bupati Temanggung Drs Sri Subagio, di sudut utara tanah galian sedalam satu setengah meter dan lebar 10 meter dan memolesnya dengan adonan pasir bercampur semen. Batu prasasti itu merupakan bagian dari fondasi bangunan monumen, tempat didirikannya patung Bambang Sugeng, pejuang dan pahlawan kemerdekaan yang paripurna.

Peristiwa peletakan batu pertama monumen Bambang Sugeng dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke 38 tanggal 10 Nopember 1983 disaksikan oleh Ny. Istiyah Bambang Sugeng bersama keluarga, eksponen Angkatan 45, para pejabat Pemda setempat, warga masyarakat Temanggung dan pemuda.

Di antara tamu undangan yang hadir terdapat dua orang Indonesia keturunan Jepang yang sejak lama memiliki kewarganegaraan Indonesia. Di masa berkecamuknya Perang Pasifik (Perang Asia Timur Raya), satu diantara orang Jepang itu dikenal dengan nama Naruto Ike Gami, kemudian berganti nama Cokro, menjadi pengusaha besar di Jakarta.

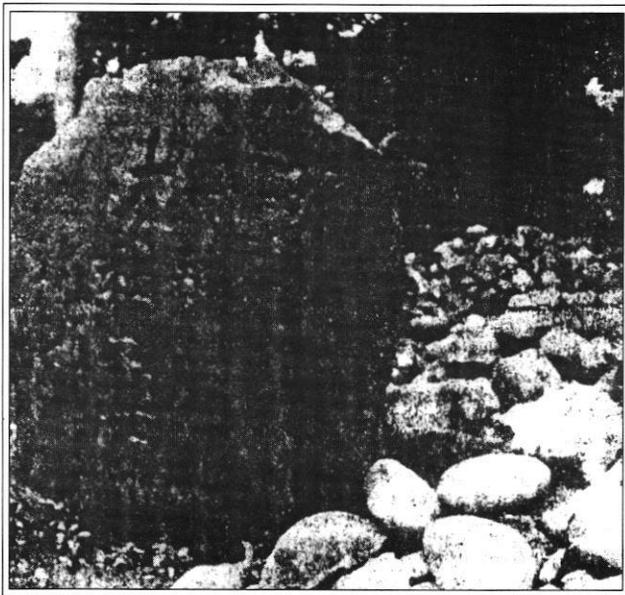
Di masa kekuasaan Jepang Naruto berpangkat Sersan Dua. Setelah Jepang menyerah, bekas Serdadu Jepang itu bergabung di Resimen Bambang Sugeng di Temanggung. Ia termasuk 553 pasukan yang dipimpin oleh Mayor Migaki Shimatoyo, yang berhasil ditawan dan dilucuti Resimen Bambang Sugeng.

Monumen Bambang Sugeng mencakup tiga bangunan pokok antara lain patung diri Bambang Sugeng yang utuh digarap oleh saudara ipar almarhum bernama Harijadi, pelukis dan pematung terkenal.

Di sekitar patung di bangun plaza dengan kelengkapan museum tertutup untuk menyimpan benda bersejarah

kepunyaan almarhum dan pasukan yang pernah dipimpinya. Museum terbuka yang dihiasi relief, pesanggrahan dan dua prasasti itu masing-masing melukiskan ikrar pejuang serta prasasti yang mengisahkan tertawannya 553 orang tentara Jepang oleh pasukan Indonesia dalam bulan Desember 2606 (1946).

Prasasti tersebut diukir pada sebangkah batu selebar 1,5 meter, tinggi 1,6 meter dan tebal 50 Cm. Prasasti terukir dalam bahasa Jepang, dibubuhkan tahun Jawa (Saka) 1877 dan sesanti yang berbunyi "*Seloeroeh Doenia Sekeloearga*". Sesanti itu termasuk universal dan didambakan oleh bangsa-bangsa di dunia sejak lama. Seluruh umat yang ada di dunia ini diharapkan menjadi "*World Citizen*" atau "*Wereld Burger*" menjadi satu keluarga yang hidup dalam suasana damai dan tenteram.



Batu Prasasti yang melukiskan kisah Ikrar Pejuang dan tertawannya 553 tentara Jepang.

Lokasi monumen cukup strategis, menempati areal tanah seluas 4.000 meter persegi yang disediakan pemerintah daerah Temanggung. Patung diri Bambang Sugeng menghadap ke utara, membelakangi Gunung Sumbing, setiap pengunjung monumen diberi kemudahan mengenali perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaannya di museum Bambang Sugeng itu, sekaligus mengenal perjuangan Bambang Sugeng dan pasukannya.

Yang menarik dari serangkaian upaya mengabadikan perjuangan pahlawan paripurna Bambang Sugeng adalah tetap abadinya sebuah bangunan rumah kuno buatan sebelum perang. Rumah tersebut pernah didiami, turun temurun oleh nenek, orang tua dan Bambang Sugeng sendiri.

Rumah bentuk lama itu dilarang dipugar, sehingga bertahan pada aslinya dengan dinding papan dan anyaman bambu, lantainya dari tegel kuno.

Bambang Sugeng memilih tempat pemakamannya di pinggir Kali Progo, di sebidang tanah dekat jembatan, karena ia ingin senantiasa dekat dengan anak buahnya yang gugur akibat keganasan tentara Belanda.

Pada masa Perang Kemerdekaan II, Satuan dari "*Tijger Brigade*" tentara Belanda pimpinan Letnan Satu Van de Zee yang berkuasa di Temanggung, secara kejam membantai para pejuang yang terjebak.

Di tengah jembatan kali Progo yang menghubungkan jalan darat antara desa Kranggan dan kota Temanggung pejuang yang tertangkap Belanda dipenggal kepalanya dengan pedang dan bagian tubuhnya ditendang ke sungai Progo yang mengalir deras.

Cara lain yang lebih kejam lagi dari kelakuan tentara Belanda itu adalah menjadikan para pejuang yang tertawan

sebagai sasaran latihan tembak. Satu persatu dari pejuang yang tertangkap disuruh berdiri di tengah jembatan kereta api yang menghubungkan Magelang – Bawang, terletak di sebelah timur jembatan jalan darat, lalu ditembaknya. Demikian cara penembak mahir dari pasukan “*Tijger Brigade*” mematahkan semangat perlawanan para pejuang.. Jasadnya langsung jatuh ke aliran sungai yang mengalir deras bersamaan dengan lepasnya peluru dari laras karaben berkaliber 7,7 mm.

Perlakuan kejam tentara Belanda itu sampai ke telinga Bambang Sugeng dan membuatnya memiliki keinginan jasadnya kelak dimakamkan di tengah-tengah ribuan anak buahnya yang gugur mendahuluinya saat itu.

Bupati Drs. Sri Subagio, dalam sambutannya seusai peletakan batu pertama antara lain mengatakan, pembangunan monumen tersebut merupakan penghargaan masyarakat Temanggung atas jasa-jasa Bambang Sugeng terhadap bangsa dan Negara. *“Apalagi beliau sebagai putera daerah Temanggung yang telah memberikan suri teladan bagi kita dan berjasa dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, wajib kita hormati dan kita abadikan dalam sanubari setiap warga Temanggung”*.

Pengabdian nama Bambang Sugeng dalam bentuk monumen yang diresmikan oleh Menhankam Jenderal TNI Poniman 8 Oktober 1985, menurut Bupati Drs. Sri Subagio, bukan merupakan kultus individu, tetapi mewariskan nilai-nilai sejarah yang bersifat monumental kepada generasi yang akan datang. *“Dengan peninggalan nilai-nilai sejarah yang bersifat monumental itu, diharapkan anak cucu kita nanti dapat meresapi, menghayati bagaimana sulitnya para pahlawan kusuma bangsa dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah kita capai dengan pengorbanan jiwa,*

raga dan harta benda itu, wajib kita lestarikan dengan jalan mengsisinya lewat berbagai kegiatan pembangunan". Kata Bupati selanjutnya.

Lebih jauh Bupati menegaskan, Bambang Sugeng bukan saja dikenal sebagai patriot, pejuang yang gigih menegakkan proklamasi, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang cinta perdamaian dengan mengutamakan perikemanusiaan. Hal itu juga diakui oleh para tawanan Jepang saat itu., yang merasa diselamatkan bukan saja jiwanya tetapi juga harta bendanya.

Pembangunan monumen Bambang Sugeng tersebut, juga mendapat dukungan dan bantuan dari para warga Jepang yang pernah ditawan di Temanggung. Bantuan tersebut berkat perjuangan Naruto Ikegami alias Cokro yang memberitahukan kepada masyarakat dan pemerintah Jepang sebagai rasa terima kasih atas perlakuan yang manusiawi dari Bambang Sugeng beserta anak buahnya pada masa itu.*

Bab 7

PENUTUP

Jenderal Mayor Bambang Sugeng adalah Prajurit yang telah mengabdikan dirinya bagi Tanah Air, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia anak desa dilahirkan di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah 31 Oktober 1913, dari keluarga sederhana Slamet dan Zahro.

Bambang Sugeng, sebagaimana juga pemuda-pemuda seangkatannya, sejak dari rumah bukanlah seorang yang berdarah militer. Hanya saja ia meneruskan panggilan zamannya sebagai orang muda yang ingin membaktikan segala-galanya bagi perjuangan kemerdekaan tanah airnya.

Dari jabatan pertama yang dipercayakan kepadanya menunjukkan bahwa Bambang Sugeng orang yang memiliki kemampuan yang dapat diandalkan, dari pengetahuan, kepemimpinan maupun dari segi dedikasi dan jiwa patriotisme terhadap bangsa dan Negara.

Jarang sekali terdapat begitu seseorang masuk suatu angkatan perang mendapatkan jabatan yang begitu tinggi, apalagi saat itu tantangan dan rintangan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat berat. Musuh-musuh perjuangan, baik Jepang, Sekutu, Belanda maupun kaki tangannya sangat kuat sehingga untuk memimpin perjuangan diperlukan juga orang-orang yang kuat jiwa, pengetahuan dan kepemimpinannya.

Karier Bambang Sugeng terus menonjol sehingga ia terpilih sebagai KSAD pucuk pimpinan Angkatan Darat. Hal ini membuktikan, bahwa Bambang Sugeng adalah seorang prajurit yang menonjol. Orang yang dipilih untuk jabatan KSAD adalah orang yang benar-benar pilihan. Apalagi manakala Bambang Sugeng terpilih sebagai KSAD adalah pada saat yang benar-benar kritis. Suatu tindakan yang salah bisa menimbulkan suasana lebih kalut lagi.

Berkat kepemimpinan Bambang Sugeng yang baik, bijaksana dan penuh wawasan demi persatuan dan kesatuan TNI AD, dan lebih utama lagi persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara, kemelut itu akhirnya bisa diatasi. Terwujudnya Piagam Keutuhan Angkatan Darat adalah sukses besar seorang pemimpin. Angkatan darat yang semula telah terpecah belah, sehingga akan berdampak besar terhadap keselamatan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, kembali dapat dipersatukan, karena kewibawaan pemimpinnya di samping faktor lainnya.

Sekalipun dinilai berhasil menunjukkan prestasi yang gemilang, tidak menjadikan Bambang Sugeng menepuk dada. Sebagai umat beragama yang taat, Bambang Sugeng menyadari, bahwa prestasinya adalah karunia Tuhan, yang juga dilimpahkan kepada mereka yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya dari pada kepentingan pribadi, keluarga ataupun golongannya. Bukan karya monumental pribadinya.

Itulah Bambang Sugeng, anak desa yang sukses sebagai pejabat tinggi Negara, namun tetap teguh pada jatid dirinya sederhana, jujur dan pemberani. Siapa yang mengenal Bambang Sugeng, merasakan betul kesederhanaan dirinya dalam bicara dan penampilannya. Ia tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh terhadap siapapun. Setiap orang

didekatinya dengan penuh kasih dan hormat. Suaranya senantiasa merendah, sikapnya penuh simpati dan kasih kepada siapapun juga dengan tidak membedakan pangkat atau kekayaan.

Bambang Sugeng dalam pengabdianya kepada bangsa dan Negara, ia curahkan segala tenaga dan pikiran untuk kepentingan bangsa dan Negara. Kepada dirinya dan juga anak buahnya selalu ia tanamkan semangat rela berkorban, berjuang di segala bidang. Kepada anak buahnya ia wariskan tiga butir mutiara sebagai pegangan hidup dalam pengabdianya : Kesederhanaan, Kejujuran dan Keberanian.

Berkali-kali Bambang Sugeng menderita sakit, berkali-kali kekurangan uang untuk membayar biaya perawatan ongkos sakitnya di berbagai rumah sakit. Tetapi ia tidak mengeluh, tidak mengumpat siapaun. Akhirnya kasih Tuhan menjemputnya untuk pengabdian terakhir dihadapannya yang Maha Kekal. Bambang Sugeng tutup usia karena sakit yang dideritanya tanggal 22 Juni 1977, pada usianya yang genap 63 tahun 7 bulan 22 hari.*

B I O D A T A

JENDERAL MAYOR BAMBANG SUGENG

N a m a : Bambang Sugeng
Pangkat : Letnan Jenderal (Kehormatan)
Nrp : 10001
Jabatan terakhir : KSAD
L a h i r : 31 November 1913 di Tegalrejo /
Magelang
A g a m a : Kristen Protestan
Nama Ayah : Slamet
Nama Ibu : Zahro
Nama Isteri : Istiyah
Nama Anak : 1. Endang Rukanika (P) 1940
2. Bambang Herulasykar (L) 1942
3. Bambang Purnomo (L) 1944
4. Bambang Heryanto (L) 1946
5. Hera Tertaningsih (P) 1948
6. Safrisa Cahayani (P) 1951

Pendidikan Umum :

1. HIS (Hollands Indiesche School) di Magelang.
2. MULO (Middelbare Litgebroid Lagere Onderwijs) di Purwokerto.
3. AMS (Algemene Middelbare School) bagian A di Yogyakarta.
4. RHS (Recht Hooge School) di Jakarta.

Pendidikan Militer :

P E T A di Bogor

Kecakapan Bahasa :

Indonesia, Belanda, Inggris

Pengalaman Bekerja :

1. 1939 – Propagandist di daerah Lampung, Sumsel.
2. 1940 – Klerk I Juru Tulis di Kantor Bupati Temanggung
3. 1942 – Cudanco di Magelang
4. 1944 – Daidanco Di Gombong
5. 1945 – Letkol Komandan Resimen di Wonosobo
6. 1946 – Kepala Staf Divisi II/Sunan Gunungjati
7. 1948 – Kolonel, Panglima Divisi III/Jawa Tengah
8. 1948 – Kolonel, Gubernur Militer/ Panglima Divisi III/Div, III/ Kedu, Banyumas, Yogyakarta.
9. 1949 – Kolonel, Kepala Staf Umum AD
10. 1950 – Kolonel, Gubernur Militer / Panglima Divisi/ Jawa Timur.
11. 1951 – Kolonel, Panglima Tentara Teritorium V/ Brawijaya
12. 1952 – Kolonel, Pejabat KSAD
13. 1954 – Jenderal Mayor, KSAD
14. 1955 – Diberhentikan dengan hormat, atas permohonan sendiri.
15. 1955 – Pensiun (TMT Juni).
16. 1956 – Duta Besar di Tahta Suci Vatican.
17. 1960 – Duta Besar di Jepang.
18. 1964 – Duta Besar di Brazilia.

Tanda-tanda Jasa yang dimiliki :

1. Bintang Dharma
2. Bintang Kartika Eka Paksi
3. Bintang Gerilya
4. Bintang Sewindu
5. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
6. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun

7. Satya Lencana Perang Kemerdekaan I
8. Satya Lencana Perang Kemerdekaan II
9. Satya Lencana GOM I, IV
10. Satya Lencana Penegak

*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Deparlu, *25 Tahun Departemen Luar Negeri*. Deparlu, Jakarta, 1970.
- *Kontingen Garuda Indonesia Dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB*, Deparlu Jakarta, 1988.
- Depdikbud, *Sistem Pengendalian Sosial di Jawa Tengah* Depdikbud, Jakarta 1992.
- *Tradisi dan Kebiasaan Makan Pada Masyarakat di Jawa Tengah*, Depdikbud, Jakarta 1997.
- Disjarahad, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI AD*, Disjarahad Bandung, 1972.
- *Sejarah TNI AD 1945 – 1973*, Jilid 2 Disjarahad, Bandung 1979.
- Ditajenad, *Sejarah Ajudan Jenderal TNI AD 1945-1985*, Ditajenad, Bandung, 1989.
- Sagimun MD, *Pahlawan Diponegoro Berjuang*, Gunung Agung, Jakarta 1965.

B. DOKUMEN

- Disjarahad, *Buku Sejarah Dokumenter tentang Peristiwa 17 Oktober 1952*, Disjarahad, Bandung 1975.
- *Buku Dokumenter tentang Mayjen Bambang Sugeng* Jilid 2 Disjarahad, Bandung.

C. MAJALAH

- Vidya Yuda No. 26 Tahun 1977, Disjarahad, Bandung, 1977.

D. SURAT KABAR

Berita Idayu No. 12 Tahun 1976, yayasan Idayu Jakarta, 1976.

Kedaukatan Rakyat tanggal 26 - 1 - 1984, yayasan Idayu, Jakarta

*

PERINTAH SIASAT

No. 4/S/Cop.I.

Diperintah kepada :

1. Lt.Kol Moh. Bachroen, Ctd. Dzerah I.
2. Lt.Kol. Sarbini, " " II.
3. Lt.Kol. Soeharto, " " III.

- Oentoek : 1. Segera mengadakan pertlawanan serentak terhadap Belanda sehebatz-nja, agar timboel pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda, jang dapai menarik perhatian doenia loear, oentoek menjatakan kebohongan keterangaz Belanda, bahwa gerakan mereka telah selesai.
2. Soepaja pada tg. 17 Djanoeari 1949 mengadakan pertlawanan serentak terhadap segala sasaran jg. berada didaerah Paduka Tuan masing2.
Selesai.

Keterangan : Pada saat ini perdjoeangan Indonesia digambarkan oleh Belanda, seolah2 soedah selesai, dan telah dihantjoerkan. Pada oemoemnja doenia loear biasa dipengaruhi oleh perkabaran, bagaimana besarnya kebohongan. Oleh karena kita pada waktoe ini tidak bisa langsoeng berhoeboengan dengan loear negeri, oentoek memberi tahoeakan, kepada mereka kita mesti membuktikan dengan gerakan jang njata, bahwa kekoetaan dan tjara gerakan kita ini mesti sedemikian, sehingga Belanda ta'dapat menjemboenyikannya.

Toedjoean jang dapat kita tjapai maksoed ini ialah antaranja menghalang-halangi penerbangan mereka, dan djoeza mengganggu perdjalananan kreta api mereka. Consequentie dar jang ini ialah, bahwa kita naroes menghantjoerkan, goeria angkoetan jang penting c.q. troepentransport dan djalan jang akan dilaloel oleh penindjau loear negeri.

Dikeloearkan di Stafkwartier

tg. 1-1-1949.

dj. 17.00.

Sesuai dengan aselinja
Secretaries

Panglima Divisi III/Gub.Mil. III.
lt. Kol. B. Soengeng.

Surat Perintah III/G. Mil. III.

P a n g l i m a D i v i s i I I I - R a h a s i a

tanggal: 18/II/1949.

Berkenaan dengan Instruksi Rahasia yang
diberikan kepada Let. Duryah III (Letn. Koln,
Boscharfo), Benteng Men. Agung, Gerakan serangan
besar di dan Terhida, Iwas-Kotik yang akan dilak-
ukakan antara tgl. 25/II-1949 s/d. 1/III/1949
dengan maksud membantu pelaksanaan dari
brigade I.

Dengan ini diperintahkan kepada :

1. Komandan Komando Daerah I.

- Benteng :
1. Pada waktu pelaksanaan gerakan tgl.
25/II/1949 s/d. 1/III/1949 membantu serangan
gerakan serentak terhadap objek-objek
tentara musuh di daerah I
Benteng untuk perhatian kom-
ando dan untuk bantuan benteng
tentara musuh.

2, 3 & 4 s.d. 4.

Ditandatangani di : Padang.

tanggal : 18-12-1949.

di : 20.00.

Surat Perintah III/G. Mil. III.



[Handwritten signature]
Komandan Komando Daerah I

Staf Goebemoer Militer III.
Sangat Rahasia.

Perintah - Siasat
Nomor : 9/PS/49

Kecadaan : 1. Moelai tgl. 1-III-1949 serangan terhadap Iboe-kota telah dimoelai dan oesaha mereboet Iboe-kota akan dilakoekan berkali2.

Kekocatan dari fihak kita meloeloe dari Brigade X, ditambah dng. pasockan2 ketjil dari kesatoean2 lainlainnya.

Bantoean jg. diberikan kepada Brigade X.

1 Cie dari Bat. Sroehardojo Brigade X.

1 Bat. dari Bat. Darjatmo Brigade IX.

2. Berhoeboeng dng. activiteit dari fihak kita, maka Belanda menggerakkan balabantoean dari Semarang dan Magelang (ditaksir 2000 orang lengkap) dan dibantoe dng. Luchtmachnja, schingga druk ke medan Djogja sangat beratnja.

Perintah : Berhoeboeng dng. hal tsb. maka diperintahkan kepada Cdt. Daerah I dan Cdt. Daerah II.

U n t u k : 1. Vernege activiteitnja didaerahnja, teroetama ditoe-djoekan kepada centra dari moesoeh Premboen-Keboemen-Magelang-Semarang westelijk gedeelte-Poerwokerto-Poerbolingo-Karangkobar.

2. Oentoeck daerah W.K. Brigade IX, teroetama verbindingsweg Magelang-Semarang-Djogja. (Dalam hal ini Bat. Panoedjoe ditarik ke Magelang oetara dan Bat. Bintoro verschuiven kearah timoer).

3. Gerakan2 tsb. dilakoekan intensief dalam periode 15-III-1949 hingga 1-IV-1949 dan selandjutnya tetap meloekaskan perlawanan.

4. S e l e s a i.

Dibuat otk.

1. Cdt. Daerah I.

2. Cdt. Daerah II.

Tindakan otk.

1. Staf Divisi III.

2. M.B.K.D.

3. Cdt. Daerah III.

4. Archief.

Diboeat di tempat.

Tanggal : 15-III-1949.

Dj a m : 12.00.

Panglima Divisi III/G.M. III.

(Kolonel Bambang Soegeng)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 50 / ABRI / 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

dst.
dst.
dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan pangkat kehormatan setingkat lebih tinggi kepada para Pati Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut dalam lampiran Keputusan Presiden ini, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom 6, sebagai penghargaan atas jasanya yang telah disumbangkan dalam pengabdian terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Dengan catatan :

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN :
dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan/ahli warisnya untuk diketahui dan diindahkan.

Ditapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 1997.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
nd.

SOEHARTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 50 / ABRI / 1997
TANGGAL : 23 OKTOBER 1997

NO. URUT	NAMA	KORPS NRP	PANGKAT			TERHITUNG MULAI TANGGAL	KETERANGAN
			LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	
J.	BAMBANG SUGENG	TNI-AD 10001	MAYOR JENDERAL TNI ANUMERTA	LETNAN JENDERAL TNI KEHORMATAN	1-11-1997		

UNTUK PETIKAN :

dengan aslinya
KORPUS MILITER PRESIDEN



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SOEHARTO

Djakarta, 9 Maret 1967.

**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

MEMINBANG : bahwa berhubung dipindahkannya ke Djakarta R. BAMBANG SOEGENG, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Brasil Serikat berkedudukan di Rio de Janeiro, dianggap perlu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari Rio de Janeiro ke Djakarta;

- MEINGINGAT :**
1. Undang-Undang No. 21 tahun 1952;
 2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
 3. P.G.P.N.-1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 201 tahun 1961;
 4. Surat putusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSU dan tanggal 7 Mei 1956 No. 92613/BSU Jo. surat tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSU dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSU;
 5. Surat putusan kami tanggal 5 Djuni 1965 No. SP/39/PLN/65 & SP/40/PLN/65;
 6. Surat putusan kami tanggal 29 Djuni 1964 No. SP/47/PL/II/64;
 7. Surat Putusan Presiden No. 28 tahun 1964;
 8. Kawat kami tanggal 3 September 1966 No. 2766/66;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari Rio de Janeiro ke Djakarta;

R. BAMBANG SOEGENG.

Perwira Tinggi Purnawirawan pada Departemen Angkatan Darat yang diperbentukan pada Departemen Luar Negeri, terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintahan Republik Brasil Serikat yang berkedudukan di Rio de Janeiro, dari Rio de Janeiro ke Djakarta sebagai berikut;

- a. ia beserta keluarganya yang terdiri dari seorang isteri dan 2 (dua) orang anaknya yang masing2 berumur 18 dan 16 tahun telah berangkat dalam bulan Nopember 1966 dengan menumpang pesawat udara menuju ke tempat kedudukannya yang baru di Djakarta;
- b. ia beserta keluarganya tiba di Djakarta tanggal 4 Nopember 1966;
- c. ia diizinkan untuk membawa kembali ke Indonesia seorang pengasuh anak (nurse) bernama Nj. Marto Soedarmo umur 47 tahun atas biaya sendiri;
- d. route, uang harian dan lain2 yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanan yang bersangkutan diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
- e. kepadanya diizinkan untuk membawa/mengirimkan perabot rumah tangga (verhuisboedel) ke tempat kedudukannya yang baru di Djakarta yang memakan ruangan sebenjak-banjaknya 25 m3 (Dua puluh lima meter kubik) termasuk sebuah mobil kepunjaan sendiri dengan alat perangkutan yang semurah-murahnya atas biaya Negara;
- f. semua biaya yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanan yang bersangkutan dibebankan pada anggaran belanda Direktorat Perjalanan Negeri;
- g. apabila dikemudian hari ternyata terdapat keleliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.-

SELINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Sekretariat Negara (Biro I);
2. Departemen Keuangan;
3. Direktorat Perjalanan Negeri;
4. Direktorat Biro Lalu Lintas Devlan;
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
6. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor;
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
8. Biro Tata Usaha Kopegawaian (Mekanisasi) KUP di Jogjakarta;
9. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rio de Janeiro;
10. Departemen Angkatan Darat;

Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjtjok dengan buku daftar terasakub diatas,
Kopala Bagian Personalia Luar Negeri
Amioldiaf
(Zuinol Aziz M.A.)

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 18 / 11 BAHU 1960

KAJA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan dipindahkannya Mr. EUDOLF ALEXANDER AEMAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Kerajaan Jepang di Tokyo, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Sdr. BAMBANG SUCENG, Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada Takhta Suci di Vatikan, memikul ajaran-ajaran untuk diorahi tugas tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;

Mengingat : Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 73);

Mendengar : Menteri Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Perhitung mulai tanggal keberangkatan berangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Kerajaan Jepang di Tokyo;

Sdr. BAMBANG SUCENG

terakhir Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada Takhta Suci di Vatikan;

dengan tjetatan, bahwa :

- pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan tersebut diatas;
- masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam masa jabatan ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- selama memegang jabatan tersebut diatas, terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.e. pegawai Departemen Luar Negeri;
- pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari Vatikan ke Tokyo akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- segala sesuatu akan dirobah seperluasnya, apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

BALIHAN

BAHWA surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Departemen Luar Negeri,
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,
- 3. Kabinet Perdana Menteri,
- 4. Sekretariat Jember Menteri,
- 5. Sekretaris Jenderal,
- 6. Jawan Pengawas Kelirgan di Bogor,
- 7. Kantor Urusan Pwanni,
- 8. Kantor Pusat Perhubungan,
- 9. Kantor Penetapan Pajak,
- 10. Djawatan Peradilan,
- 11. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
- 12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, dan

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Januari 1960,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUKARNO.

Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS I PRESIDEN,



[Handwritten signature]

Dr. RANTOSO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 385/M TAHUN 1956.

KANI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan dipindahkannya Dr. ALFIAN YUSUF HELMI, Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh dengan gelar Pribadi Duta Besar pada Tachta Sutji di Vatican, ke Kementerian Luar Negeri di Djakarta, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Sdr. BAMBANG SUGENG, bekas Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia, memenuhi syarat-syarat untuk diserahi tugas tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);
2. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1955 No. 3078/4406/I-19/55;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-20 pada tanggal 25 Juli 1956;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1956, mengangkat sebagai Duta Republik Indonesia pada Tachta Sutji di Vatican

Sdr. BAMBANG SUGENG

bekas Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia;

dan memerintahkan, bahwa:

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahannya dari Djakarta ke Vatican (Roma) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan, untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Wakil Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Semua Kementerian,
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,
6. Lembaga Pengawas Keuangan,
7. The Courier Djenderal,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Kantor Penetapan Pajak,
11. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
12. Kantor Perdjalan,
13. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
14. Kedutaan Republik Indonesia di Vatican.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 117/M TAHUN 1955.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : dsb.-
Memperhatikan : dsb.-
Menimbang : dsb.-
Mengingat : dsb.-
Mendengar : dsb.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 8 Mei 1955 memperhentikan dengan hormat,
atas permohonannya sendiri, perwira tinggi :

N a m a : BAMBANG SOEGENG; N.R.P. 10001
Pangkat : Djenderal Mayor;
Djabatan : Kepala Staf Angkatan Darat;
Tempat kedudukan : Djakarta;

dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dan dari pangkatnja dalam dina
ketentaraan;

dengan penegasan bahwa perwira tinggi tersebut dengan sendirinja &
perhentikan djuga dari jabatan-jabatan lainnja jang dipangkatnja karena
djabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat;

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja kepada Negara;

dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke-
liruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : dsb.-

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Mei 1955.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno
SUKARNO
PERDANA MENTERI.

Ali Sastroamidjoro
ALI SASTROAMIDJOJO
MENTERI PERTANAHAN,

Iwa Kusbiana
IWA KUSBIANA MENTERI

K U T I P A N

SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 11 TAHUN 1949.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : dsb.-

Mendengar : dsb.-

M e m u t u s a k a n :

~~Terdahulu~~ ~~mulai~~ tanggal 27 Desember, 1949.

MOLONEY BAMBANG SOEGEIG

~~mendapat~~ ~~Kepala~~ ~~Struktur~~ ~~Angkatan~~ ~~Darat~~ ~~Republik~~ ~~Indonesia~~ ~~Serikat~~.

Entipan Surat Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan di-indahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 December 1949.

P
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,



Soekarno
(SOEKARNO).

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Hamengkubuwono IX

(Letnan Djenderal HAMENGKU BUWONO IX).

KEPUTUSAN - KEPUTUSAN RAPAT PERWIRA ANGKATAN DARAT

1. MUKADDIMAH.

Persatuan adalah syarat penting untuk menciptakan keutuhan dan suatu organisasi pada umumnya. Angkatan Darat pada khususnya, keutuhan mana sangat diperlukan guna mewujudkan kekuatan dari organisasi itu dan guna menjamin kelangsungan hidupnya.

Pada akhir-akhir ini kita rasakan dan kita saksikan adanya perselisihan-perselisihan paham dalam Angkatan Darat yang sampai mempunyai pengaruh jelek pada keutuhan Angkatan kita.

Sebetulnya, perselisihan paham atau perbedaan pendapat di dalam suatu organisasi itu, adalah soal biasa, bahkan justru dengan adanya itulah organisasi tadi akan mengalami kemajuan, asalkan perselisihan paham atau perbedaan pendapat tadi diselesaikan dengan musyawarah dalam suasana penuh semangat toleransi, harga-menghargai dan saling pengertian, dan lagi semata-mata guna perbaikan organisasi itu.

Jikalau persoalan paham atau perbedaan pendapat itu tidak diselesaikan dengan cara-cara seperti tersebut di atas, maka mudah sekali perselisihan paham atau perbedaan pendapat tadi meningkat menjadi pertentangan, pertentangan menjadi perpecahan dan akhirnya dapat merobah menjadi pertikaian.

Bagi Tentara, pertikaian itu dapat menjadi bentrokan bersenjata.

Dengan cara musyawarah seperti tersebut tadi itu, maka kesulitan yang berupa perselisihan paham yang kita hadapi pada dewasa inipun akan dapat kita atasi.

Persatuan dan keutuhan adalah soal bathin.

Seribu pernyataan, seribu janji tidak akan merupakan jaminan bagi persatuan dan keutuhan, apabila tidak timbul dari hati sanubari setiap prajurit.

Apabila kita teliti sejak lahirnya Tentara kita sampai pada waktu ini, ternyata memang banyakkah unsur-unsur yang telah dan yang sedang menjadi sumber-sumber perselisihan, setidak-tidaknya yang bisa mengurangi hubungan baik di antara kita sama kita.

Unsur-unsur tadi ada yang bersipat zakelyk, ada yang bersipat kejiwaan (psikhologis).

Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut :

1. Beraneka-wamanya tenaga Angkatan Darat.
2. Belum tegasnya kedudukan Angkatan Darat di dalam rangka ketatanegaraan.
3. Belum jelasnya pedoman-pedoman ideologis.
4. Pengaruh politik.
5. Belum lagi adanya penyelesaian persoalan di sekitar peristiwa 17 Oktober 1952.

6. Perbedaan faham tentang pembangunan Angkatan Darat.
7. Unsur-unsur *psychologis* antara lain krisis moral, krisis pimpinan dan sifat-sifat yang mementingkan golongan dan kedaerahan.

2. Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, maka supaya kepada Kasad disarankan untuk mengambil langkah-langkah seperlunya dan memintakan perhatian daripada instansi-instansi yang diperlukan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Saran: saran untuk mewujudkan dan memelihara keutuhan dan persatuan Angkatan Darat.

Guna mewujudkan dan memelihara keutuhan dan persatuan Angkatan Darat perlu diusahakan menghilangkan unsur-unsur yang menyebabkan perselisihan-perselisihan.

1. Beraneka ragam tenaga-tenaga Angkatan Darat.
Untuk mengurangi perbedaan sebaiknya diadakan pendidikan-pendidikan persamaan.
2. Pengaruh politik.
Perlu kiranya ditekan lagi tentang larangan bagi anggota-anggota Angkatan Perang untuk aktif menjalankan politik, seperti tersebut dalam instruksi Kasad mengenai hal ini.
Selanjutnya dengan dicari ketegasan mengenai batas-batas kekuasaan politik ke dalam organisasi Angkatan Darat.
3. Unsur-unsur *psikologis*.
Pada umumnya sifat-sifat yang tidak baik itu haruslah dihilangkan dengan asuhan dan pemeliharaan rohani. Persatuan yang sentausa, adalah persatuan yang terletak dalam bathin, tidak yang hanya di lahir saja.
4. Pelaksanaan usaha-usaha untuk mengembalikan mutu dari moral di antaranya adalah mempergiat pekerjaan CPRAD dan memintakan perhatian dari para Komandan guna memberi bantuannya.
5. Tindakan-tindakan yang dipandang tidak baik dari sudut moral memang tidak bisa dijatuhi hukuman jikalau tidak melanggar hukum-hukum atau peraturan-peraturan tata tertib. Dapatlah kiranya dipertimbangkan untuk beberapa sila-sila hidup (*leefregels*) dijadikan peraturan-peraturan tata tertib yang dapat diberi sanksi hukum.
Tentang adanya Ikatan Perwira Republik Indonesia, dapatlah dikedukakan bahwa organisasi itu adalah suatu badan yang penting bagi mewujudkan keutuhan, dapat berkembang dengan baik.
Perkembangan ini dapat terwujud jika kita, para Perwira semua, menaruh perhatian organisasi tersebut. Bantuan Kasad untuk memajukan organisasi itu akan besar manfaatnya.

3. TENTANG PENYELESAIAN PERISTIWA 17 OKTOBER 1952.

Rapat Perwira Angkatan Darat menyarankan dengan menimbang, bahwa: Penyelesaian persoalan di sekitar 17 Oktober 1952 adalah di dalam kekuasaan pemerintah ;

Dwitunggal merupakan lambang kesatuan dan persatuan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang pada hakekatnya menghendaki tertegaknya rasa keadilan yang seluas-luasnya ;

Dwitunggal berdiri di atas partai-partai dan golongan.

DIPUTUSKAN :

Demi Keutuhan Angkatan Darat :

1. Memusatkan penyelesaian persoalan di sekitar 17 Oktober 1952 kepada pemerintah dengan menggunakan manfaatnya pengaruh Dwitunggal untuk tegaknya landasan rasa keadilan yang seluas-luasnya.
 2. Menaati segala keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan Dwitunggal.
 3. Dengan segala keikhlasan hati dan kesadaran yang sebesar-besarnya menyatakan, bahwa persengketaan yang antara lain berupa curiga-mencurigai, tuduh-menuduh dan sebagainya yang timbul selama ini di kalangan anggota-anggota Angkatan Darat, sebagai akibat dari persoalan di sekitar 17 Oktober '52, telah hapus.
 4. Guna memudahkan penyelesaian persoalan di sekitar 17 Oktober 1952, menyarankan kepada Kasad untuk mengambil tindakan-tindakan pendahuluan seperti halnya, antara lain dengan mengadakan penggeseran jabatan-jabatan Co Rouleringen.
 5. Menyarankan kepada Pemerintah dengan Dwitunggal untuk menyelesaikan persoalan di sekitar 17 Oktober 1952 sebelum 17 Agustus 1955.
4. SARAN-SARAN RAPAT PERWIRA ANGKATAN DARAT TENTANG PEMBANGUNAN ANGKATAN DARAT.

1. UNSUR IDIIL.

Menganggap perlu adanya unsur-unsur idiil yang sederhana yang mudah dapat ditangkap oleh segenap lapisan keprajuritan Indonesia yang segalanya itu ditujukan untuk mempertinggi nilai-nilai pribadi dan kesadaran nasional dalam rangka pembawaan sebagai milik rakyat Indonesia.

2. UNSUR POLITIS.

Menganggap perlu segera adanya ketentuan-ketentuan dari pemerintah yang akan dijadikan pedoman bagi Angkatan Perang untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka pembelaan Negara dan dengan demikian menegaskan kedudukan Angkatan Darat dan untuk itu perlu dibentuk badan-badan yang akan merumuskan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam waktu yang singkat, badan-badan mana

telah diresmikan adanya di dalam Undang-undang No. 29 tahun '54 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.

3. UNSUR-UNSUR TEHNIS.

Beranggapan bahwa dengan mempergunakan organisasi-organisasi yang sekarang ada, hendaknya :

- a. Ditentukan tugas yang tegas, sehingga dapat ditentukan organisasi sebagai protes setepat-tepatnya.
- b. Berdasarkan ad a ditentukan fungsi-fungsi yang menentukan struktur organisasi bersendi azas kesederhanaan.
- c. Ditinjau dan dinilai kembali penjabat-penjabat di dalam tiap-tiap struktur organisasi dengan dasar ukuran pertumbuhan waktu dan daya kemampuan/kecerdasan sebagai syarat utama untuk tiap-tiap tugas dan fungsi dalam tiap-tiap struktur organisasi, sehingga dapat diadakan perubahan personil.
- d. Dalam hal ini diadakan pergiliran tugas, jabatan dan tempat, dari tingkatan atas sampai ke bawah.

PIAGAM KEUTUHAN.

1. Dalam usaha kita untuk mengatasi perselisihan paham dalam Angkatan Darat, kita sebagai persaksan terhadap keinginan kita semua untuk mewujudkan keutuhan dan persatuan, maka kita membuat suatu Piagam Keutuhan Angkatan Darat.
2. Penandatanganan Piagam ini diartikan sebagai niat yang sungguh-sungguh untuk menanggalkan dan menjauhkan sifat-sifat dan perbuatan yang dapat membahayakan persatuan dan untuk memperbaharui tekad mengkorek diri masing-masing sesuai dengan isi Piagam.

Agar supaya pihak atasan yang berwajib dapat mengikuti jalan pikiran yang menghasilkan saran tersebut di atas, maka Rapat Perwira Angkatan Darat memandang perlu untuk menyertakan lampiran-lampiran yang memuat pandangan-pandangan bagi pelaksanaan se-perdunya.

Yogyakarta tanggal 21 Februari 1955.

Atas Nama Rapat Perwira Angkatan Darat.

Ketua,

ttt.

(BAMBANG SUGENG)*

Jenderal Mayor

NRP.: 10031. *)